



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Tugas dan Persyaratan Guna Mencapai Gelar S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh

HERZELA MAYDEA SAHARA

NIM. 12270322340

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2026



LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Herzela Maydea Sahara
 NIM : 12270322340
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Judul : Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
 Tanggal Ujian : 7 Mei 2026

Tim Penguji

Ketua

Ferizal Rachmad, S.E., M.M
 NIP. 19750216 201411 1 001

Penguji 1

Dr. Nasrullah Diam il, S.E M.Si., Ak., CA., OIA., OGIA
 NIP. 19780808 200710 1 003

Penguji 2

Harkaneri, S.E., MSA, AK, CA
 NIP. 19810817 200604 2 007

Sekretaris

Ermansyah, S.E., M.M
 NIP. 19850328 202321 1 011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Herzela Maydea Sahara
 NIM : 12270322340
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Program Studi : S1 Akuntansi
 Judul : Analisis Rasio Kesenjangan Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

DISETUJUI OLEH PEMBIMBING

Harkaneri, S.E., MSA, AK, CA

NIP. 19810817 200604 2 007

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
 NIP. 19740412 200604 2 002

Hesty Wulandari, M.Phil., Msc., Ak
 NIP. 19821207 201101 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HERZELA MAYDEA SAHARA
NIM : 12270322340
Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 25-Mei-2004
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : SI Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya*:

Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan
Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan
pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Di Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah-lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah-lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 Mei 2026

Vana Membuat Pernyataan



Herzela Maydea Sahara
NIM.1212270322340



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Oleh:

HERZELA MAYDEA SAHARA

12270322340

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi realisasi belanja daerah, keselarasan antara belanja operasional dan belanja modal, serta konsistensi antara capaian pendapatan dan serapan belanja dalam mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (*Mixed Methods*) dengan desain urutan penjelasan (*Explanatory Sequential Design*). Tahap pertama dilakukan analisis kuantitatif terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 14 OPD terpilih, yang kemudian ditindaklanjuti pada tahap kedua dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara terstruktur untuk menjelaskan hasil kuantitatif secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian, temuan menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah di Indragiri Hilir efektif secara agregat namun masih lemah dalam kemandirian fiskal karena ketergantungan pada dana transfer. Sementara itu, realisasi belanja tercapai secara administratif namun terkendala *under-spending* akibat hambatan teknis dan birokrasi. Alokasi anggaran didominasi oleh belanja operasional (lebih dari 85%) dengan investasi modal yang minim. Secara keseluruhan, pengelolaan keuangan belum selaras karena pendapatan yang stabil tidak diikuti dengan kualitas belanja yang optimal, sehingga prinsip *Value For Money* belum tercapai sepenuhnya.

Kata kunci: Efektivitas Pendapatan, Keserasian Belanja, Belanja Modal, Belanja Operasional



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Analysis of the Alignment Ratio of Capital and Operational Expenditure and the Revenue Effectiveness Ratio in Regional Government Organizations of the Indragiri Hilir Regency Government

By

HERZELA MAYDEA SAHARA
1227032340

The purpose of this study is to analyze the effectiveness and growth of regional revenue realization, the effectiveness and efficiency of regional expenditure realization, the alignment between operational and capital spending, and the consistency between revenue achievements and expenditure absorption in supporting the optimization of financial management within the Regional Apparatus Organizations of Indragiri Hilir Regency during the period 2022–2024. This study employs a mixed methods approach with an explanatory sequential design. The first phase involved a quantitative analysis of the Budget Realization Reports from 14 selected Regional Apparatus Organizations, which was subsequently followed by a second phase of qualitative data collection through structured interviews to explain the quantitative results in greater depth. Based on the results of the study, the findings show that regional revenue performance in Indragiri Hilir is effective in aggregate but remains weak in fiscal independence due to a heavy reliance on central government transfers and stagnant Local Generated Revenue. Meanwhile, expenditure realization is achieved administratively but remains constrained by underspending caused by technical and bureaucratic hurdles. Budget allocation is dominated by operational spending (over 85%) with minimal capital investment, indicating a focus on routine administration rather than development. Overall, financial management is not yet aligned, as stable revenue is not followed by optimal spending quality; thus, the Principle of Value for Money has not been fully achieved, and the impact on public welfare remains limited.

Keywords: *Revenue Effectiveness, Expenditure Alignment, Capital Expenditure, Operational Expenditure.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ahlan dulillahirrobbil'alam, Dengan penuh rasa syukur, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas anugerah-Nya berupa kesempatan, kesehatan, dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya ilmu pengetahuan yang kita nikmati saat ini. Skripsi ini berjudul **“Analisis Rasio Kesenjangan Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir”** disusun dan diangkat oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karya sederhana ini penulis persembahkan untuk cinta pertama dalam hidup penulis, Ayahanda Heriansyah dan Ibunda Zahlelawati, yang selalu menyayangi, memberikan nasihat, serta menyemangati penulis untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Terima kasih atas segala doa, kesabaran, kasih sayang, serta dukungan yang tak pernah terputus. Tiada balasan setimpal yang dapat penulis berikan, kecuali doa agar Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda. Penulis juga menyampaikan rasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terima kasih yang tulus kepada Kakek dan Nenek tercinta, serta Tante Rosita, Tante Rositi, Om Haidir, dan Om Bakrie atas segala doa, dukungan, kasih sayang, motivasi, serta nasihat yang selalu menguatkan penulis dalam setiap langkah. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu seluruh kerabat lainnya. Terima kasih atas dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti dipanjatkan untuk keberhasilan penulis. Semoga kebahagiaan dan keberkahan senantiasa menyertai kita semua.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat mengapresiasi bantuan, arahan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Karena itu, dengan tulus, penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Desrir Miftah, SE, M.M., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Nurlasera, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairil Henry, S.E., M.Si., Ak selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, S.Pd., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Hesty Wulandari, M.Phil., M.Sc., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Zikri Aidilla Syarli, S.E., M.Ak selaku Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Febri Rahmi, SE., M.Ak. selaku Pembimbing Akademis yang selalu memberikan nasehat, dan arahan selama menjalankan perkuliahan.
9. Ibu Harkaneri, S.E.,MSA.AK, CA selaku Pembimbing Skripsi serta Skripsi yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan nasehat yang sangat berharga kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Staf Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Bapak Padli, S.Pd.I., selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah memberikan izin, dukungan, serta arahan yang sangat berharga bagi penulis selama menjalankan penelitian di lingkungan DPRD Inhil dan seluruh Dinas OPD.
13. Bapak dan Ibu Pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, yang telah memberikan izin penelitian, bantuan data, serta saran-saran yang membangun bagi penyempurnaan hasil penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Seluruh Staf di Dinas OPD yang telah penulis datangi, terima kasih atas keramahan, bantuan, dan kerja samanya dalam mempermudah penulis memperoleh informasi yang dibutuhkan selama berada di lapangan.
15. Seluruh teman-teman seperjuangan Kelas Akuntansi D, terima kasih atas kebersamaan, tawa, canda, hingga tangis yang telah kita lalui bersama selama masa perkuliahan. Kehadiran kalian adalah warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis.
16. Keluarga besar DEMA FEKONSOS UIN Suska Riau, khususnya pada Kabinet Cakra Abinaya dan Kabinet Arunika Cakrawala. Terima kasih atas kesempatan, pembelajaran, serta kerja sama luar biasa selama dua tahun kepengurusan penulis. Suka dan duka yang kita lalui, mulai dari amanah sebagai Staff Departemen hingga dipercaya menjadi Ketua Departemen PPSDM, adalah guru terbaik dalam mendewasakan pola pikir dan karakter penulis. Rekan-rekan serta Adik-adik tercinta di Departemen PPSDM, terima kasih atas loyalitas, ketulusan, serta kebersamaan yang telah terjalin. Kalian adalah alasan penulis tetap semangat dalam berproses; terima kasih atas segala pembelajaran yang kalian berikan.
17. Sahabat terdekat penulis, Yusy Khairun Niswati, terima kasih telah hadir sejak masa MTs hingga saat ini, selalu ada dalam suka maupun duka. Serta kepada Rahmah Afdhali, sahabat sejak masa MAN hingga sekarang. Terima kasih atas dukungan yang tiada henti, semangat yang selalu kalian kobarkan, serta kesediaan kalian untuk selalu mendengarkan keluh kesah penulis hingga skripsi ini selesai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, analisis serta saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi penulis, pembaca, maupun perkembangan ilmu pengetahuan secara umum. Akhir kata, semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Aamiin ya Rabbal'Alaamiin...

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 11 Februari 2026

Penulis

HERZELA MAYDEA SAHARA

NIM. 12270321382

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian.....	20
1.5 Sistematika Penulisan:.....	21
BAB II LANDASAN TEORI	22
2.1 Tinjauan Teoritis	22
2.1.1 <i>Stewardship</i> Teori	22
2.1.2 <i>Value For Money</i>	24
2.2 Definisi Kinerja	25
2.2.1 Definisi Indikator Kinerja	27
2.2.2 Pengukuran Kinerja.....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja	31
2.3	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	33
2.4	Pendapatan Daerah	44
2.5	Belanja Daerah	46
2.6	Realisasi.....	53
2.6.1	Laporan Realisasi Anggaran Keuangan	55
2.7	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	56
2.8	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	59
2.9	Rasio Pertumbuhan Belanja	60
2.10	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.....	61
2.11	Analisis Kesenjangan Belanja	63
2.12	Belanja Operasi	66
2.13	Belanja Modal	67
2.14	Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Anggaran	68
2.15	Pandangan Islam Terkait Penelitian	71
2.16	Penelitian Terdahulu.....	73
2.17	Kerangka Pemikiran	79
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		80
3.1	Jenis Penelitian.....	80
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	81
3.2.1	Tempat Penelitian.....	81
3.2.2	Waktu Penelitian	81
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian	81
3.3.1	Jenis Data	81
3.3.2	Sumber Data Penelitian.....	82
3.3.2.1	Data Sekunder	82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2.2 Data Primer	82
3.4 Objek Penelitian	82
3.5 Teknik Pengumpulan Data	85
3.5 Teknik Analisis Data	87
3.6 Identifikasi Definisi Operasional Variabel	90
3.7 Metode Analisis Data	92
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	98
4.1 Hasil Penelitian	98
4.1.1 Analisis Rasio Efektivitas	98
4.1.2 Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja	129
4.1.3 Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	152
4.1.4 Analisis Rasio Kerasian Belanja	159
4.2 Hasil Wawancara	182
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	215
BAB V PENUTUP	236
5.1 Kesimpulan	236
5.2 Saran	238
DAFTAR PUSTAKA	240
LAMPIRAN	246
RIWAYAT PENULIS	365



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: <i>Value For Money</i> Secara Skematis	25
Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran.....	79





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Rincian Target dan Realisasi Pendapatan 9 OPD (2022–2024).....	246
Lampiran 2: Rincian Target dan Realisasi Belanja 14 OPD (2022–2024)	247
Lampiran 3: Efektivitas Pendapatan	248
Lampiran 4: Efektivitas Belanja.....	249
Lampiran 5: Pertumbuhan Pendapatan	250
Lampiran 6: Pertumbuhan Belanja.....	251
Lampiran 7: Efisiensi Belanja.....	252
Lampiran 8: Kesenjangan Belanja Operasi	253
Lampiran 9: Kesenjangan Belanja Modal.....	254
Lampiran 10: Dokumentasi.....	255
Lampiran 11: Teks Wawancara	260
Lampiran 12: Surat Pra Riset	358
Lampiran 13: Surat Riset	359
Lampiran 14: Surat Riset	360
Lampiran 15: Surat Riset	361
Lampiran 16: Surat Riset	362
Lampiran 17: Surat Riset	363
Lampiran 18: Surat Riset	364

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperbarui dan diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan ini memberikan beragam hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menangani isu pemerintahan serta kebutuhan masyarakat secara independen. Konsekuensi dari otonomi ini adalah tuntutan kemandirian daerah dalam mengelola keuangan, yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan pendapatan yang optimal dan belanja yang tepat sasaran (Nugroho, 2025).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperbarui dan diperbaiki melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Aturan ini memastikan pelaksanaan otonomi daerah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut untuk mengatur pengeluaran rutin dan operasional, tetapi juga harus membuat keputusan yang mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam manajemen anggaran, dengan harapan meningkatkan kualitas layanan publik dan pemerintahan (Habibi et al., 2024). Konsekuensi dari otonomi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tidak hanya piawai dalam mengatur pengeluaran (belanja), tetapi juga harus mampu mengoptimalkan potensi penerimaan (pendapatan). Pemerintah daerah dituntut untuk membuat keputusan anggaran yang memprioritaskan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keserasian. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik tercermin dari kemampuannya merealisasikan target pendapatan untuk membiayai belanja daerah, serta mengalokasikan belanja tersebut secara seimbang antara kebutuhan operasional dan pembangunan infrastruktur publik demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari kemampuan menghabiskan anggaran, tetapi harus berorientasi pada prinsip *Value For Money*, yang meliputi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Kinerja keuangan yang baik ditandai dengan kemampuan daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta ketepatan dalam merealisasikan belanja untuk kepentingan publik (Mahmudi, 2019). Oleh karena itu, analisis terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi sangat krusial untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan daerahnya dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Aspek pertama yang menjadi sorotan adalah Efektivitas Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan utama bagi pembangunan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan, khususnya

PAD, menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut. Jika realisasi pendapatan tidak mencapai target (*inefektif*), maka akan berdampak langsung pada terhambatnya program-program belanja yang telah direncanakan (Halim, A.; Kusufi, 2020). Fenomena yang sering terjadi di banyak daerah adalah target pendapatan yang tidak realistis atau upaya intensifikasi pemungutan pajak/retribusi yang belum maksimal.

Aspek kedua adalah Efektivitas dan Keserasian Belanja Daerah. Efektivitas belanja mengukur kesuksesan penyerapan anggaran dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan. Namun, penyerapan tinggi saja tidak cukup jika tidak diimbangi dengan Keserasian Anggaran. Keserasian berbicara mengenai keseimbangan alokasi dana, yaitu proporsi antara Belanja Operasi (belanja rutin birokrasi) dan Belanja Modal (belanja investasi publik). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah harus diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ketimpangan struktur anggaran yang didominasi oleh Belanja Operasi mengindikasikan bahwa anggaran lebih banyak habis untuk membiayai aparatur pemerintah dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur yang dinikmati masyarakat (Hertianti & Nordiawan, 2019).

Namun, realitas empiris di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara perencanaan anggaran yang ideal dengan realisasi yang dicapai. Fenomena ketidaktercapaian target pendapatan dan inefisiensi penyerapan belanja masih menjadi tantangan utama bagi banyak pemerintah daerah. Menurut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Bastian, 2021), evaluasi terhadap selisih anggaran (*budget variance*) sangat penting dilakukan untuk mendeteksi dini kinerja organisasi yang tidak optimal.

Secara normatif, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal utama yang mencerminkan prioritas pembangunan daerah dan komitmen pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif semata, melainkan harus berorientasi pada prinsip *Value For Money* yang mengedepankan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo 2018). Dalam perspektif akuntansi sektor publik, pemerintah daerah sebagai pemegang amanah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan mampu memberikan dampak nyata (*outcome*) bagi pelayanan publik, serta meminimalisir terjadinya pemborosan anggaran yang dapat menghambat laju pembangunan daerah (Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi 3). 2019).

Fenomena kerentanan wilayah pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya Kota Tembilahan, semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Banjir rob yang terjadi secara berulang tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga melumpuhkan aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat. Pada akhir tahun 2025, sejumlah ruas jalan di Tembilahan kembali terendam banjir rob hingga menyebabkan kendaraan mogok dan air masuk ke rumah warga (LiputanOke, 2025; Tran7 Riau, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa daya dukung infrastruktur daerah belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika pasang surut air laut yang semakin ekstrem, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan adaptasi wilayah pesisir dan kapasitas infrastruktur yang tersedia.

Permasalahan tersebut diperparah oleh krisis infrastruktur jalan yang bersifat kronis. Kerusakan jalan di berbagai titik, termasuk akibat beban truk bertonase tinggi, menunjukkan lemahnya pengawasan dan kualitas pemeliharaan (PotretNews, 2024). Fenomena “jalan retak seribu” yang telah lama dikeluhkan masyarakat juga menunjukkan bahwa realisasi perbaikan sering kali tidak berjalan optimal (Gardametro, 2022). Di sisi lain, proyek pembangunan jalan di beberapa lokasi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan skala prioritas kebutuhan publik (Pojok.co, 2024).

Secara teoretis, kondisi tersebut berkaitan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2018), pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada prinsip *Value For Money*, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran publik. Apabila belanja daerah belum mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, maka dapat diindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan hasil yang dicapai.

Persoalan tata kelola pembangunan juga tercermin dari kondisi aset daerah yang kurang terawat. Plaza Tembilahan dilaporkan terbengkalai (Radar Indo, 2024), sementara pasar rakyat mengalami kerusakan sehingga pedagang berjualan di antara reruntuhan bangunan (Riau Akses, 2024). Kondisi ini memperlihatkan rendahnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai instrumen penggerak ekonomi. (Mahmudi, 2019) menyatakan bahwa efektivitas belanja daerah diukur dari sejauh mana anggaran mampu menghasilkan output dan *outcome* yang sesuai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan pembangunan. Dengan demikian, terbengkalainya aset publik menunjukkan belum optimalnya capaian *outcome* pembangunan daerah.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat di wilayah Pekan Arba, Tembilahan dan Sungai Luar. Narasumber menyatakan bahwa banjir rob merupakan kejadian tahunan yang menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan. Meskipun pada periode 2024–2025 mulai terlihat peningkatan normalisasi parit dan perbaikan jalan, penanganan pada tahun 2022–2023 dinilai belum maksimal. Akses menuju Pondok Pesantren Simpang Tiga dan beberapa sekolah dasar masih dalam kondisi rusak parah. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam alokasi belanja, di mana kebutuhan dasar publik belum sepenuhnya menjadi prioritas utama.

Dalam konteks struktur APBD, (Halim, A.; Kusufi, 2020) menjelaskan bahwa rasio keserasian belanja digunakan untuk menilai proporsi antara belanja operasi dan belanja modal. Dominasi belanja operasi yang terlalu besar berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan aset produktif. Persepsi masyarakat yang menilai belanja rutin birokrasi lebih dominan dibanding belanja modal menunjukkan adanya dugaan ketidakseimbangan dalam struktur belanja daerah.

Selain itu, pada sektor pertanian dan perikanan, bantuan pemerintah yang lebih berorientasi pada pemberian fisik tanpa pelatihan berkelanjutan menunjukkan bahwa belanja belum sepenuhnya menghasilkan dampak jangka panjang terhadap kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas pendapatan daerah dan

keserasian belanja dalam APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Secara keseluruhan, rangkaian fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan anggaran dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, analisis mengenai rasio efektivitas pendapatan dan rasio keserasian belanja menjadi krusial untuk mengevaluasi sejauh mana APBD Kabupaten Indragiri Hilir telah digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip *Value For Money* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan data awal Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022–2024, terindikasi adanya fluktuasi kinerja yang signifikan pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) strategis. Guna memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai fenomena tersebut, berikut disajikan data rekapitulasi target dan Realisasi Pendapatan serta Anggaran dan Realisasi Belanja dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Objek Penelitian. Data ini menunjukkan secara rinci capaian kinerja masing-masing OPD yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

Analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024 menunjukkan adanya inkonsistensi kinerja yaitu pendapatan terlihat stabil secara total tapi jika dibedah per-OPD, banyak yang tidak sehat yang signifikan. Secara agregat, pendapatan daerah terlihat stabil, namun bedah data mendalam pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis mengungkap kondisi kinerja yang tidak sehat pada tingkat unit kerja. Meskipun sisi penerimaan menunjukkan stabilitas, terdapat kerapuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktural dan inefisiensi belanja yang bersifat sistemik serta meluas di hampir seluruh lini birokrasi.

Masalah utama dalam realisasi belanja ini bukan sekadar persoalan daya serap anggaran yang rendah (anggaran tidak habis), melainkan lebih pada aspek ketidaktepatan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan sasaran strategis. Masalah belanja bukan hanya soal "uang tidak habis," tapi soal "uang tidak digunakan secara tepat" di hampir seluruh dinas (Inefisiensi Sistemik). Kondisi tersebut memicu terjadinya kesenjangan (*budgetary gap*) yang lebar, yakni ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran pada dokumen resmi dengan realisasi faktual di lapangan. Hal ini mencerminkan adanya hambatan sistemik dalam mentransformasikan rencana anggaran menjadi capaian kinerja yang nyata di tingkat daerah.

Pada sisi Pendapatan Daerah, kinerja agregat menunjukkan hasil yang bervariasi namun cenderung positif secara kuantitatif. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1.820.972.907.080 (97,28% dari target), kemudian mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai Rp 2.011.421.056.396 atau 102,19% dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan tetap berada pada angka yang tinggi, yaitu Rp 2.034.319.464.892 atau 94,25%. Namun jika ditelaah lebih mendalam, struktur penerimaan ini masih sangat rentan dan memiliki ketergantungan yang ekstrem pada sumber dana eksternal. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebagai pengelola dana transfer pusat mendominasi struktur dengan realisasi pendapatan mencapai Rp 1.751.781.082.482 pada tahun 2022, meningkat menjadi Rp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.930.123.772.971 pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 1.869.764.878.893. Besarnya porsi dana transfer ini menyatakan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah dan sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pusat. Di sisi lain, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang bertanggung jawab atas pajak daerah menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan realisasi Rp 47.048.850.037 pada tahun 2024, meskipun masih terdapat ruang yang besar untuk optimalisasi.

Di tengah dominasi dana transfer, terdapat ketidaksamaan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat mencolok antar-OPD teknis. Dinas Kesehatan mencatatkan prestasi luar biasa (*outlier*) dengan lonjakan realisasi pendapatan yang sangat drastis. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan dinas ini hanya sebesar Rp 25.592.565.954, namun pada tahun 2024 melonjak tajam menjadi Rp 113.635.419.306 (108,83% dari target). Peningkatan lebih dari empat kali lipat ini mengindikasikan keberhasilan transformasi tata kelola keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bawah naungan dinas tersebut. Kinerja positif serupa juga ditunjukkan oleh Dinas Perhubungan, yang pada tahun 2024 berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp 1.606.980.486, jauh melampaui target konservatifnya sebesar Rp 810.000.000 (capaian 198,39%).

Namun, kondisi ini bertolak belakang dengan kinerja Dinas Perikanan yang mengalami stagnasi inefektivitas kronis. Selama tiga tahun berturut-turut, realisasi retribusi sektor perikanan tidak pernah menyentuh angka 5% dari target. Pada tahun 2022 realisasi hanya Rp 1.200.000 (1,42%), tahun 2023 sebesar Rp 2.100.000 (2,49%), dan tahun 2024 hanya Rp 3.150.000 (3,75%). Rendahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

capaian ini menunjukkan kegagalan sistemik dalam menggali potensi ekonomi unggulan daerah di sektor maritim. Hal serupa terjadi pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), di mana realisasi pendapatannya fluktuatif, dari Rp 13.500.000 (56,37%) pada 2022 menjadi Rp 18.100.000 (76,21%) pada 2024, angka yang masih sangat kecil dibandingkan potensi sektor pertanian yang ada. Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah (Setda) juga mencatatkan realisasi pendapatan yang stagnan di angka Rp 61.110.000 dan Rp 61.800.000 pada tahun 2024, yang menunjukkan terbatasnya sumber penerimaan lain-lain yang sah pada dinas tersebut.

Permasalahan yang lebih fundamental dan mengkhawatirkan terletak pada sisi Belanja Daerah, di mana terjadi tren penurunan efektivitas penyerapan anggaran (*underspending*) yang konsisten. Tingkat realisasi belanja daerah secara agregat menurun dari 88,92% pada tahun 2022 menjadi 82,93% pada tahun 2024. Penurunan ini didorong oleh melemahnya kinerja dinas-dinas *big spenders*. Dinas Pendidikan, yang mengelola anggaran jumbo, mengalami penurunan rasio realisasi dari 93,36% pada tahun 2022 (realisasi Rp 561.224.946.102) menjadi 85,19% pada tahun 2024 (realisasi Rp 666.216.687.089). Artinya, terdapat dana pendidikan puluhan miliar rupiah yang tidak terserap setiap tahunnya. Lebih parah lagi, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebagai ujung tombak pembangunan infrastruktur mencatatkan realisasi belanja terendah di antara dinas besar lainnya. Pada tahun 2023, dari anggaran Rp 184.127.373.870, hanya terealisasi Rp 120.756.594.185 (65,58%), dan pada tahun 2024 hanya mencapai 71,04%. Rendahnya serapan ini mengindikasikan adanya hambatan manajerial yang serius dalam eksekusi proyek fisik, yang berpotensi menghambat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Sistemik UIN Suska Riau
Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertumbuhan ekonomi daerah. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga mengalami tren penurunan dari 92,10% (2022) menjadi 79,43% (2024), menandakan perlambatan dalam program penyediaan perumahan rakyat.

Selain masalah daya serap, fenomena ketimpangan struktur anggaran (*budgetary slack*) terlihat paling nyata ketika membedah komposisi belanja. Terjadi asimetri yang tajam antara Belanja Operasi dan Belanja Modal. Pada Sekretariat DPRD (Setwan), Belanja Operasi (gaji dan operasional kantor) terserap sangat tinggi dan stabil (di atas 80-99%), namun Belanja Modal (pengadaan aset) mengalami kontraksi drastis. Pada tahun 2022, realisasi belanja modal Setwan mencapai Rp 2.800.371.782, namun angka ini anjlok menjadi Rp 1.860.731.680 pada tahun 2023, dan semakin merosot menjadi hanya Rp 766.943.530 pada tahun 2024. Penurunan lebih dari 70% ini menggambarkan bahwa fokus anggaran legislatif semakin berat pada aktivitas rutin birokrasi, sementara investasi aset pendukung kinerja semakin ditinggalkan. Pola serupa juga terjadi pada Sekretariat Daerah (Setda), di mana pada tahun 2024, realisasi Belanja Operasi mencapai Rp 82.892.441.766 (90,55%), sedangkan Belanja Modal hanya Rp 611.725.974.

Ketidakserasian ini ternyata merupakan gejala sistemik yang menjangkiti hampir seluruh OPD. Secara keseluruhan, struktur belanja daerah tahun 2024 didominasi oleh Belanja Operasi sebesar 85,13% (senilai Rp 1.274.594.873.038), sedangkan Belanja Modal hanya menempati porsi 14,79% (senilai Rp 221.452.999.106). Dinas-dinas teknis yang seharusnya berorientasi pada belanja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal justru kehilangan kapasitas pembangunannya. Sebagai bukti ekstrem, Dinas Pangan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2024 mencatatkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 0 (Nol Rupiah), yang berarti tidak ada sama sekali investasi aset atau pembangunan fisik pada kedua dinas tersebut di tahun 2024. Bahkan Dinas Perkebunan hanya mampu merealisasikan belanja modal sebesar Rp 65.190.300 pada tahun 2024, angka yang sangat minim untuk dinas teknis yang mengurus sektor perkebunan. Dinas Sosial pun mengalami penurunan belanja modal yang tajam, dari Rp 77.754.000 (2022) menjadi hanya Rp 29.190.800 (2024).

Dinas Pendidikan, sebagai pengelola anggaran wajib (*Mandatory Spending*) terbesar dalam APBD, dinas ini menunjukkan grafik kinerja yang terus menurun (*downward trend*) selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2022, realisasi belanja dinas ini masih tergolong sangat baik di angka 93,36%. Namun, kinerja ini mulai melemah pada tahun 2023 menjadi 92,58% (dengan realisasi sebesar Rp 596.048.541.775), dan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 menjadi 85,19% (dengan realisasi sebesar Rp 666.216.687.089). Besarnya sisa anggaran (SILPA) yang semakin membesar setiap tahunnya mengindikasikan lemahnya perencanaan anggaran serta lambatnya eksekusi program-program pendidikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR): Kinerja belanja dinas ini mengalami guncangan hebat. Jika pada tahun 2022 realisasi belanja masih berada pada level 78,74%, kinerja tersebut anjlok drastis pada tahun 2023 yang hanya mencapai 65,58% dari total pagu anggaran. Pada tahun 2024, upaya perbaikan belum maksimal dengan realisasi yang hanya bergerak lambat ke angka 71,04%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya, dalam dua tahun terakhir, hampir 30% dana infrastruktur fisik gagal diserap dan tidak terealisasi menjadi pembangunan nyata.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim): Mengikuti jejak inefisiensi yang terjadi pada PUTR, dinas ini mencatatkan penurunan kualitas penyerapan anggaran yang konsisten. Pada tahun 2022, Dinas Perkim mampu mencatatkan realisasi belanja sebesar 92,10%. Namun, capaian ini merosot menjadi 83,23% pada tahun 2023, dan kembali memburuk pada tahun 2024 di mana realisasi belanja tertahan di angka 79,43%. Tren penurunan kinerja ini berdampak langsung pada lambatnya penyediaan infrastruktur dasar permukiman bagi masyarakat. Dinas Perikanan, dukungan belanja modal pada dinas ini mengalami penyusutan yang sangat drastis. Pada tahun 2022, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp 870.338.740. Namun, angka ini turun tajam pada tahun 2023 menjadi Rp 154.944.000, dan semakin menyusut pada tahun 2024 menjadi hanya Rp 52.242.150. Tren negatif yang berkelanjutan ini menyebabkan nelayan semakin sulit mendapatkan bantuan peralatan tangkap modern guna meningkatkan produktivitas mereka.

Dinas Kesehatan. meskipun pendapatan BLUD meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir, struktur belanja modal pada dinas ini justru mengalami kontraksi. Pada tahun 2022, realisasi Belanja Modal tercatat sebesar Rp 18.205.617.529. Angka ini sempat mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi Rp 22.065.703.650, namun kembali turun pada tahun 2024 menjadi Rp 18.111.968.104. Penurunan belanja modal di tengah lonjakan pendapatan ini menjadi ketidaknormalan tata kelola keuangan dinas, di mana peningkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas fisik belum sebanding dengan besarnya pendapatan yang diterima. Dinas Perhubungan, realisasi belanja modal pada dinas ini cenderung stagnan dan belum optimal jika dibandingkan dengan kebutuhan sarana transportasi yang tinggi. Pada tahun 2022, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp 2.542.550.242. Angka ini meningkat menjadi Rp 4.077.215.904 pada tahun 2023, dan mencapai Rp 4.527.652.211 pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, kenaikan yang relatif tipis di tahun terakhir ini dinilai belum mampu mengejar ketertinggalan infrastruktur perhubungan daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menunjukkan konsistensi ketimpangan struktur anggaran yang ekstrem selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, porsi Belanja Operasi mendominasi secara signifikan dengan angka realisasi mencapai Rp 16.082.431.087. Pola asimetris ini berulang pada tahun 2023, di mana realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 20.323.098.898 terpaut jauh dibandingkan Belanja Modal yang hanya Rp 1.343.813.018. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, dengan realisasi Belanja Operasi yang meningkat menjadi Rp 23.342.770.144, berbanding terbalik dengan alokasi Belanja Modal yang hanya Rp 1.507.355.000. Besarnya dominasi belanja operasi ini mengindikasikan minimnya ruang fiskal yang tersedia untuk modernisasi sistem aset daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan ketidaksesuaian yang signifikan antara peningkatan alokasi belanja dengan capaian kinerja pendapatan. Pada periode tahun 2022 dan 2023, Bapenda mampu menjaga tren positif pendapatan daerah. Puncaknya pada tahun 2023, Bapenda mencatatkan realisasi pendapatan yang tinggi sebesar Rp 48.403.409.250 dengan dukungan belanja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasi dan modal yang proporsional. Namun, kondisi ini berbalik drastis pada tahun 2024, di mana realisasi pendapatan justru merosot turun menjadi Rp 47.048.850.037. Ironisnya, penurunan pendapatan ini justru terjadi saat Bapenda menaikkan alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal-nya secara signifikan. Peningkatan biaya (*cost*) yang justru menghasilkan pendapatan (*return*) yang lebih rendah ini membuktikan terjadinya inefisiensi kinerja yang, di mana biaya pemungutan pajak (*Cost of Collection*) menjadi semakin mahal, namun output yang dihasilkan justru menurun.

Ketidakselarasan capaian anggaran antara capaian pendapatan daerah yang relatif stabil dengan rendahnya efektivitas dan keserasian belanja daerah sebagaimana terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir bukanlah kondisi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan pola struktural yang juga ditemukan pada banyak pemerintah daerah di Indonesia (Bukhori & Riswati, 2023) menegaskan bahwa ketidakseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal merupakan indikator utama lemahnya kualitas pengelolaan APBD, di mana dominasi belanja operasional cenderung menggerus kapasitas fiskal daerah untuk mendorong pembangunan berbasis investasi publik. Kondisi ini sejalan dengan temuan di Kabupaten Indragiri Hilir yang menunjukkan dominasi belanja operasi hingga di atas 85%, sementara belanja modal mengalami kontraksi signifikan.

Lebih lanjut, (Carlos Arnold Atmoko & Khairudin, 2022) menemukan bahwa tingginya realisasi pendapatan daerah tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah apabila tidak diiringi dengan alokasi belanja modal yang memadai. Studi tersebut menunjukkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa belanja modal sering kali tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan akibat rendahnya realisasi dan lemahnya orientasi pembangunan jangka panjang. Temuan ini memperkuat fenomena di Indragiri Hilir, di mana meskipun realisasi pendapatan mencapai dan bahkan melampaui target pada beberapa tahun, belanja modal justru rendah dan tidak optimal, terutama pada dinas-dinas teknis.

Dari perspektif kemandirian fiskal, (Sihotang et al., 2025) menyatakan bahwa ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat merupakan ciri utama daerah dengan struktur keuangan yang rapuh. Dominasi dana transfer menyebabkan pemerintah daerah cenderung bersifat pasif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kurang terdorong untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor produktif. Kondisi ini tercermin jelas di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana BKAD mendominasi struktur pendapatan melalui dana transfer pusat, sementara kontribusi PAD dari sebagian besar OPD teknis relatif rendah dan stagnan.

Ketimpangan kinerja PAD antar-OPD juga mendapat penguatan empiris dari (Rahmadini et al., 2024), yang menemukan bahwa rendahnya kinerja keuangan daerah sering kali berakar pada lemahnya perencanaan dan pelaksanaan belanja modal, khususnya pada OPD teknis yang seharusnya berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Fenomena stagnasi PAD pada Dinas Perikanan dan Dinas Pangan di Indragiri Hilir menunjukkan kegagalan dalam mengonversi potensi sektor unggulan menjadi sumber penerimaan daerah yang berkelanjutan, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, (Hotimah & Fattah, 2025) menegaskan bahwa rendahnya tingkat penyerapan belanja modal (*underspending*) umumnya disebabkan oleh permasalahan manajerial, keterlambatan pengadaan, serta lemahnya kapasitas pelaksanaan proyek fisik di tingkat OPD. Akibatnya, belanja daerah lebih terserap pada belanja rutin yang bersifat administratif dibandingkan belanja pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Temuan ini sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana dinas-dinas besar seperti Dinas Pangan (DTPHP), dan Dinas Penanaman modal dan PTSP teknis mencatatkan realisasi belanja modal yang sangat rendah hingga nol rupiah.

Berdasarkan serangkaian fenomena tersebut, yang diperkuat oleh laporan media lokal mengenai kerusakan infrastruktur serta hasil wawancara terkait hambatan administratif di tingkat birokrasi, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan anggaran di Kabupaten Indragiri Hilir mencerminkan permasalahan struktural yang mendalam. Hal ini ditandai dengan dominasi belanja operasi yang tidak produktif, kapasitas fiskal mandiri yang masih rendah akibat ketergantungan pada dana pusat, serta lambatnya penyerapan belanja modal yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi. Kondisi ini memperkuat urgensi untuk melakukan evaluasi mendalam agar kebijakan fiskal daerah di masa depan lebih berorientasi pada pembangunan yang nyata dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini menegaskan bahwa APBD Kabupaten Indragiri Hilir saat ini berada dalam kondisi "Tidak Serasi", di mana ruang fiskal daerah lebih banyak tersedot untuk membiayai kebutuhan birokrasi (*bureaucracy expenditure*) daripada belanja investasi publik (*public investment expenditure*) yang memiliki

efek berganda (*multiplier effect*) bagi kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan struktural yang persisten dan meluas di 14 OPD ini menjadi dasar urgensi yang tak terbantahkan bagi penulis untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul:

“ANALISIS RASIO KESERASIAN BELANJA MODAL DAN OPERASIONAL SERTA RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana tingkat efektivitas dan pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024?
2. Bagaimana tingkat efektivitas, pertumbuhan dan efisiensi realisasi Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024?
3. Bagaimana tingkat keserasian alokasi antara Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024?
4. Bagaimana keselarasan antara capaian realisasi pendapatan dan tingkat penyerapan belanja dalam mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024.
3. Untuk menganalisis tingkat keserasian alokasi antara Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024.
4. Untuk menganalisis keselarasan antara capaian realisasi pendapatan dan tingkat penyerapan belanja dalam mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

1. Menambah literatur mengenai pengukuran kinerja sektor publik, khususnya terkait efektivitas, pertumbuhan pendapatan, dan keserasian belanja daerah.
2. Memberikan pemahaman baru mengenai ketimpangan kinerja keuangan daerah.
3. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pengaruh dana transfer, tren pertumbuhan, dan dampak ketidakseimbangan belanja terhadap pembangunan daerah.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi masukan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menata kembali alokasi belanja agar belanja modal lebih ditingkatkan secara bertahap.
2. Memberikan data pendukung bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, khususnya terkait rendahnya realisasi belanja modal.
3. Membantu OPD mengidentifikasi kelemahan dalam penetapan target pendapatan, mengoptimalkan pertumbuhan PAD, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan belanja modal di masa mendatang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan:

Untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur dan isi penelitian, berikut disajikan uraian singkat masing-masing bab dalam sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu, kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, jenis dan sumber data penelitian, populasi dan Objek Penelitian yang akan digunakan, metode pengumpulan data, operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pengujian hipotesis dan menampilkan hasil dari pengujian hipotesis tersebut, serta pembahasan tentang analisis yang dikaitkan dengan alat uji yang akan digunakan penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan mengenai penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelola organisasi. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen) dalam mengelola sumber daya organisasi. Dalam perspektif ini, manajer berperan sebagai steward yang bertanggung jawab untuk menjalankan amanah pemilik dengan mengedepankan kepentingan organisasi, bukan kepentingan pribadi (Davis & Donaldson, 1991). Prinsip utama teori *stewardship* menekankan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan sumber daya. Manajer diharapkan dapat mengelola aset dan anggaran secara efisien serta memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada pihak terkait. Dalam sektor publik, termasuk pada Pemerintah Daerah, teori ini menggambarkan bahwa aparatur pemerintah bertindak sebagai penatalayan (*steward*) yang mengelola keuangan daerah secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Herni Syahara, Siti Sarah Fauziah, 2024).

Penerapan teori *stewardship* dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup penyusunan laporan keuangan yang transparan, keterbukaan informasi publik, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan kinerja anggaran pemerintah daerah, termasuk efektivitas penggunaan anggaran di Pemerintah Daerah, dapat meningkat guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan demikian, teori *stewardship* memberikan dasar konseptual bahwa pemerintah daerah, Penerapan teori *stewardship* dalam penelitian ini memberikan dasar konseptual bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berperan sebagai pengelola yang dapat dipercaya. Sebagai steward, pemerintah daerah dituntut

untuk bertindak rasional dan bertanggung jawab dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah maupun dalam menjaga keserasian Belanja Daerah, demi tercapainya pelayanan publik yang maksimal dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

2.1.2 Value For Money

Persyaratan baru telah muncul bagi organisasi sektor publik untuk fokus pada nilai uang dalam operasinya. VFM (*Value For Money*) adalah filosofi manajemen untuk organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga komponen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).

Ekonomi didasarkan pada perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga serendah mungkin. Ini melibatkan perbandingan antara *input* (apa yang terjadi) dan nilai *input* (apa yang seharusnya terjadi). Ekonomi berkaitan dengan sejauh mana lembaga sektor publik meminimalkan penggunaan sumber daya dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif (Mardiasmo, 2018).

Efisiensi mengacu pada pencapaian output maksimum dengan serangkaian *input* yang diberikan, atau memanfaatkan *input* minimum untuk mencapai output tertentu, dengan rasio output/*input* yang terkait dengan standar atau tujuan kinerja yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2018).

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian hasil yang direncanakan hanya untuk menetapkan tujuan, dan efektivitas adalah perbandingan hasil dengan output (Mardiasmo, 2018).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Diindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

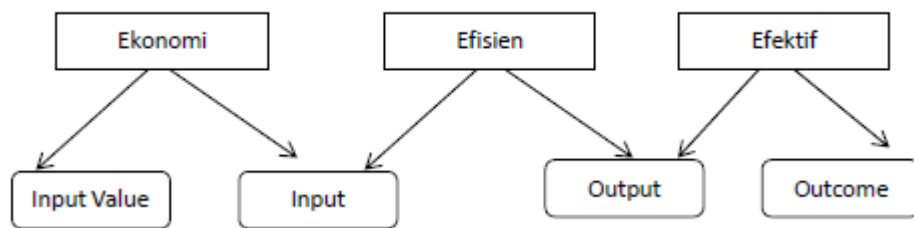
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Stte Isamta University of Sulan Syarif Kasim Riau

Ketiga elemen ini merupakan komponen inti dari VFM (*Value For Money*/Nilai untuk Uang), yang dilengkapi dengan dua elemen tambahan: keadilan dan kesetaraan. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial yang sama untuk mengakses layanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, harus ada distribusi yang adil (kesetaraan). Penggunaan dana publik tidak boleh terkonsentrasi hanya pada kelompok tertentu, tetapi harus didistribusikan secara merata.

Gambar 2.1: Value For Money Secara Skematis



Sumber: (Mardiasmo, 2018).

2.2 Definisi Kinerja

Kinerja (*performance*) merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau suatu lembaga dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut (Mahmudi, 2019), kinerja sektor publik adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Dengan demikian, kinerja bukan hanya hasil akhir, tetapi juga mencakup proses bagaimana suatu organisasi menggunakan sumber dayanya secara efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi pemerintahan, kinerja berhubungan erat dengan kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya

publik agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu:

1. Efektivitas, yaitu sejauh mana hasil kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
2. Efisiensi, yaitu perbandingan antara output dengan *input* yang digunakan.
3. Akuntabilitas, yaitu sejauh mana kegiatan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

(Habibi et al., 2024) menegaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan cerminan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kinerja yang baik menunjukkan adanya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (*outcome based budgeting*).

Menurut, (Sedarmayanti, 2019) menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil dari usaha individu atau tim dalam suatu organisasi, baik dalam aspek kuantitatif maupun kualitatif, berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya untuk meraih sasaran organisasi dengan cara yang sah, tidak melanggar hukum, serta sesuai dengan norma dan etika.

Sedangkan menurut (Rahmasari, 2021), kinerja pemerintah daerah dari perspektif keuangan adalah kemampuan daerah untuk mencapai tujuan keuangan melalui indikator-indikator seperti kemandirian, efektivitas, dan efisiensi keuangan serta keserasian dan pengelolaan belanja. Dalam penelitian (Khairudin et al., 2020), kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rasio-rasio

seperti efektivitas, efisiensi, kemandirian keuangan, dan pertumbuhan keuangan daerah, yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan (N. Fadhila & Tanjung, 2022), pendekatan *Value For Money* digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, mencakup aspek ekonomis, efektivitas, dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga bukan hanya tingkat realisasi output tapi juga penggunaan *input* yang optimal.

Dari penjelasan di atas, pendapat para ahli sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja dalam penelitian ini merupakan tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir dalam menjalankan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Daerah (APBD) selaras dengan sasaran yang telah ditentukan. Kinerja tidak hanya menonjolkan luaran akhir (output), namun juga meliputi metode pengelolaan sumber daya moneter secara efisien dan seimbang. Dalam kerangka penelitian ini, kinerja keuangan daerah yang unggul ditampilkan oleh kapasitas pemerintah daerah dalam: terfokus pada sasaran pendapatan daerah secara optimal (Efektivitas Penerimaan); Mewujudkan perencanaan pengeluaran sesuai sasaran (Efektivitas Pengeluaran); serta Menyelaraskan Anggaran antara pengeluaran operasional dan pengeluaran modal guna menyokong pembangunan prasarana umum (Keserasian Pengeluaran).

2.2.1 Definisi Indikator Kinerja

Indikator kinerja (sering disebut *Key Performance Indicators* atau KPI) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang dipilih secara selektif untuk menggambarkan sejauh mana suatu organisasi, unit, program, atau proses mencapai tujuan strategis dan operasionalnya. KPI berfungsi sebagai “sinyal”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memfokuskan perhatian manajemen pada aspek-aspek kunci yang menentukan keberhasilan; dengan kata lain, KPI bukan sekadar data tetapi metrik yang dipilih karena keterkaitannya yang langsung dengan tujuan strategis dan kebijakan organisasi. Dalam ranah pelayanan publik dan kesehatan, literatur terbaru menegaskan bahwa KPI harus terdefinisi jelas, terukur, dapat ditindak lanjuti, dan selaras dengan misi organisasi agar menjadi alat evaluasi yang bermakna bagi pengambilan keputusan (Langarizadeh et al., 2024).

Indikator kinerja merupakan variabel atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu organisasi, unit kerja, atau individu berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini biasanya bersifat operasional, yakni memiliki satuan, target, serta metode pengukuran yang jelas, sehingga dapat dijadikan tolok ukur dalam evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan organisasi. (Mahmudi, 2019) menjelaskan bahwa indikator kinerja publik harus mencakup lima aspek utama: *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, dan *impact*. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang membantu manajemen untuk menilai efektivitas pelaksanaan program.

Menurut (Parmenter, 2019) dalam bukunya *Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs*, indikator kinerja (atau KPI) adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dirancang untuk menilai pencapaian strategi organisasi dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Parmenter menyatakan bahwa KPI yang efektif harus *actionable*, relevan terhadap sasaran strategis, dan memberikan informasi yang memberi arah bagi manajemen.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Dalam ranah sektor publik, jurnal Musyari (Taruni & Diatmika, 2025) menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi realisasi program dan kegiatan pemerintah daerah, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. IKU tersebut menjadi instrumen penting agar pengukuran kinerja publik tidak hanya fokus pada realisasi anggaran, tetapi juga pada capaian hasil kebijakan. Selain itu, penelitian “Analisis Kinerja Organisasi dengan Pendekatan *Balanced Scorecard*” (Natalia Melantika et al., 2023) menggunakan indikator yang mencakup perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran & pertumbuhan untuk mengukur kinerja organisasi publik (kantor desa) secara komprehensif.

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja adalah merupakan alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai sejauh mana tujuan organisasi telah tercapai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. KPI tidak hanya berfungsi sebagai data statistik, tetapi sebagai instrumen manajerial yang membantu mengarahkan perhatian pada aspek-aspek kunci keberhasilan organisasi. Dalam ranah sektor publik, indikator kinerja memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah. Indikator yang baik harus terdefinisi jelas, terukur, relevan dengan tujuan strategis, dapat ditindaklanjuti, dan mencakup aspek *input*, *output*, *outcome*, *benefit*, serta *impact*. Dengan demikian, KPI menjadi alat evaluasi dan pengambilan keputusan yang esensial dalam meningkatkan kinerja organisasi baik di sektor publik maupun swasta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses menetapkan indikator, mengumpulkan data, mengevaluasi capaian, dan membandingkan dengan target yang sudah ditetapkan. Dalam buku Manajemen Kinerja (Dr. Wehelmina Rumawas, S.Sos, 2021), proses pengukuran meliputi lima tahap: penetapan tujuan, definisi indikator, penetapan target, pengukuran pelaksanaan, dan evaluasi/umpan balik.

(Mahmudi, 2019) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dalam sektor publik merupakan proses pengumpulan dan analisis data untuk menilai sejauh mana program, kegiatan, dan kebijakan telah dijalankan secara efisien dan efektif dalam mencapai sasaran strategis instansi pemerintah. Informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan serta pengambilan keputusan pada periode selanjutnya.

(Mardiasmo, 2018) menegaskan bahwa pengukuran kinerja di sektor publik berperan sebagai mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian *Value For Money*, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran kinerja harus dapat menunjukkan hubungan yang jelas antara *input* (sumber daya), *output* (hasil kegiatan), dan *outcome* (manfaat atau dampak yang diperoleh masyarakat).

Menurut (Purwoko, E ; Wibowo, A; Sari, 2023) pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat komunikasi antara manajemen dan pelaksana operasional, di mana hasil pengukuran memberikan umpan balik bagi proses perencanaan dan pengendalian. Dengan demikian, pengukuran kinerja memungkinkan organisasi

untuk melakukan penyesuaian strategi secara berkelanjutan berdasarkan data yang objektif.

Penelitian terbaru oleh dalam (Barus & Djamhuri, 2024) *Measurement of Government Performance in Literature Review* menunjukkan bahwa pengukuran kinerja di sektor publik mengalami pergeseran dari pendekatan tradisional berbasis output menuju pendekatan *integratif* berbasis . Artinya, keberhasilan organisasi tidak hanya diukur dari volume kegiatan yang diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan.

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut (Gibson, J. L.; Ivancevich, J. M.; Donnelly, J. H., 2020) kinerja individu dalam organisasi dipengaruhi oleh tiga kelompok faktor utama, yaitu faktor individu, faktor organisasi, dan faktor psikologis. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dalam menentukan sejauh mana seseorang mampu menampilkan hasil kerja sesuai dengan harapan organisasi.

1. Faktor Individu, meliputi kemampuan (*ability*), keterampilan (*skill*), latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan kondisi fisik seseorang. Semakin tinggi tingkat kompetensi dan kemampuan teknis seseorang, semakin besar pula peluangnya untuk mencapai kinerja optimal.
2. Faktor Organisasi, mencakup kepemimpinan, struktur organisasi, sistem penghargaan, budaya kerja, dan dukungan sumber daya. Faktor ini mempengaruhi lingkungan kerja yang pada akhirnya berdampak terhadap motivasi dan produktivitas pegawai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Faktor Psikologis, meliputi persepsi, sikap, motivasi, kepribadian, dan tingkat kepuasan kerja. Kondisi psikologis yang positif dapat meningkatkan semangat kerja dan loyalitas terhadap organisasi.

Menurut (Mangkunegara, 2017) faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pegawai juga dapat dikategorikan menjadi dua dimensi besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal berasal dari dalam diri individu, seperti kemampuan, disiplin, motivasi, dan tanggung jawab kerja.
2. Faktor eksternal berasal dari luar individu, seperti lingkungan kerja, kebijakan organisasi, sistem kompensasi, serta gaya kepemimpinan.

Menurut (Mahmudi, 2019), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah dapat dijelaskan dalam enam kelompok pengukuran, yaitu:

1. *Input*, berupa sumber daya yang digunakan dalam kegiatan.
2. *Process*, yakni cara pelaksanaan kegiatan.
3. *Output*, hasil langsung dari proses kerja.
4. *Outcome*, dampak jangka menengah dari hasil yang dicapai.
5. *Benefit*, manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan organisasi.
6. *Impact*, pengaruh jangka panjang terhadap masyarakat dan pembangunan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.3.1 Pengertian Anggaran

Anggaran secara umum adalah suatu rencana keuangan yang dinyatakan dalam satuan moneter dan mencerminkan pilihan kebijakan organisasi atau pemerintah dalam periode tertentu. Dalam ranah pemerintah daerah, anggaran menjadi kerangka pengaturan penerimaan dan pengeluaran yang disusun secara sistematis dan formal, dengan jangka waktu biasanya satu tahun (1 Januari–31 Desember). Anggaran pada hakikatnya adalah suatu rencana keuangan yang dinyatakan dalam satuan moneter (atau kuantitatif), untuk periode waktu tertentu, yang mencerminkan pilihan kebijakan organisasi atau pemerintahan dalam mengalokasikan sumber daya, menetapkan prioritas, dan mengendalikan aktivitas baik untuk kegiatan rutin maupun pembangunan masa depan. Sebagai dokumen resmi, anggaran menyatukan proyeksi penerimaan dan pengeluaran (serta pembiayaan jika relevan) yang disusun sebelum periode anggaran berjalan, sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan dan pengukuran kinerja. Menurut dokumen resmi, Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017 menyebut bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah (Azahari, 2017).”

2.3.2 Dasar dan Fungsi Anggaran

Dasar penyusunan anggaran publik/daerah mencakup komponen legal, strategis dan teknis. Secara legal, anggaran daerah harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Pemerintahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 1) Fungsi Perencanaan (*Planning*): Anggaran berfungsi sebagai alat untuk menetapkan program, kegiatan, alokasi sumber daya, serta prioritas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan daerah dalam periode anggaran yang bersangkutan. Sebagai rencana, anggaran menetapkan kerangka kerja keuangan dan operasional pemerintah daerah.

- 2) Fungsi Otorisasi / Legitimasi (*Authorization*): Anggaran memberikan otorisasi legal bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran. Karena itu, anggaran yang ditetapkan melalui Perda menjadi dasar bagi pelaksanaan keuangan daerah.
- 3) Fungsi Pengendalian (*Control / Monitoring*): Anggaran menjadi tolak ukur atau *benchmark* untuk mengevaluasi realisasi penerimaan dan belanja dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Dengan demikian, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian agar pelaksanaan keuangan sesuai dengan rencana.
- 4) Fungsi Alokasi (*Allocation*): Anggaran berperan dalam mengalokasikan sumber daya publik secara optimal ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Fungsi ini penting agar dana publik digunakan secara efisien dan efektif.
- 5) Fungsi Distribusi (*Distribution / Redistribusi*): Fungsi ini terkait dengan bagaimana anggaran membantu pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga tercapai pemerataan, keadilan sosial, dan pengurangan ketidaksamaan.
- 6) Fungsi Stabilisasi (*Stabilization*): Anggaran berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah misalnya dengan mengatur penerimaan dan belanja agar tidak terjadi defisit besar atau kondisi fiskal yang tidak sehat. Meski fungsi

2.3.3 Laporan Perhitungan Anggaran

Laporan Perhitungan Anggaran dalam ranah pemerintahan daerah biasanya mengacu pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu laporan keuangan yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi penerimaan serta pengeluaran dalam suatu periode pelaporan. LRA menunjukkan seberapa jauh anggaran yang direncanakan telah direalisasikan dan berfungsi sebagai alat utama pertanggungjawaban fiskal di pemerintahan (Komite SAP, 2021). Fungsi dan tujuan LRA / Laporan Perhitungan Anggaran.

- a. Akuntabilitas & Transparansi: LRA memberikan informasi kepada publik, legislatif, dan auditor tentang bagaimana anggaran digunakan.
- b. Alat Pengendalian Anggaran: Membandingkan *budget* dan *actual* untuk mendeteksi penyimpangan serta sebagai dasar pengendalian internal.
- c. Dasar Analisis Kinerja Fiskal: Informasi LRA dipakai untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan keserasian belanja daerah (misalnya rasio penyerapan belanja operasi dan belanja modal).

stabilisasi lebih sering dibahas di tingkat negara (APBN), daerah juga diharapkan mengelola anggaran agar keseimbangan fiskal terjaga.

- 7) Fungsi Akuntabilitas dan Transparansi (*Accountability / Transparency*): Dalam literatur keuangan publik, anggaran mulai dilihat sebagai alat akuntabilitas public yaitu agar masyarakat dan stakeholder dapat memantau penggunaan dana daerah. Penelitian menunjukkan bahwa fungsi anggaran DPRD sebagai lembaga legislatif termasuk dalam tugas pengawasan penggunaan anggaran daerah (Abidin, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Sumber Informasi untuk Laporan Keuangan Lengkap (LKPD): LRA merupakan salah satu komponen utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang meliputi neraca, laporan operasional, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (F. Putri, 2023).

LRA umumnya menyajikan:

- a) Pendapatan: pengelompokan menurut jenis (PAD, transfer, lain-lain) dan realisasinya.
- b) Belanja: klasifikasi menurut jenis (belanja pegawai, barang/jasa, modal) dan realisasinya. Surplus/Defisit anggaran dan pembiayaan (penerimaan/pengeluaran pembiayaan).
- c) Rincian per-unit/organisasi dan per-fungsi (apabila disajikan). Informasi ini dapat disajikan secara kumulatif (sampai periode pelaporan) dan dibandingkan dengan anggaran (Komite SAP, 2021)

2.3.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memuat estimasi seluruh penerimaan daerah, pengeluaran (belanja) daerah, serta pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran, yang dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen APBD berfungsi sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan daerah: untuk mengalokasikan sumber daya, mengarahkan program dan kegiatan pembangunan, memberi pedoman bagi belanja pemerintah daerah, dan sebagai alat pengendalian fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah. Secara lebih rinci, APBD memiliki karakteristik penting sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Berlaku untuk satu tahun anggaran penuh (1 Jan s.d. 31 Desember).
2. Memuat tiga komponen utama: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
3. Disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas publik: transparansi, efisiensi, efektivitas, keadilan fiskal.
4. Jadi, melalui APBD, pemerintah daerah merumuskan kebijakan fiskal daerah (pendapatan, pengeluaran) yang selaras dengan visi/misi pembangunan daerah dan kewenangan desentralisasi.

Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang menjadi landasan dalam menjalankan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah dikenal sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten dan kota. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sejatinya adalah salah satu alat kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi serta sumber kekayaan daerah (UU RI No.15 Tahun 2013).

Ruang lingkup anggaran menjadi signifikan dan krusial dalam konteks pemerintahan lokal. Ini berkaitan dengan pengaruh anggaran terhadap kinerja pemerintah, yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam menyediakan layanan kepada masyarakat. Anggaran publik pemerintah daerah dalam APBD adalah hasil dari pengalokasian sumber daya. Berdasarkan Halim (2008:15),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan sebuah anggaran yang mengandung elemen-elemen berikut:

1. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
3. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Berdasarkan undang-undang no.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 14 dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, “APBD adalah landasan pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember”. Berdasarkan Permendagri nomor 21 tahun 2011 pasal 1 ayat 9, anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dikenal sebagai APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui secara bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta ditetapkan melalui peraturan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang biasa dikenal dengan APBD, adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah yang mencakup beberapa elemen, seperti rencana kegiatan di daerah tersebut beserta rincian lengkapnya, sumber pendapatan, serta biaya-biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi batas maksimum pengeluaran yang akan dilakukan. APBD itu bertujuan sebagai dasar untuk melaksanakan pelayanan publik. Dalam penyusunannya, APBD dibicarakan dan disepakati secara bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah (Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak Henrikus Herdi, SE., 2022).

1. **Penilaian Kinerja Keuangan APBD:** Kinerja keuangan adalah hasil yang bisa diperoleh dari anggaran yang sudah disusun oleh daerah dengan membandingkan hasil nyata dengan tujuan yang sudah dianggarkan, baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran. Ini bertujuan agar bisa diketahui seberapa efektif dan efisien penggunaan anggaran berdasarkan standar penilaian yang sudah ditentukan. Analisis kinerja keuangan dilakukan dengan melihat perbedaan antara hasil nyata dengan anggaran yang direncanakan (Mardiasmo, 2018).

2. **Analisis Rasio Pertumbuhan:** Rasio ini menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan memahami pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, rasio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi area potensial mana yang membutuhkan perhatian (Tumija, Hakiki Doni & Agustina, 2023). Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk menilai area potensial yang membutuhkan perhatian. Nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Pengeluaran Modal yang lebih tinggi, disertai dengan Pengeluaran Operasional yang lebih rendah, menunjukkan pertumbuhan positif. Ini berarti bahwa daerah tersebut telah berhasil mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari satu periode ke periode berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebaliknya, jika nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasional tinggi sementara Belanja Modal rendah, pertumbuhannya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhannya. Pemangku kepentingan yang tertarik pada analisis rasio keuangan laporan keuangan pemerintah daerah meliputi (Tumija, Hakiki Doni & Agustina, 2023):

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan masyarakat daerah.
- 2) Pemerintah eksekutif sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikutnya.
- 3) Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan untuk mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 4) Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan memiliki kepentingan di pemerintah daerah, bersedia memberikan pinjaman atau membeli obligasi.
3. Analisis Efisiensi: Efisiensi mengacu pada keterkaitan antara produk dan layanan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan sumber daya yang dimanfaatkan. Sebuah organisasi, program, atau aktivitas dapat disebut efisien jika mampu menghasilkan jumlah tertentu dengan memanfaatkan sedikit sumber daya, atau juga mampu menghasilkan sebanyak mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah rasio antara *input* dan output yang dihasilkan. Efisiensi adalah suatu ukuran untuk mengevaluasi apakah pemakaian dan layanan yang diambil oleh lembaga pemerintah dapat mencapai sasaran dan memberikan keuntungan tertentu. Efisiensi dapat juga diartikan sebagai:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Efisiensi di bidang hasil dijelaskan melalui konsep pengeluaran dan pendapatan (*input-output*).
- b. Efisiensi dalam pelayanan publik berarti melakukan pekerjaan dengan mengeluarkan biaya yang paling sedikit. Jadi, pekerjaan dianggap efisien jika bisa selesai dengan biaya yang rendah dan hasil yang diinginkan tercapai.
- c. Untuk mencapai efisiensi dalam pemerintahan daerah, penting untuk memperhatikan bagaimana instansi pemerintah saling berhubungan dan bekerja sama, serta memanfaatkan potensi dan keberagaman yang ada di daerah tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi adalah:

- a. Teknologi yang digunakan saat melaksanakan pekerjaan.
- b. Struktur organisasi, yaitu susunan yang jelas dari berbagai posisi, baik yang bersifat struktural maupun fungsional.
- c. Sumber daya manusia, seperti tenaga kerja dan kemampuan individu, serta sumber daya fisik seperti alat kerja, tempat kerja, dan dana.
- d. Dukungan untuk aparat dan pelaksana, dari pimpinan maupun masyarakat.
- e. Pimpinan di sini merujuk pada kemampuan untuk mengintegrasikan keempat faktor tersebut sebelumnya ke dalam suatu usaha yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efisiennya pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek dengan membandingkan hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan. Analisis ini juga mengkaji kinerja keuangan daerah dengan menyertakan ukuran efisiensi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu rasio antara pengeluaran rutin yang nyata dengan total pendapatan daerah yang nyata, kemudian dikalikan seratus untuk memperoleh persentasenya (Armono & Widiyaningsih, 2023).

4. Analisis Efektivitas: Efektivitas adalah ukuran seberapa baik kebutuhan atau tujuan dari suatu proses terpenuhi. Jika suatu proses berhasil mencapai tujuannya dengan baik, maka bisa dibilang proses itu efektif. Efektivitas berarti berhasil atau sesuai dengan fungsi. Kata dasar dari efektif adalah efektif, dan bentuk kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Dalam konteks pemerintahan daerah, efektivitas bisa diartikan sebagai penyelesaian tugas dengan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang ada. Ini juga berarti bisa mencapai tujuan yang telah direncanakan. Namun, jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan tetapi hasilnya memberikan keuntungan bagi kelompok yang dituju, maka kegiatan itu tetap bisa dikatakan efektif. Semakin banyak pengeluaran yang berkontribusi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, semakin efektif proses kerja unit tersebut (Halim, A.; Kusufi, 2020).

a. Efektivitas pendapatan adalah perbandingan antara pendapatan yang diharapkan dan pendapatan yang sebenarnya diperoleh. Keefektifan ini bertujuan untuk menilai seberapa baik pemerintah dalam menetapkan target pendapatan serta merealisasikan anggaran yang telah direncanakan. Mengukur keefektifan pendapatan juga bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengambilan keputusan saat merencanakan strategi untuk meningkatkan pendapatan. Efektivitas pendapatan juga mencerminkan seberapa baik transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (Rinaldi Rinaldi et al., 2024).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Efektivitas belanja perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan anggaran yang telah digunakan. Tujuan dari efisiensi ini adalah untuk mengetahui seberapa baik pemerintah menetapkan sasaran pengeluaran dan seberapa efektif mereka mengelola anggaran yang tersedia. Menilai efektivitas pengeluaran juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Ini adalah tahap krusial dalam pengambilan keputusan, terutama untuk menilai seberapa efisien penggunaan anggaran. Dalam konteks ini, menghitung efektivitas pendapatan dan pengeluaran membantu kita memahami seberapa baik sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan bertanggung jawab (Mahmudi, 2019).

2.4 Pendapatan Daerah

Dari sudut pandang hukum dan fiskal, pendapatan daerah dipahami sebagai semua penerimaan moneter yang disetorkan ke kas negara daerah, yang meningkatkan ekuitas dana yang tersedia dan mewakili hak pemerintah daerah dalam satu tahun fiskal, tanpa kewajiban untuk pengembalian oleh daerah tersebut. Bertindak sebagai alat penting dalam desentralisasi, pendapatan daerah memainkan peran vital dalam membentuk kemampuan administrasi daerah untuk melaksanakan otonomi yang tulus dan akuntabel, yang bertujuan untuk meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, jumlah yang diterima dan keunggulan dalam pengelolaan pendapatan daerah berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai kinerja keuangan dan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah (Ridwan, & Nawir, 2021).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara struktural, pendapatan daerah dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu Pendapatan Daerah dari Sumber Sendiri (PAD), Dana Penyeimbang, dan pendapatan daerah sah lainnya. PAD menunjukkan kompetensi suatu wilayah dalam memanfaatkan kemampuan fiskal internalnya sendiri, sejalan dengan potensi regionalnya sebagai manifestasi desentralisasi (Wulandari et al., 2025). Sementara itu, Dana Penyeimbang dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan kapasitas keuangan antar wilayah (ketidakseimbangan horizontal) dan antara pemerintah pusat dan daerah (ketidakseimbangan vertikal) untuk melaksanakan desentralisasi. Komposisi kedua sumber ini berdampak pada tingkat otonomi fiskal; porsi PAD yang lebih besar dibandingkan dengan dana transfer menandakan tingkat kemandirian keuangan lokal yang lebih besar dan ketergantungan yang lebih rendah pada pemerintah pusat (L. S. Fadhila et al., 2025).

Pendapatan daerah berasal dari pajak daerah, pungutan daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang terpisah, dan pendapatan daerah sendiri lainnya yang sah (Wulandari et al., 2025). Pertumbuhan pendapatan daerah sendiri berkorelasi positif dengan kemandirian keuangan daerah; pemerintah daerah yang dapat memaksimalkan potensi pendapatannya akan memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan daerahnya (L. S. Fadhila et al., 2025). Inisiatif peningkatan ini tidak hanya bergantung pada intensifikasi dan perluasan pengumpulan pajak dan pungutan tetapi juga pada peningkatan pengelolaan aset daerah dan optimalisasi kinerja usaha milik daerah sehingga mereka memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah (Nurnila Sari, Fahrudin Zain Ollingo, Ivan Rahmat Santoso, Herwin Mopangga, 2025). Pendapatan daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memadai dan dikelola secara efektif merupakan prasyarat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (L. S. Fadhila et al., 2025). Namun, akumulasi pendapatan yang tinggi tidak secara otomatis menjamin kemakmuran kecuali disertai dengan alokasi pengeluaran yang efisien dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ekonomi publik, pendapatan daerah lebih dari sekadar target fiskal; ini adalah alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi (Ridwan, & Nawir, 2021).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan uang yang masuk ke kas daerah yang diakui sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan menambah ekuitas dana tanpa kewajiban untuk dikembalikan. Pendapatan daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, dan pendapatan sah lainnya, berfungsi sebagai indikator utama kemandirian fiskal dan instrumen vital dalam pelaksanaan otonomi daerah guna membiayai pembangunan, pelayanan publik, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Belanja Daerah

Berdasarkan Bastian (2006), pengeluaran daerah merupakan perkiraan biaya yang ditetapkan secara adil agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati tanpa adanya perlakuan yang berbeda, khususnya dalam layanan publik. Berdasarkan PSAP No.2 Paragraf 7, pengeluaran didefinisikan sebagai "semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

anggaran lebih dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, dan tidak akan dikembalikan oleh pemerintah." Sementara itu, berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diperbarui dengan Permendagri no.59 tahun 2007 dan perubahan kedua melalui peraturan Menteri Dalam Negeri no. 21 tahun 2011, belanja daerah dianggap sebagai kewajiban pemerintah daerah yang dapat mengurangi aset bersih. Dalam laporan pelaksanaan anggaran, istilah pengeluaran muncul karena laporan itu disusun dengan basis kas. Belanja dikelompokkan menjadi beberapa kategori, tergantung pada jenis belanja, organisasi, dan fungsinya. Klasifikasi ekonomi merupakan pengelompokan biaya yang didasarkan pada jenis pengeluaran untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi pengeluaran juga diatur dalam peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintah untuk tujuan laporan keuangan menjadi:

Belanja Operasi merupakan biaya anggaran untuk aktivitas harian pemerintah pusat/daerah yang memberikan keuntungan jangka pendek. Belanja operasional mencakup:

- a. Belanja pegawai,
- b. Belanja barang,
- c. Bunga,
- d. Subsidi,
- e. Hibah,
- f. Bantuan sosial.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap fisik yang memberikan manfaat selama lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam pengeluaran modal adalah sebesar harga beli/konstruksi aset ditambah semua pengeluaran yang berhubungan dengan pengadaan/pembangunan aset hingga aset itu siap dipakai. Belanja modal meliputi:

- a. Belanja modal tanah,
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin,
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan,
 - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya,
 - f. Belanja aset lainnya (aset tak berwujud).
2. Belanja lain-lain atau belanja yang tidak terduga adalah alokasi dana untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi lagi, seperti penanganan bencana alam, bencana sosial, serta pengeluaran mendesak lain yang sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat maupun.
3. Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi kepada entitas pelaporan yang lebih rendah, seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke Kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari Kabupaten/kota ke desa.

Belanja daerah adalah semua jenis pengeluaran yang berasal dari kas umum daerah, yang mengakibatkan penurunan ekuitas dana daerah. Pengeluaran ini adalah kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan hak untuk menerima kembali pembayaran dari pihak lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, pengeluaran daerah dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung. Belanja langsung merupakan jenis pengeluaran yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Komponen pengeluaran langsung meliputi:

- a. belanja pegawai,
- b. belanja barang dan jasa, dan
- c. belanja modal.

Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Jenis belanja ini terdiri atas:

- a. belanja pegawai,
- b. belanja bunga,
- c. belanja subsidi,
- d. belanja hibah,
- e. belanja bantuan sosial, serta
- f. belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah desa.

Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak Henrikus Herdi, SE., 2022).

Belanja daerah merupakan seluruh bentuk pengeluaran yang bersumber dari rekening kas umum daerah, yang menyebabkan berkurangnya ekuitas dana daerah. Pengeluaran tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak menimbulkan hak untuk menerima kembali pembayaran dari pihak lain. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung (Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak Henrikus Herdi, SE., 2022).

Belanja langsung adalah jenis pengeluaran yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Komponen belanja langsung mencakup:

- a. belanja pegawai,
- b. belanja barang dan jasa, dan
- c. belanja modal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang tidak berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Jenis belanja ini terdiri atas:

- a. belanja pegawai,
- b. belanja bunga,
- c. belanja subsidi,
- d. belanja hibah,
- e. belanja bantuan sosial, serta
- f. belanja bagi hasil kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, maupun pemerintah desa.

Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dijelaskan bahwa belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana perimbangan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan kebutuhan belanja daerah. Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pemerintah daerah memiliki peranan strategis dalam penyediaan layanan publik. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa kebutuhan dan permintaan terhadap layanan publik cenderung berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena kedekatannya dengan masyarakat, pemerintah daerah dianggap paling mengetahui kondisi dan

kebutuhan spesifik masyarakat di wilayahnya, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran (Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak Henrikus Herdi, SE., 2022).

Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah penentuan pendelegasian tanggung jawab atas penyediaan layanan publik dan fungsi belanja antar tingkatan pemerintahan. Secara teoritis, terdapat dua pendekatan utama dalam menentukan pembagian fungsi tersebut, yaitu pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*) dan pendekatan pendapatan (*revenue approach*). Pendekatan pengeluaran menekankan bahwa pembagian kewenangan antar tingkat pemerintahan harus dirancang agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Pendelegasian fungsi dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah kriteria objektif, seperti tingkat lokalitas dampak suatu fungsi, kebutuhan keseragaman kebijakan dan penyelenggaraan, kemampuan teknis dan manajerial, efisiensi, serta skala ekonomi yang dapat dicapai (Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak Henrikus Herdi, SE., 2022).

Sementara itu, pendekatan pendapatan menitikberatkan pada pembagian sumber pendapatan publik antar tingkat pemerintahan, yang pada praktiknya seringkali merupakan hasil dari proses politik dan negosiasi antar lembaga. Dinamika politik yang terjadi akan memengaruhi bagaimana sumber-sumber keuangan dialokasikan. Meskipun kedua pendekatan tersebut sama-sama relevan, dalam implementasinya kemampuan fiskal dan kapasitas daerah menjadi faktor utama yang menentukan sejauh mana pendelegasian fungsi belanja dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan secara optimal (Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak Henrikus Herdi, SE., 2022).

2.6 Realisasi

Pada tingkat pemerintah lokal, pencapaian anggaran adalah ukuran penting yang menunjukkan seberapa baik rencana keuangan (anggaran) telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam waktu yang ditentukan . Pencapaian ini mencakup tiga bagian utama, yaitu penerimaan daerah (pendapatan), pengeluaran daerah (belanja), dan pembiayaan daerah. Analisis pencapaian anggaran menjadi alat yang penting untuk menilai seberapa baik program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien oleh pemerintah daerah.

Menurut (Mahmudi, 2019) dalam bukunya tentang Akuntansi Sektor Publik, pencapaian anggaran adalah langkah pelaksanaan dari proses anggaran yang membandingkan antara angka yang direncanakan (anggaran) dengan hasil yang sebenarnya (aktual) untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa penyajian laporan pencapaian anggaran berfungsi untuk menunjukkan seberapa baik target anggaran tercapai dalam periode tertentu. Hal yang sama juga dinyatakan oleh (Halim, A.; Kusufi, 2020), yang menyebutkan bahwa pencapaian anggaran adalah bentuk nyata dari pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah yang mencerminkan seberapa besar rencana keuangan dapat dicapai dalam satu tahun anggaran yang berjalan.

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa Laporan Pencapaian Anggaran disusun untuk memberikan informasi tentang pencapaian pendapatan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan jika dibandingkan dengan anggarannya dalam periode pelaporan yang sama. Oleh karena itu, laporan ini bertindak sebagai sarana untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap anggaran serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Penelitian terbaru juga menunjukkan pentingnya pencapaian anggaran dalam mengukur kinerja keuangan daerah. Studi oleh (Rivatul et al., 2024) dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah mengatakan bahwa pencapaian anggaran yang tinggi mencerminkan Efektivitas dari penerapan program pembangunan daerah, sementara rendahnya tingkat pencapaian dapat menunjukkan adanya masalah dalam pengelolaan, perencanaan yang tidak sesuai harapan, atau kurangnya kemampuan dalam menjalankan program. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Armono & Widiyaningsih, 2023) dalam jurnal yang membahas ekonomi, manajemen, dan akuntansi (JEMA) yang mengungkapkan bahwa presisi anggaran memiliki hubungan yang baik dengan kinerja keuangan daerah dan tanggung jawab publik.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran adalah alat utama untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah menjalankan rencana keuangannya dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Analisis tentang pelaksanaan ini menjadi sangat penting untuk menilai kinerja keuangan, menemukan adanya penyimpangan anggaran, dan merencanakan kebijakan perbaikan untuk periode yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.6.1 Laporan Realisasi Anggaran Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen keuangan yang menyajikan ringkasan penerimaan, pengeluaran, transfer, pembiayaan dan komponen-lain, serta membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan untuk satu periode pelaporan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010).

Penelitian terkini oleh (Gurhanawan, 2023) menunjukkan bahwa di lingkungan pemerintahan daerah, LRA menjadi alat penting dalam menganalisis kinerja keuangan, melalui varians belanja, rasio efisiensi, dan tingkat ekonomis belanja. Laporan ini menggambarkan keseimbangan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya menunjukkan apakah pemerintah daerah telah melaksanakan anggarannya sesuai rencana, mematuhi perundang-undangan, dan menggunakan sumber daya secara efisien serta efektif (Bafagehi et al., 2023). Dengan demikian, melalui LRA dapat diperoleh informasi bagi pengguna laporan mengenai:

- a) Penyediaan data tentang sumber, distribusi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi; dan
- b) Penyajian data mengenai pelaksanaan anggaran secara lengkap yang bermanfaat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dengan demikian, LRA tidak hanya sekadar laporan administratif; ia merupakan alat strategis bagi pemerintah daerah untuk mengkomunikasikan kepada publik dan pemangku kepentingan tentang seberapa baik anggaran telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan, bagaimana alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi telah terjadi, dan apakah hasil pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana dalam dokumen anggaran. Melalui laporan ini pula para pengguna (legislatif, masyarakat, auditor) mendapatkan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan, baik dari sisi efisiensi (pembelanjaan hemat) maupun efektivitas (pencapaian target) dari belanja publik. Secara operasional, penyusunan LRA harus dilakukan dengan basis kas (transaksi diterima atau dibayar), sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan penyebab deviasi anggaran, kebijakan fiskal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, serta pos-pos yang belum terealisasi. Dengan demikian, laporan ini merupakan dasar penting dalam proses pengambilan keputusan keuangan tahun berikutnya dan evaluasi kebijakan anggaran daerah.

2.7 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mencapai target pendapatan dan mengelola pengeluaran sesuai yang sudah direncanakan. Rasio ini menilai sejauh mana anggaran yang dirancang berhasil membuktikan bahwa pemerintah daerah sukses dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan (Halim, A.; Kusufi, 2020).

Menurut (Mahmudi, 2019), efektivitas menunjukkan hubungan antara hasil yang dihasilkan dan tujuan yang ingin dicapai. Jika hasil yang diperoleh sesuai atau bahkan lebih baik dari target yang ditetapkan, maka kinerja pemerintah daerah dianggap baik. Namun, jika hasilnya jauh di bawah target, maka pelaksanaan program dianggap kurang efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1: Kriteria Kinerja Keuangan Efektifitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri, 2023 (Amua, Agung Prasetyo, Niswatinb, 2023).

Untuk kriteria Efektifitas Anggaran Pendapatan sama dengan bagaimana melihat kriteria efektifitas anggaran belanja yaitu dengan mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diatas 100%, maka kriterianya sangat efektif.
- 2) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diantara 90% - 100%, maka kriterianya efektif.
- 3) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diantara 80% - 90%, maka kriterianya cukup efektif.
- 4) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diantara 70% - 80%, maka kriterianya kurang efektif.
- 5) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada dibawah 60%, maka kriterianya tidak efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memobilisasi sumber daya keuangan dengan baik serta melaksanakan program pembangunan sesuai rencana. Sebaliknya, jika rasio efektivitas rendah, hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap strategi penganggaran dan pelaksanaannya.

Penelitian oleh (Sahrudin, 2022) dalam Jurnal Cakrawala Ilmiah menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 102,72%, ini merupakan bukti bahwa mereka sangat berhasil dalam mencapai target yang ditentukan. Temuan ini menegaskan bahwa tingkat efektivitas yang tinggi menunjukkan adanya perencanaan dan pelaksanaan APBD yang baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio efektivitas keuangan daerah adalah (Armono & Widiyaningsih, 2023) :

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2: Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kategori	Predikat
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	< 60%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, terdapat beberapa kriteria efektifitas anggaran belanja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diatas 100%, maka kriterianya sangat efektif.
- 2) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 90% - 100%, maka kriterianya efektif.
- 3) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 80% - 90%, maka kriterianya cukup efektif.
- 4) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 70% - 80%, maka kriterianya kurang efektif.
- 5) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada dibawah 60%, maka kriterianya tidak efektif.

Sementara itu, untuk mengukur tingkat Efektifitas Anggaran Pendapatan dapat dilakukan dengan melakukan perbandingan antara target anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran pendapatan (Rinaldi Rinaldi et al., 2024).

2.8 Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio ini menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan memahami pertumbuhan setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, rasio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi area potensial mana yang membutuhkan perhatian (Tumija, Hakiki Doni & Agustina, 2023). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Pengeluaran Modal/Pengeluaran Operasional yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/Pengeluaran Modal/Pengeluaran Operasional yang dihitung pada tahun 0 (tahun sebelum n)

2.9 Rasio Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja adalah instrumen krusial untuk mengevaluasi progresivitas dan konsistensi pemerintah daerah dalam pengalokasian sumber daya keuangan secara tahunan, dari periode satu ke periode berikutnya. Berdasarkan Mahmudi (2010:160), ini diungkapkan melalui penelitiannya tentang belanja daerah di Indonesia, di mana belanja daerah pada umumnya cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan kebutuhan pembangunan dan pelayanan. Dalam praktik akuntansi sektor publik, pertumbuhan belanja tersebut tidak semata dilihat sebagai nominal belanja yang naik, tetapi juga refleksi arah kebijakan dan prioritas pemerintah daerah. Hal ini turut dipungkasi oleh (Kadir et al., 2025), yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan belanja merupakan alat evaluasi sehingga, diasumsikan dapat dijadikan indikasi terhadap suatu area potensial mana yang perlu diperhatikan secara khusus agar kinerja belanja tetap stabil dan berkelanjutan. Untuk menghitung rasio pertumbuhan belanja daerah, digunakan rumus sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertumbuhan Belanja Thn t

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja } t - 1}{\text{Realisas Belanja thn } t - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

Tahun T1 = Tahun ini

Tahun T-1 = Tahun lalu

Tabel 2.3: Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: (Mahsun,2006) (Kadir et al., 2025).

Penelitian terbaru oleh (Pongtasik & Ronal, 2023) mengingatkan bahwa pertumbuhan belanja yang negatif atau rendah tidak selalu berarti efisiensi, namun bisa menjadi sinyal adanya hambatan dalam penyerapan anggaran (*spending bottleneck*) atau adanya guncangan eksternal (seperti pandemi atau perubahan kebijakan pusat) yang menghambat eksekusi program pembangunan di lapangan. Dalam penelitian ini, catatan tersebut menjadi sangat relevan untuk membedah apakah penurunan belanja pada sektor-sektor tertentu di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan murni langkah efisiensi atau justru sebuah kegagalan dalam merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan.

2.10 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi mengacu pada keterkaitan antara produk dan layanan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan sumber daya yang dimanfaatkan. Sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi, program, atau aktivitas dapat disebut efisien jika mampu menghasilkan jumlah tertentu dengan memanfaatkan sedikit sumber daya, atau juga mampu menghasilkan sebanyak mungkin dengan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah rasio antara *input* dan output yang dihasilkan. Efisiensi adalah suatu ukuran untuk mengevaluasi apakah pemakaian dan layanan yang diambil oleh lembaga pemerintah dapat mencapai sasaran dan memberikan keuntungan tertentu (Armono & Widiyaningsih, 2023).

Analisis efisiensi pengelolaan anggaran daerah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efisiennya pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek dengan membandingkan hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan. Analisis ini juga mengkaji kinerja keuangan daerah dengan menyertakan ukuran efisiensi, yaitu rasio antara pengeluaran rutin yang nyata dengan total pendapatan daerah yang nyata, kemudian dikalikan seratus untuk memperoleh persentasenya.

$$\text{Rasion Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Operasional}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan menganalisis perbandingan antara pengeluaran rutin yang dilakukan dan total pendapatan yang diterima, kita dapat mengevaluasi seberapa baik situasi keuangan daerah. Kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang diukur dapat dilihat pada tabel berikut (R. Saputra et al., 2024):

Tabel 2.4: Kriteria Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
.> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

2.11 Analisis Kecerassian Belanja

Analisis keserasian belanja merupakan salah satu alat analisis keuangan daerah yang digunakan untuk menilai seberapa serasi atau seimbang proporsi pengeluaran pemerintah daerah antara belanja yang bersifat rutin (operasional) dengan belanja yang bersifat investasi (modal). Analisis ini membantu menilai apakah struktur anggaran daerah telah mendukung keberlanjutan pembangunan serta efisiensi fiskal (F. C. Putri, 2022).

Menurut (Mahmudi, 2019), keserasian belanja mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara pengeluaran jangka pendek dan investasi jangka panjang. Belanja operasi yang terlalu besar menunjukkan bahwa sebagian besar dana habis untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai dan biaya administrasi, sedangkan belanja modal yang rendah menandakan rendahnya investasi untuk peningkatan aset publik dan infrastruktur.

Sementara itu, (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal merupakan indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. Pemerintah daerah yang mampu menjaga porsi belanja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal di atas 20–40% dianggap memiliki arah kebijakan anggaran yang produktif dan berorientasi pada pembangunan.

Pendapat serupa dikemukakan oleh (Halim, A.; Kusufi, 2020), yang menegaskan bahwa analisis keserasian belanja berfungsi untuk menilai komposisi pengeluaran pemerintah daerah. Jika belanja operasi mendominasi lebih dari 80% dari total belanja, maka daerah tersebut tergolong tidak serasi karena ruang fiskal untuk pembangunan fisik menjadi sempit.

Hasil penelitian oleh (Bukhori & Riswati, 2023) dalam Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki rasio belanja operasi sebesar 82% dan belanja modal hanya 18%, yang menandakan belum adanya keserasian yang ideal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar anggaran masih diarahkan pada pengeluaran rutin, bukan untuk pengembangan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Sholikhah & Priyono, 2022) di Kabupaten Jepara, di mana belanja operasi mencapai 68,7% dan belanja modal hanya 31,3%, menunjukkan masih rendahnya fokus pada belanja produktif.

Rasio belanja operasi dan rasio belanja modal merupakan dua perhitungan dalam rasio keserasian ini. Rasio belanja operasi adalah perbandingan antara total belanja operasi dan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca mengenai porsi daerah belanja yang digunakan untuk operasional belanja. Belanja operasional didefinisikan sebagai belanja yang digunakan dalam satu tahun anggaran, yang menghasilkan jangka pendek yang bersifat rutin atau berulang dalam beberapa situasi. Secara umum, persentase total belanja daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkisar antara 60% hingga 905. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan tinggi mempunyai porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan rendah (Mahmudi, 2010). Rasio belanja operasi digambarkan sebagai berikut (Siti Sriningsih, Bq. Ismiwati, 2021).

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.5: Kriteria Belanja Operasi Daerah

Kriteria Belanja Operasi	Persentase Belanja Operasi
Baik	Dibawah 40%
Cukup Baik	40% -80%
Kurang Baik	80 -100%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi modal dengan total daerah belanja. Berdasarkan rasio tersebut, pembaca dapat memahami porsi daerah belanja yang digunakan untuk investasi belanja modal pada era tersebut. Manfaat jangka menengah dan panjang bersifat rutin disediakan oleh modal belanja. Persentase belanja modal dengan belanja daerah seringkali antara 5 dan 20% (Mahmudi, 2010). Rasio modal belanja ini digambarkan sebagai berikut (Siti Sriningsih, Bq. Ismiwati, 2021).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.6: Kriteria Belanja Modal Daerah

Kriteria Belanja Modal	Persentase Belanja Modal
Kurang Baik	0% - 10%
Cukup Baik	10% - 40%
Baik	Diatas 40%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

Tidak ada rasio belanja operasi atau rasio belanja modal yang ideal terhadap APBD karena sangat dipengaruhi oleh aktivitas konstruksi dan kebutuhan investasi yang tinggi untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan. Namun, sebagai daerah di negara ini, pemerintah daerah berkembang berperan daerah untuk melaksanakan pembangunan berskala relatif besar. Karena itu, rasio belanja modal yang relatif kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah (Siti Sriningsih, Bq. Ismiwati, 2021).

2.12 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan seluruh pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin sehari-hari dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan non-investasi. Menurut (Mahmudi, 2019), belanja operasi mencakup semua jenis belanja yang manfaatnya hanya dalam satu periode anggaran dan tidak menambah aset tetap pemerintah.

Belanja operasi terdiri atas beberapa komponen utama, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Komponen ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut (Halim, A.; Kusufi, 2020), dominasi belanja operasi yang terlalu tinggi (>80% dari total belanja) menunjukkan ketergantungan fiskal yang besar terhadap pembiayaan rutin, sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif menjadi terbatas. Kondisi ini bisa berdampak pada rendahnya tingkat pembangunan infrastruktur dan keterlambatan realisasi kegiatan yang bersifat investasi publik.

Penelitian (Sholikhah & Priyono, 2022) menunjukkan bahwa di Kabupaten Jepara, porsi belanja operasi mencapai 68,7% dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal hanya 31,3%. Hal ini menandakan bahwa struktur anggaran daerah masih cenderung berat di belanja rutin dibandingkan dengan belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Rumus Rasio Belanja Operasi:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Semakin besar rasio belanja operasi, semakin tinggi pula proporsi dana yang digunakan untuk kegiatan rutin. Namun, apabila terlalu tinggi, hal ini menandakan kurangnya keseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah (Nurain Hakim, Julie Abdullah, 2023).

2.13 Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melampaui satu tahun anggaran dan menambah nilai aset tetap, seperti tanah, peralatan, bangunan, dan infrastruktur. Menurut (Mahmudi, 2019), belanja modal termasuk dalam kategori pengeluaran investasi karena menghasilkan manfaat jangka panjang dan meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Halim, A.; Kusufi, 2020) menjelaskan bahwa belanja modal berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan produktivitas. Belanja modal yang tinggi menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses layanan publik.

Sebaliknya, rendahnya realisasi belanja modal dapat mengindikasikan adanya masalah dalam proses perencanaan, penganggaran, atau pelaksanaan proyek pembangunan. Menurut (E. Saputra et al., 2020) dalam Jurnal Ekonomia, rendahnya penyerapan belanja modal sering disebabkan oleh keterlambatan tender proyek dan revisi anggaran di pertengahan tahun anggaran.

Rumus Rasio Belanja Modal:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Menurut (Winanti et al., 2025) idealnya porsi belanja modal berkisar antara 10%–40% dari total anggaran. Apabila di bawah 10%, hal ini menunjukkan bahwa investasi publik daerah masih minim, dan struktur anggaran belum serasi.

2.14 Peraturan-Peraturan yang Berhubungan dengan Anggaran

Pengelolaan anggaran daerah diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan keuangan daerah. Aturan tersebut mengatur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, hingga akuntabilitas keuangan daerah. Aturan-aturan yang berkaitan dengan anggaran meliputi hal-hal sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks keuangan daerah, undang-undang ini menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Republik Indonesia, 2014).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Menjelaskan pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh, termasuk di dalamnya keuangan daerah. UU ini menegaskan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran (Republik Indonesia, 2003).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Menjadi acuan dalam pengelolaan perbendaharaan daerah, terutama mengenai pelaksanaan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan (Republik Indonesia, 2004a).

4. Undang – undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara

Mengatur kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit atas pengelolaan keuangan negara dan daerah (Republik Indonesia, 2004b).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Merupakan peraturan teknis yang menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. PP ini menggantikan PP No. 58 Tahun 2005 dan mengatur secara lebih rinci mengenai siklus pengelolaan APBD (Republik Indonesia, 2019).

6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Memberikan panduan teknis kepada pemerintah daerah dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan APBD, termasuk standar akuntansi pemerintahan dan tata cara pelaporan keuangan (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

7. Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Merupakan produk hukum daerah yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah daerah bersama DPRD. Perda APBD menjadi dasar hukum pelaksanaan seluruh kegiatan pendapatan dan belanja daerah selama satu tahun anggaran (Peraturan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2025)

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Menjelaskan secara teknis rincian pelaksanaan APBD yang telah disahkan melalui Perda. Peraturan ini memuat rincian program, kegiatan, dan subkegiatan setiap perangkat daerah. Peraturan-peraturan tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan anggaran daerah agar berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

2.15 Pandangan Islam Terkait Penelitian

Dalam pandangan Islam, pengelolaan keuangan publik (al-maliyah al-‘ammah) merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan efisiensi. Pemerintah daerah berkewajiban memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran digunakan untuk kemaslahatan masyarakat serta tidak menimbulkan ketimpangan fiskal. Menurut (Hidayat, 2025), sistem keuangan publik dalam Islam berlandaskan pada prinsip Maqashid al-Syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Tujuan ini selaras dengan esensi kebijakan anggaran daerah yang berorientasi pada kesejahteraan publik dan keberlanjutan pembangunan.

a. Prinsip Amanah dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Publik

Dalam Islam, pengelolaan keuangan publik harus berlandaskan amanah dan tanggung jawab moral. Allah SWT menegaskan pentingnya menjaga amanah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal [8]: 27) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019a)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap pengelola keuangan publik, termasuk pejabat daerah, wajib melaksanakan amanah dengan jujur dan transparan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas dan keserasian anggaran mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik, memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.

b. Prinsip Keadilan dan Keserasian dalam Alokasi Anggaran

قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ
بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Islam mengajarkan prinsip keadilan (al-‘adl) sebagai landasan utama dalam distribusi sumber daya publik. Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat menegakkan keadilan.” (QS. Al-Hadid [57]: 25) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019b)

Ayat ini menekankan pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks anggaran daerah, keseimbangan ini tercermin dari keserasian antara belanja operasi (pengeluaran rutin) dan belanja modal (pengeluaran investasi). Apabila alokasi terlalu berat pada belanja rutin dan mengabaikan belanja modal, maka prinsip keadilan fiskal belum terpenuhi. Hal ini sejalan dengan temuan (Winanti et al., 2025) bahwa dominasi belanja operasional di atas 80% menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Belanja Publik sebagai Wujud Kemaslahatan (Maslahah ‘Ammah)

Menurut (Ismail et al., 2025), keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari pencapaian target anggaran, tetapi juga dari sejauh mana dana publik tersebut mampu mewujudkan masalah ‘ammah (kemaslahatan umum). Oleh karena itu, efektivitas dan keserasian anggaran dalam penelitian ini dapat dimaknai sebagai ukuran sejauh mana pemerintah daerah menjalankan amanah publik dengan adil, efisien, dan seimbang.

2.16 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7: Penelitian Terdahulu

N o	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Cheryll et al., 2025)	Analisi Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Rasio Keserasian Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan Di Kota Manado	Kualitatif deskriptif. Penelitian menggabungkan data sekunder dari Laporan Keuangan/LRA Pemerintah Kota Manado (periode 2018–2023) dengan informasi wawancara (misalnya pihak terkait pengelolaan APBD, perencanaan, dan penganggaran) untuk memotret penyebab capaian rasio keuangan serta konsistensi temuan antar sumber. Hasilnya: kinerja keuangan Pemerintah Kota Manado selama 2018–2023 menunjukkan kecenderungan kurang optimal. Rasio efektivitas PAD mengalami fluktuasi: sangat efektif pada 2018–2019, tetapi turun tajam pada 2020 (pandemi) dan pada 2021–2023 tetap berada pada kategori kurang efektif. Rasio efisiensi berada pada kategori tidak efisien sepanjang periode (nilai rasio menunjukkan belanja belum terkontrol dibanding pendapatan). Rasio kemandirian mengindikasikan ketergantungan tinggi pada dana transfer pemerintah pusat (pola hubungan masih dominan instruktif). Sementara itu, keserasian belanja menunjukkan bahwa belanja operasional mendominasi total belanja (sekitar 88%–101%), sehingga alokasi untuk belanja modal masih relatif kecil dan hanya pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kategori cukup baik (sekitar 10%–29%).
2	(Sugeha et al., 2025)	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2023	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja analisis keuangan Pemerintah Kota Bogor melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode 2019 hingga 2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diambil dari situs web Pemerintah Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan Pemerintah Kota Bogor berada dalam kategori sedang, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada pendapatan dari luar daerah. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan rasio rata-rata 106,95%, namun efisiensi pengelolaan anggaran masih perlu ditingkatkan dengan rasio rata-rata 100,88%, yang menunjukkan adanya ketidakoptimalan dalam penggunaan anggaran. Pertumbuhan pendapatan daerah menunjukkan tren positif, dan varian anggaran mencerminkan pengelolaan yang relatif baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada tantangan, Pemerintah Kota Bogor mampu mengelola keuangan daerah dengan baik dan perlu terus meningkatkan strategi untuk kemandirian keuangan.
3	(Winanti et al., 2025)	Analisis Kinerja dan Sektor Strategis Belanja Daerah: Studi Kasus di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Kualitatif deskriptif dengan, menggabungkan data sekunder (Laporan Keuangan) dengan wawancara. Hasilnya: Kinerja belanja menunjukkan varians positif (<i>Favorable</i>), pertumbuhan 35,68%, dan rasio efisiensi 97,50% (efisien). Namun, keserasian belanja masih didominasi belanja operasional (98,93%). Sektor strategis utama adalah Belanja Barang dan Jasa (68%).
4	(R. M. Putri & Yuliafitri, 2024)	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022 (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung)	Deskriptif kuantitatif. Hasilnya: Realisasi anggaran operasional Kota Bandung (2019-2022) menunjukkan tingkat efektivitas "cukup efektif" (rata-rata 84%). Persentase efektivitas meningkat dari 81% (2019) menjadi 87% (2022). Dari sisi efisiensi, anggaran operasional dinilai "sangat efisien" (rata-rata selisih hemat 15%).
5	(Rinaldi Rinaldi et al., 2024)	Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun	Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan dalam periode 2021 hingga 2023, dengan fokus pada alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	2021-2023	Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan APBD Kota Medan masih tergolong kurang efektif. Meskipun terdapat alokasi anggaran yang signifikan untuk pendidikan dan kesehatan, serapan anggaran untuk infrastruktur rendah. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan anggaran pengelolaan agar alokasi dana dapat dioptimalkan untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(Rivatul et al., 2024)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Pemerintahan Di Kota Bekasi Tahun 2020-2022	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bekasi dari tahun 2020 hingga 2022, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, berdasarkan data laporan realisasi anggaran selama tiga tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas anggaran pendapatan berada pada kategori 'cukup efektif' dengan rata-rata 98,90%, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi mampu merealisasikan anggaran pendapatan dengan baik. Namun tingkat efektivitas anggaran belanja berada pada kategori 'kurang efektif' dengan rata-rata hanya 85,76%, menandakan bahwa realisasi belanja belum sesuai target. Selain itu, tingkat efisiensi anggaran belanja juga tergolong 'kurang efisien' dengan rata-rata 117%, menunjukkan adanya pemborosan dalam penggunaan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran agar lebih optimal dan efisien.
(Bukhori & Riswati, 2023)	Analisis Rasio Kesenjangan Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Daerah Kota Bandung	Penelitian Kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasilnya: Rasio kesenjangan belanja operasional turun 0,69% (dari 86% di 2020 menjadi 85,31% di 2021). Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan persentase rasio belanja modal (naik 2,38% dari 10,33% menjadi 12,71%). Rasio efektivitas PAD konsisten dinilai "efektif" (91,12% di 2020 dan 91,13% di 2021).
(Gurhanawan, 2023)	Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama periode tahun anggaran 2019 hingga 2021. Metode yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019-2021	digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dan analisis mencakup varians belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varian belanja tertinggi yang terjadi pada tahun 2019 (5,40%), dan pertumbuhan belanja pada tahun 2020 meningkat signifikan sebesar 51,90%, mencapai 103,81% pada tahun 2021. Meskipun kinerja belanja menunjukkan peningkatan, efisiensi pengelolaan anggaran masih berada di bawah 100%, menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun perkembangannya positif, masih diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran agar hasil yang dicapai lebih optimal.
9	(Ihalauw Yuliet Frillia et al., 2023)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi Covid-19	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari selama tahun 2019 dan 2020, dengan fokus pada dampak pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pendapatan dan belanja daerah akibat pandemi. Terdapat penurunan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, sementara pengeluaran meningkat akibat alokasi untuk penanganan Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengelolaan APBD masih kurang, karena realisasi belanja tidak mencapai target yang ditetapkan. Kesimpulan dari penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk lebih fokus pada pengelolaan pendapatan dan belanja agar pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkelanjutan
10	(Kartika, 2023)	Kinerja Keuangan Daerah: Tinjauan Rasio Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, dan Share and Growth	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah, efektivitas, efisiensi belanja daerah, serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Enrekang. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan data sekunder dari laporan keuangan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Enrekang tergolong “rendah sekali” dengan rasio 9,13%, yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada pendapatan luar daerah. Sementara itu, rasio efektivitas PAD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			berada pada kategori “cukup efektif” sebesar 83,88%, dan rasio efisiensi belanja berada dalam kategori “tidak efisien” sebesar 145,16%. Pertumbuhan PAD dan PDRB menunjukkan hasil yang rendah, sehingga Kabupaten Enrekang berada dalam kuadran IV, mencerminkan posisi keuangan yang buruk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan PAD dan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan luar daerah.
(Kinerja et al., 2023)	Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019-2021		Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja belanja Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama periode 2019 hingga 2021 dengan menggunakan data dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dan mencakup analisis varian belanja, pertumbuhan belanja, keserasian belanja, dan efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa varian belanja tertinggi terjadi pada tahun 2019 (5,40%), sedangkan pertumbuhan belanja pada tahun 2020 meningkat signifikan sebesar 51,90% dan mencapai 103,81% pada tahun 2021. Meskipun demikian, efisiensi belanja masih menunjukkan angka di bawah 100%, yang mengindikasikan adanya ketidakefektifan dalam anggaran. Penulis menyimpulkan bahwa kinerja belanja Kementerian Kesehatan mengalami peningkatan, namun masih perlu perbaikan dalam efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
(Kusuma & Budiwitjaksono, 2023)	Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Pemerintah Kabupaten Gresik		Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik selama tahun anggaran 2017 hingga 2021, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, menggunakan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Gresik tergolong baik, dengan tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja mencapai rata-rata 88,32%, yang dinilai cukup efektif. Sementara itu, tingkat efisiensi belanja langsung rata-rata sebesar 49,94%, yang dikategorikan sangat efisien. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun efektivitas anggaran berada pada kriteria cukup efektif, efisiensi belanja sudah sangat baik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			menunjukkan penggunaan anggaran yang optimal.
13	(Amelia, 2022)	Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi	Penelitian ini Kualitatif deskriptif. Menganalisis varians, pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi belanja. Hasilnya: Kinerja belanja baik (realisasi tidak melebihi anggaran). Pertumbuhan belanja negatif (-2%) pada 2019-2020 akibat pergeseran anggaran untuk Covid-19. Keserasian didominasi belanja operasi (rata-rata 81,46%). Rasio efisiensi tergolong "Efisien" (rata-rata 94,56%)
14	(Ayu et al., 2022)	Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020	Penelitian ini Analisis deskriptif kuantitatif. Menganalisis varians pendapatan, rasio kemandirian, efektivitas PAD, dan rasio efisiensi. Hasilnya: Kinerja keuangan dinilai baik (variens pendapatan rata-rata 100,53%). Namun, tingkat kemandirian "sangat rendah" (rata-rata 13,65%). Rasio efektivitas PAD "sangat efektif" (rata-rata 104,8%) dan rasio efisiensi "efisien" (rata-rata 93,57%).
15	(May et al., 2022)	Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado	Penelitian ini Analisis deskriptif). Analisis varians menunjukkan efisiensi (realisasi tidak melebihi target). Namun, hasil rasio efisiensi belanja tidak konsisten (Cukup efisien 90,88% di 2018; Kurang efisien 94,34% di 2019; Efisien 67,18% di 2020). Pertumbuhan belanja negatif (turun 3,91% di 2018-2019 dan 30,87% di 2019-2020). Analisis keserasian menunjukkan prioritas pada belanja langsung.
16	(Andriani, 2020)	Analisis Kinerja Belanja Daerah di Kabupaten Sarolangun	Analisis deskriptif dan kuantitatif. Menganalisis perkembangan, pertumbuhan, keserasian, dan efisiensi belanja. Hasilnya: Perkembangan belanja daerah (2006-2012) rata-rata 20,67%. Kinerja keserasian dinilai baik, karena alokasi belanja operasional (rata-rata 60,69%) lebih besar daripada belanja modal (rata-rata 31,11%). Tingkat rata-rata efisiensi belanja tergolong "efisien" (rata-rata 86,64%).

Sumber: Diolah oleh peneliti 2025

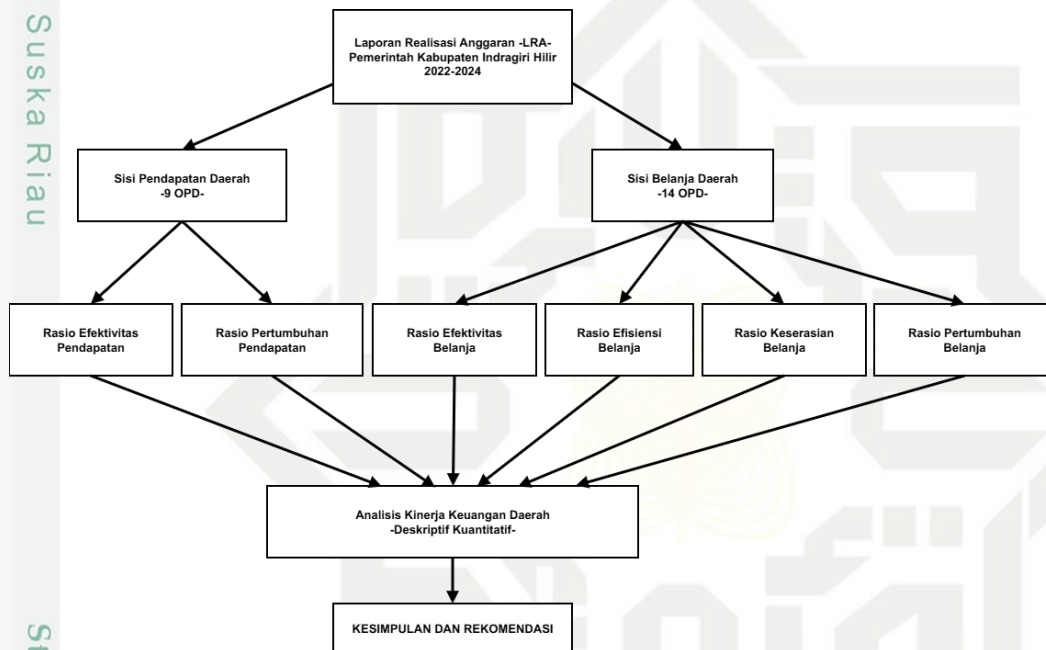
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.17 Kerangka Pemikiran

Dalam Skripsi ini, pembahasan pertama mencakup hasil analisis varians dan pembahasan kedua meliputi hasil analisis efisiensi serta analisis efektivitas.

Gambar 2.2: Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh peneliti 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian campuran (*Mixed Methods*) dengan desain urutan penjelasan (*Explanatory Sequential Design*). Menurut (Creswell & Vicki L. Plano Clark, 2018) , desain *explanatory sequential* dilakukan dalam dua tahap interaktif: tahap pertama melibatkan pengumpulan dan analisis data kuantitatif, yang kemudian diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap kedua. Tujuan tahap kedua ini adalah untuk menjelaskan, memperdalam, dan menginterpretasikan hasil kuantitatif yang diperoleh pada tahap pertama.

Pemilihan metode ini didasari oleh kompleksitas evaluasi kinerja keuangan publik yang tidak cukup hanya dinilai dari angka. (Sugiyono, 2023) menjelaskan bahwa dalam metode kombinasi desain *sequential explanatory*, tahap pertama berfungsi untuk mendapatkan data kuantitatif yang terukur dan objektif, sedangkan tahap kedua (kualitatif) berfungsi untuk memberikan pemaknaan yang lebih mendalam mengenai situasi sosial atau kendala di lapangan, sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan valid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir sebagai pusat data konsolidasi, serta melibatkan 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Tembilahan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan Desember 2025 sampai dengan Maret 2026.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Sesuai dengan desain penelitian campuran, data yang digunakan terdiri dari dua jenis:

1. Data Kuantitatif (Tahap Utama): Berupa angka-angka target dan realisasi pendapatan serta belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2023) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan untuk dianalisis secara objektif.
2. Data Kualitatif (Tahap Penjelas): Berupa narasi, penjelasan, dan opini mengenai fenomena underspending atau ketimpangan anggaran. (Sugiyono, 2023) menyatakan bahwa data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar yang bertujuan untuk mengeksplorasi makna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

3.3.2.1 Data Skunder

Menurut (Sugiyono, 2023), sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022-2024 yang diperoleh dari BKAD. Seluruh dokumen data LRA ini telah divalidasi dengan tanda tangan dan stempel pengesahan resmi dari instansi terkait untuk menjamin keshahihan dokumen.

3.3.2.2 Data Primer

(Sugiyono, 2023) mendefinisikan sumber primer sebagai sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan narasumber (pejabat teknis OPD) guna memberikan penjelasan mendalam terhadap hasil analisis kuantitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh (Creswell & Vicki L. Plano Clark, 2018), pengumpulan data primer kualitatif dalam desain *explanatory* berfungsi untuk menindaklanjuti hasil kuantitatif yang signifikan. Bukti pelaksanaan pengumpulan data primer ini diverifikasi melalui tanda tangan narasumber pada lembar transkrip wawancara.

3.4 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (Sugiyono, 2023). Dalam penelitian ini, objek penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari total keseluruhan 53 OPD yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Penentuan ke-14 OPD tersebut dilakukan secara sengaja (*Purposive Selection*) untuk memenuhi kebutuhan data kualitatif dalam desain *explanatory sequential*. Menurut (Creswell & Vicki L. Plano Clark, 2018), pemilihan partisipan atau objek secara bertujuan dilakukan agar peneliti dapat memilih unit yang paling representatif untuk membantu menjelaskan hasil kuantitatif secara mendalam. Adapun kriteria objektif yang ditetapkan dalam pemilihan 14 OPD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Signifikansi dan Materialitas Anggaran: Dipilih OPD yang memiliki besaran anggaran (pagu) dan realisasi yang material atau signifikan terhadap total APBD Kabupaten Indragiri Hilir. Fluktuasi kinerja pada 14 OPD ini secara substansial dapat menggambarkan potret kinerja keuangan daerah secara makro.
2. Representasi Sektor Strategis: OPD dipilih berdasarkan keterwakilan sektor-sektor vital yang menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan daerah. Peneliti melihat adanya "Masalah Empiris" pada ke-14 OPD ini yang tidak ditemukan secara merata pada 53 OPD lainnya.
3. Kedalaman Analisis (*Depth of Analysis*): Pembatasan pada 14 OPD memungkinkan peneliti untuk melakukan bedah tren secara mendalam dan mendetail selama periode 2022–2024, sehingga karakteristik Kinerja yang Signifikan dan inefisiensi belanja dapat terdeteksi secara lebih akurat dibandingkan analisis agregat seluruh populasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketersediaan dan Konsistensi Data: OPD yang dipilih memiliki Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang lengkap, konsisten, dan tersedia secara berturut-turut selama periode pengamatan (2022–2024)

Tabel 3.1: Rincian OPD Objek dan Kriteria Pertimbangan Pemilihan

No	Nama OPD	Peran Strategis	Kriteria Pertimbangan (Data Empiris 2022–2024)
1	Bapenda	Jantung PAD	Inkonsistensi Efisiensi: Realisasi pendapatan 2023 mencapai puncak Rp 48.403.409.250, namun turun di 2024 menjadi Rp 47.048.850.037 meskipun anggaran operasional dinaikkan.
2	BKAD	Bendahara Umum	Ketimpangan Struktur: Dominasi Belanja Operasi 2024 sebesar Rp 23.342.770.144, berbanding jauh dengan Belanja Modal yang hanya Rp 1.507.355.000.
3	Dinas Pendidikan	Mandatory Spending	Degradasi Kinerja: Realisasi terus menurun dari 93,36% (2022), menjadi 92,58% (Rp 596.048.541.775) di 2023, dan anjlok ke 85,19% (Rp 666.216.687.089) di 2024.
4	Dinas Kesehatan	Layanan Dasar	Inkonsistensi Alokasi: Pendapatan BLUD melonjak dari Rp 31.347.366.975 (2023) ke Rp 113.635.419.306 (2024), namun Belanja Modal fisik justru turun dari Rp 22.065.703.650 ke Rp 18.111.968.104.
5	Dinas PUTR	Infrastruktur	<i>Underspensing</i> : Daya serap rendah yaitu 65,58% (2023) dan 71,04% (2024). Terdapat gap $\pm 30\%$ dana pembangunan yang tidak terserap.
6	Dinas Perkim	Perumahan Rakyat	Tren Penurunan Konsisten: Penyerapan anggaran menurun dari 92,10% (2022), menjadi 83,23% (2023), dan turun kembali ke 79,43% (2024).
7	Dinas Perhubungan	Transportasi	Stagnansi Investasi: Pendapatan naik dari Rp 801.481.300 (2023) menjadi Rp 1.606.980.486 (2024), namun Belanja Modal stagnan di angka Rp 4.527.652.211.
8	Dinas Sosial	Kesejahteraan	Anjloknya Belanja Modal: Alokasi belanja modal turun drastis dari Rp 77.754.000 pada tahun 2022 menjadi hanya Rp 29.190.800 pada tahun 2024.
9	DPMPTSP	Investasi	Kondisi yang Sangat Spesifik: Pada tahun 2023 masih memiliki belanja modal sebesar Rp 195.700.000, namun pada tahun 2024 menjadi Rp 0 (Nol Rupiah).
10	Dinas Perikanan	Ekonomi Maritim	Pemangkasan Ekstrem: Pendapatan retribusi hanya Rp 3.150.000 (2024) dan Belanja Modal dipangkas dari Rp 870.338.740 (2022) menjadi hanya Rp 52.242.150 (2024).
11	Dinas Pangan	Ketahanan Pangan	Penghentian Alokasi: Belanja modal yang semula Rp 1.402.765.615 pada tahun 2023, menjadi Rp 0 (Nol Rupiah) pada tahun 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Dinas Perkebunan	Ekonomi Basis	Ketidakrelevanan Anggaran: Belanja modal tahun 2024 hanya tersisa Rp 65.190.300, angka yang sangat kecil untuk sektor ekonomi unggulan daerah.
13	Setda	Pusat Administrasi	Indikasi Pemborosan: Belanja Operasi 2024 menembus Rp 82.892.441.766, sementara Belanja Modal hanya dialokasikan sebesar Rp 611.725.974.
14	Sekretariat DPRD	Fasilitasi Legislatif	<i>Budgetary Slack</i> : Belanja Operasi stabil tinggi, namun Belanja Modal merosot tajam dari Rp 2.800.371.782 (2022) menjadi Rp 766.943.530 (2024).

Sumber: *Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022–2024 (Data Diolah oleh peneliti, 2025).*

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2023). Mengingat penelitian ini menggunakan desain *explanatory sequential*, maka proses pengumpulan data dilakukan dalam dua tahap yang berurutan sebagai berikut:

1. Dokumentasi (Tahap Kuantitatif): Pada tahap pertama, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2023), dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan atau dokumen mengenai variabel penelitian yang dapat berupa laporan keuangan, otobiografi, catatan harian, dan dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk memperoleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi serta dokumen APBD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022–2024. Peneliti memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperoleh merupakan dokumen yang sah, resmi, dan telah divalidasi dengan tanda tangan serta stempel resmi dari instansi terkait. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting untuk menjamin keshahihan data yang akan menjadi dasar perhitungan rasio keuangan pada tahap kuantitatif.

2. Wawancara Terstruktur (Tahap Kualitatif): Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara terstruktur. Menurut (Sugiyono, 2023), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, namun dalam desain kombinasi ini, ia juga berfungsi untuk memperdalam data kuantitatif. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis agar informasi yang diperoleh tetap fokus pada tujuan penelitian.

Sebagaimana ditegaskan oleh (Creswell & Vicki L. Plano Clark, 2018), pengumpulan data kualitatif dalam *desain explanatory* dilakukan tepat setelah hasil kuantitatif dianalisis. Tujuannya adalah untuk menindaklanjuti dan mengeksplorasi hasil statistik (angka) tersebut secara lebih mendetail melalui pandangan partisipan (pejabat teknis OPD). Melalui wawancara ini, peneliti menggali alasan kontekstual di balik anomali anggaran, seperti kendala teknis dalam penyerapan belanja modal atau faktor administratif yang mempengaruhi efektivitas pendapatan, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka rasio semata. Bukti pelaksanaan wawancara ini diverifikasi melalui tanda tangan narasumber pada lembar transkrip wawancara untuk menjamin autentikasi data primer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan desain penelitian campuran model urutan penjelasan (*Explanatory Sequential Design*), teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap interaktif yang berkesinambungan. (Creswell & Vicki L. Plano Clark, 2018), prosedur analisis dalam desain ini dilakukan dengan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu untuk mengidentifikasi hasil yang perlu dijelaskan lebih lanjut, kemudian diikuti oleh analisis data kualitatif guna membantu menjelaskan hasil kuantitatif tersebut.

Pada tahap pertama, peneliti melakukan analisis deskriptif terhadap data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 14 OPD Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022-2024. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran objek yang diteliti melalui data sebagaimana adanya (Sugiyono, 2023, hlm. 238). Peneliti menggunakan rumus-rumus rasio keuangan daerah sebagai instrumen analisis, yaitu:

1. Analisis Efektivitas Keuangan Daerah: Analisis efektivitas digunakan untuk menilai kemampuan OPD dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan.
 - a. Efektivitas Pendapatan: Dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target anggaran pendapatan.
 - b. Efektivitas Belanja: Dihitung dengan membandingkan realisasi belanja dengan pagu anggaran belanja guna mengukur daya serap anggaran.
2. Analisis Efisiensi Belanja Daerah: Analisis efisiensi digunakan untuk menilai tingkat penghematan anggaran yang dilakukan OPD dengan membandingkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

realisasi belanja terhadap anggaran belanja. Semakin kecil persentase efisiensi (di bawah 100%), maka kinerja dinilai semakin baik atau efisien.

3. Analisis Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja: Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan atau tren kenaikan maupun penurunan realisasi pendapatan yang diperoleh OPD dari tahun ke tahun. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan tahun berjalan dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya untuk melihat konsistensi kinerja penerimaan daerah serta pertumbuhan belanja daerah. Analisis berikut ini mengkaji tren realisasi keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan membandingkan data tahun berjalan dan tahun sebelumnya melalui dua fokus utama yaitu pertumbuhan pendapatan, yang mengukur kinerja fiskal dan keberhasilan OPD dalam memaksimalkan potensi pendapatan daerah, dan pertumbuhan belanja, yang membantu menganalisis arah kebijakan anggaran untuk menentukan apakah alokasi difokuskan pada perluasan layanan publik atau malah mencerminkan peningkatan pengeluaran rutin berbasis konsumsi.
4. Analisis Keserasian Belanja Daerah: Analisis ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan proporsi antara belanja rutin (operasi) dan belanja investasi (modal) terhadap total belanja daerah. Analisis ini membedah apakah struktur anggaran lebih berorientasi pada kegiatan rutin birokrasi atau pembangunan aset publik yang bersifat jangka panjang.

Untuk memperkuat analisis peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan pejabat teknis pada 14 OPD terpilih tersebut guna memperkuat hasil analisis rasio keuangan daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2023), hasil wawancara dalam metode kombinasi ini digunakan sebagai data pendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperjelas dan memberikan interpretasi mendalam terhadap temuan angka-angka rasio, sehingga hasil penelitian tidak hanya terpaku pada angka tetapi juga menyentuh aspek manajerial dan kebijakan di lapangan. Untuk data hasil wawancara, penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif sebagaimana dijelaskan dalam (Miles et al., 2018). Model ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan:

1. **Kondensasi Data (*Data Condensation*):** Merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data yang muncul dalam transkrip wawancara (Miles et al., 2018). Pada tahap ini, peneliti menyeleksi jawaban narasumber secara ketat dan hanya mengambil narasi yang menjelaskan penyebab masalah rasio keuangan (misalnya hambatan lelang atau regulasi SIPD).
2. **Penyajian Data (*Data Display*):** Pengorganisasian informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan (Miles et al., 2018). Data wawancara yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif yang dihubungkan langsung dengan tabel angka LRA masing-masing OPD.
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*):** Peneliti mulai mencari makna dari setiap data yang dikumpulkan dengan mencatat keteraturan, pola-pola, dan penjelasan terkait realita pengelolaan APBD di Kabupaten Indragiri Hilir (Miles et al., 2018). Dalam tahap ini, peneliti memaknai hubungan antara hasil wawancara mengenai kendala administratif dan kebijakan dengan hasil perhitungan rasio pada 14 OPD yang menjadi objek penelitian. Kesimpulan kualitatif (hasil wawancara) ini

kemudian ditriangulasi (dicocokkan) dengan hasil rasio kuantitatif guna memastikan bahwa kesimpulan akhir penelitian bersifat kredibel, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan

3.6 Identifikasi Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.2: Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Cara Pengukuran (Rumus)	Skala
1	Efektivitas Pendapatan	Mengukur kemampuan pemerintah daerah/OPD dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan (Rinaldi Rinaldi et al., 2024).	$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio
2	Efektivitas Belanja	Sejauh mana realisasi belanja daerah mampu menyerap pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi (Mahmudi, 2019).	$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$	Rasio
3	Pertumbuhan Pendapatan	Mengukur perkembangan atau kenaikan/penurunan pendapatan yang diperoleh dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2019).	$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Pertumbuhan Belanja	Mengukur perkembangan atau kenaikan/penurunan belanja yang direalisasikan dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2019).	$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Real Blja Thn } t - \text{Real Blja } t - 1}{\text{Realisas Belanja thn } t - 1} \times 100\%$	Rasio
4	Efisiensi Belanja	Perbandingan antara output/hasil dengan <i>input</i> (biaya) untuk melihat tingkat penghematan anggaran (Mardiasmo, 2018).	$\text{Rasion Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Operasional}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
5	Keserasian Belanja Operasi	Rasio yang menunjukkan porsi belanja rutin/biaya habis pakai terhadap total belanja daerah (Mardiasmo, 2018).	$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio
6	Keserasian Belanja Modal	Rasio yang menunjukkan porsi belanja untuk investasi aset tetap atau jangka panjang terhadap total belanja (Mardiasmo, 2018).	$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Data diolah peneliti dari berbagai literatur (2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio efektivitas dan keserasian berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022–2024. Analisis dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Analisis Efektivitas Keuangan Daerah

Analisis efektivitas dalam penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu efektivitas pada sisi pendapatan (penerimaan) dan efektivitas pada sisi belanja (pengeluaran).

- Efektivitas Pendapatan Daerah** Rasio ini mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lainnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Rumusnya adalah:

$$\text{Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 3.3: Kriteria Kinerja Keuangan Efektifitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri, 2023 (Amua, Agung Prasetyo, Niswatinb, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk kriteria Efektifitas Anggaran Pendapatan sama dengan bagaimana melihat kriteria efektifitas anggaran belanja yaitu dengan mengikuti Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diatas 100%, maka kriterianya sangat efektif.
- 2) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diantara 90% - 100%, maka kriterianya efektif.
- 3) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diantara 80% - 90%, maka kriterianya cukup efektif.
- 4) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada diantara 70% - 80%, maka kriterianya kurang efektif.
- 5) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran pendapatan dengan target anggaran pendapatan berada dibawah 60%, maka kriterianya tidak efektif.

b. **Efektivitas Belanja Daerah** Rasio ini mengukur daya serap anggaran, yaitu seberapa besar realisasi belanja dibandingkan dengan anggaran yang disediakan. Rumusnya adalah:

$$\text{Efektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3. 4: Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Kategori	Predikat
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	< 60%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, terdapat beberapa kriteria efektifitas anggaran belanja, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diatas 100%, maka kriterianya sangat efektif.
- 2) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 90% - 100%, maka kriterianya efektif.
- 3) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 80% - 90%, maka kriterianya cukup efektif.
- 4) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada diantara 70% - 80%, maka kriterianya kurang efektif.
- 5) Jika hasil dari perbandingan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja berada dibawah 60%, maka kriterianya tidak efektif.

2. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya antar-periode. Rasio ini berfungsi mengevaluasi tren perkembangan setiap komponen pendapatan maupun belanja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Keterangan:

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Pengeluaran Modal/Pengeluaran Operasional yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/Pengeluaran Modal/Pengeluaran Operasional yang dihitung pada tahun 0 (tahun sebelum n)

3. Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan pengeluaran menilai seberapa konsisten pengaturan anggaran setiap tahun dan menunjukkan fokus kebijakan pembangunan. Ukuran ini berfungsi sebagai alat untuk menilai dan menemukan bagian yang berpotensi agar kinerja keuangan tetap stabil (Kadir et al., 2025).

Pertumbuhan Belanja Thn t

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja } t - 1}{\text{Realisas Belanja thn } t - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

Tahun T1 = Tahun ini

Tahun T-1 = Tahun lalu

Tabel 3.5: Kriteria Penilaian Kinerja Pertumbuhan Belanja

Kriteria Pertumbuhan Belanja	Ukuran
Naik	Positif
Turun	Negatif

Sumber: (Mahsun,2006) (Kadir et al., 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Analisis Efisiensi

Efisiensi adalah rasio antara *input* dan *output* yang mengukur sejauh mana hasil maksimal dicapai dengan pemanfaatan sumber daya yang minimal. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, analisis ini mengevaluasi apakah anggaran digunakan secara ekonomis untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam kinerja keuangan daerah, efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi pengeluaran total terhadap realisasi pendapatan daerah (Armono & Widiyaningsih, 2023).

$$\text{Rasion Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Operasional}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.6: Kriteria Kinerja Keuangan

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

5. Analisis Keserasian Anggaran Belanja

a. **Rasio Belanja Operasi** mengukur porsi total belanja daerah yang digunakan untuk kebutuhan operasional rutin (jangka pendek) (Siti Sriningsih, Bq. Ismiwati, 2021).

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.7: Kriteria Belanja Operasi Daerah

Kriteria Belanja Operasi	Persentase Belanja Operasi
Baik	Dibawah 40%
Cukup Baik	40% -80%
Kurang Baik	80 -100%

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

b. **Rasio Belanja Modal** mengukur porsi total belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi aset atau pembangunan (jangka panjang) (Siti Sriningsih, Bq. Ismiwati, 2021).

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.8 : Kriteria Belanja Modal Daerah

Kriteria Belanja Modal	Persentase Belanja Modal
Kurang Baik	0% - 10%
Cukup Baik	10% - 40%
Baik	Diatas 40%

Depdagri, Kepmendagri No. 690. 900. 327 Tahun 1996 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai “Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir periode 2022 – 2024”, penulis mencapai kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Pendapatan Daerah **efektif** secara agregat namun lemah secara mandiri temuan dari 14 OPD yang dijadikan menunjukkan bahwa secara keseluruhan (agregat), target pendapatan dapat tercapai dengan kategori efektif. Namun efektivitas ini belum mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat. Analisis mendalam mengungkapkan bahwa struktur pendapatan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari OPD teknis cenderung cenderung tidak bergerak maju (stagnan). Hal ini mengindikasikan bahwa fondasi keuangan daerah masih memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah pusat, sehingga kemandirian dalam menggali potensi lokal perlu diperkuat.
2. Kinerja belanja daerah dimana realisasi tercapai namun terkendala **efisiensi** manajerial berdasarkan pengujian terhadap 14 OPD, tingkat penyerapan belanja berada pada kategori **cukup efektif** secara administratif, namun menunjukkan tren efisiensi yang menurun. Terjadi fenomena *underspending* atau kegagalan penyerapan anggaran tepat waktu, terutama pada sektor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan dan kesehatan. Analisis menunjukkan bahwa persoalan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada proses manajerial dan birokrasi yang belum responsif. Akibatnya, anggaran yang tersedia seringkali gagal dikonversi menjadi pembangunan maksimal karena penumpukan realisasi yang baru terjadi di akhir tahun.

3. **Keserasian** alokasi belanja dominasi biaya **operasional** dan minimnya **belanja modal** (investasi) analisis keserasian yang dilakukan pada 14 OPD yang diteliti menunjukkan pola yang konsisten, di mana **belanja operasional** jauh lebih mendominasi dibandingkan **belanja modal**. Sebagian besar anggaran (lebih dari 85%) terserap untuk biaya rutin kantor dan gaji pegawai, sedangkan porsi untuk pembangunan infrastruktur fisik sangat minim. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa postur anggaran daerah masih lebih condong pada pembiayaan administratif dibandingkan dengan investasi pembangunan jangka panjang. Keterbatasan ruang fiskal ini berisiko menghambat percepatan penyediaan fasilitas publik yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Optimalisasi pengelolaan keuangan belum tercapainya **keselarasan antara pendapatan dan belanja** meskipun 14 OPD yang menjadi menunjukkan stabilitas dalam pengumpulan pendapatan, hal ini belum diimbangi dengan kualitas penyerapan belanja yang sejalan. Terdapat sebuah kesenjangan kinerja di mana kemampuan daerah dalam menghimpun dana tidak secara otomatis diikuti dengan kemampuan untuk merealisasikan program pembangunan secara produktif. Ketidaksinkronan ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berpegang pada prinsip

manfaat maksimal (*Value For Money*). Dengan kata lain, stabilitas pendapatan yang dicapai belum mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat secara cepat dan merata.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (TAPD), Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berharga bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pengambilan kebijakan fiskal. Peneliti menyarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi mendalam terhadap struktur anggaran agar lebih proporsional. Diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan alokasi belanja modal guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik, serta mengurangi dominasi belanja operasional agar anggaran tidak hanya habis untuk kebutuhan administrasi semata.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Indragiri Hilir, bagi 14 OPD yang menjadi maupun OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, disarankan untuk segera melakukan pembenahan pada sistem perencanaan dan penganggaran agar lebih realistis serta terukur. Dalam aspek belanja, OPD diharapkan mampu melakukan akselerasi kegiatan sejak awal tahun anggaran demi menghindari penumpukan realisasi di akhir periode yang seringkali memicu belanja yang tidak terlaksana dan penurunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas pembangunan akibat pengerjaan yang terburu-buru. Dari sisi pendapatan, OPD penghasil maupun belanja rutin agar tidak *overbuget* dituntut untuk lebih objektif dalam menetapkan target dengan mempertimbangkan potensi riil di lapangan, bukan sekadar mengacu pada capaian tahun sebelumnya. Sebagai langkah fundamental, OPD perlu mengimplementasikan penggunaan rumus-rumus rasio keuangan sebagai instrumen evaluasi atas capaian di periode sebelumnya. Meskipun kondisi lapangan bersifat dinamis dan tidak semua kebijakan bisa diputuskan hanya lewat angka, penggunaan rumus merupakan langkah awal yang krusial untuk menghasilkan perhitungan yang akurat dan ilmiah. Dengan memulai dari data yang terukur, OPD dapat meminimalisir kesalahan dalam memprediksi anggaran, sehingga setiap target yang ditetapkan memiliki basis data yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini memiliki batasan pada jumlah (14 OPD) dan rentang waktu yang hanya 3 tahun (2022–2024). Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan rentang waktu yang lebih panjang agar tren perkembangan keuangan daerah terlihat lebih akurat. Melibatkan seluruh OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar gambaran kinerja keuangan daerah menjadi lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2022). Buton Tengah Di Masa Pandemi COVID-19 Functions of the Regional House of Representatives of Central Buton Regency During the Covid-19 Pandemic Abstrak. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, Vol 8 No 1(April), 11–20.
- Amelia, S. (2022). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukabumi*.
- Amua, Agung Prasetyo, Niswatinb, N. Y. (2023). *Analisis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Menggunakan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo Agung Prasetyo Amu*. 2(3), 291–307.
- Andriani, I. (2020). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Di Kabupaten Sarolangun*. 9(02), 120–128.
- Armono, D., & Widiyaningsih, N. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020 Universitas Amikom Yogyakarta. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(2), 323–331.
- Ayu, F., Tyas, S., & Rani, U. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018-2020*. 2(3), 39–48.
- Azahari, R. S. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. In *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)* (www.djpk.kemenkeu.go.id) (Vol. 20, p. 20).
- Bafagehi, S., Ilat, V., & Afandi, D. (2023). Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 7(2), 71–80.
- Barus, I. N. E., & Djamhuri, A. (2024). Measurement of government performance in literature review. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(13), 1–20. <https://doi.org/10.24294/jipd8964>
- Bastian, I. (2021). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga* (Erlangga).
- BPK, U. (2019). Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Tinjauan Hukum Tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019*, 2019(2019), 1–51.
- Bukhori, Y., & Riswati. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal Dan Daerah Di Pemerintahan Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 41–55.
- Carlos Arnold Atmoko, & Khairudin. (2022). *Dampak Pendapatan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 1–6. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1295>
- Cheryll, B. A., Anderson G. Kumenaung, & Kawung, G. M. V. (2025). *Analisi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Dan Rasio Keserasian Untuk Penilaian Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan Di Kota Manado. 25(September), 185–195.
- Creswell, J. W., & Vicki L. Plano Clark. (2018). *Designing and Conducting Mixed Methods Reserch*.
- Dr. Wehelmina Rumawas, S.Sos, Ms. (2021). *Manajemen Kinerja*.
- Fadhila, L. S., Susilowati, D., Ekonomi, F., & Soedirman, U. J. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021)*.
- Fadhila, N., & Tanjung, J. S. (2022). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Value For Money. *Bursa : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 126–134. <https://doi.org/10.59086/jeb.v1i2.50>
- Gardametro. (2022). *Jalan retak seribu dianggarkan 2,5 M, HPPMKG dan PWI Inhil akan swadaya jika tak terwujud*.
- Gibson, J. L.; Ivancevich, J. M.;; Donnelly, J. H. (2020). *Organizations: Behavior, Structure, Processes* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- Gurhanawan. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Sebagai Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan Pada Kantor Inspektorat Pembantu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3), 125–131.
- Habibi, H., Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 483–489. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75>
- Halim, A.; Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi)*. Salemba Empat.
- Handalilis, K., & Rengga, A. (2025). *Anggaran Belanja Pada Sekretariat Dprd Kabupaten Sikka Tahun 2023*. 8, 3773–3781.
- Herni Syahara, Siti Sarah Fauziah, T. J. A. W. S. A. (2024). Implementasi Dan Peran Teori Stewardship Pada Konteks Penelitian Akuntansi : Studi Literatur Herni. *Penganggaran Perusahaan: Teori Dan Aplikasi*, 3, 4716–4734.
- Hertianti, A., & Nordiawan, D. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Hidayat, R. (2025). *Integration of Maqashid Syariah Values in State Budget Policy : A Conceptual Study of the Indonesian State Budget*. 5(001), 559–567.
- Hotimah, K., & Fattah, V. (2025). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Daerah Kota Palu*. 785–794. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.207>
- Halauw Yuliet Frillia, Elim, I., & Kapojos, P. M. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019 - 2020 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Di Masa Pandemi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1271–1280.
- Ismail, A. G., Hannani, N., Ghafar, A., Sabrina, N., & Rahman, A. (2025). *Islamic Public Finance: How It Matters for Achieving SDGs*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- <https://doi.org/10.13135/2421-2172/10892>
- Jenderal, D., Keuangan, B., & Negeri, K. D. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kadir, N. A., Abdullah, J., & Hasan, W. (2025). *Analisis Pertumbuhan Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendahuluan*. 4(1), 31–37.
- Kartika, Y. (2023). *Kinerja Keuangan Daerah : Tinjauan Rasio Kemandirian , Efektifitas , Efisiensi , dan*. 3(2), 110–119.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019a). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS. Al-Anfal [8]: 27)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019b). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (QS. Al-Hadid [57]: 25)*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Khairudin, Aminah, & Redaputri, A. P. (2020). Pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. *Akuntabel*, 17(1), 148–151.
- Kinerja, A., Dalam, B., & Realisasi, L. (2023). *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (Lra) Pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019-2021*. 12(2), 308–313.
- Komite SAP. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. In *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan* (Issue 71).
- Kusuma, R. H., & Budiwitjaksono, G. S. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja pada Pemerintah Kabupaten Gresik. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, 5(2), 1704–1711. <https://doi.org/10.31539/jomb.v5i2.6115>
- Lambe, K. H., & Patiung, (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan APBD di Sekretariat DPRD Kabupaten Paniai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 1(2), 160–170.
- Langarizadeh, M., Fallahnezhad, M., & Vahabzadeh, A. (2024). Key performance indicators of hospital supply chain: a systematic review. *BMC Health Services Research*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-024-11954-5>
- LiputanOke. (2025). *Banjir rob rendam Tembilahan, banyak kendaraan mogok hingga air masuk rumah warga*.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.
- Mangkunegara, A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- May, G. A., Warongan, J. D. L., Gerungai, N. Y. T., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., & Bahu, J. K. (2022). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado Performance Analysis Of Shopping Budget At The Regional*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Research And Development Planning Agency Of Manado City. 6(1), 6–7.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Natalia Melantika, Imanuel Wellem, & Walter Obon. (2023). Analisis Kinerja Organisasi Dengan Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard Pada Kantor Desa Wolomotong Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka. *Jurnal Projemen UNIPA*, 10(2), 18–36. <https://doi.org/10.59603/projemen.v10i2.27>
- Nugroho, B. S. (2025). Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*.
- Nurain Hakim, Julie Abdullah, W. H. (2023). *Analisis Kinerja Anggaran Belanja Dalam Laporan Keuangan Pendahuluan*. 2(3), 89–96.
- Nurnila Sari, Fahrudin Zain Olilingo, Ivan Rahmat Santoso, Herwin Mopangga, F. H. Y. A. (2025). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara*. 5(2), 273–279.
- Parmenter, D. (2019). *Key Performance Indicators: Developing, Implementing, and Using Winning KPIs*. 4th ed. Wiley.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*.
- Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2025). *Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*.
- Pojok.co. (2024). *Proyek jalan di lahan kosong wilayah Tembilahan tuai kritik, warga pertanyakan skala prioritas*.
- Pongtasik, R. L., & Ronal, M. (2023). *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Toraja Utara Reman*. 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/semnas.v2i1.175>
- PotretNews. (2024). *Jalan di Tembilahan Riau hancur karena dilalui truk bongkar muat*.
- Prasetya, & Indrayeni. (2021). *Analisis implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada dinas pariwisata kota Solok*. 1(1), 89–101. <https://doi.org/10.31603/bacr.4968>
- Purwoko, E ; Wibowo, A; Sari, R. (2023). Key Performance Indicator: Concept, Implementation to Performance Management. *Eurasian Journal of Management and Business*, 118–128.
- Putri, F. (2023). Kinerja Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(3), 18–19.
- Putri, F. C. (2022). *Analisis Rasio Pertumbuhan dan Keserasian pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. 1(02), 171–177.
- Putri, R. M., & Yuliafitri, I. (2024). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Operasional Tahun Anggaran 2019-2022 (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas Di Kota Bandung)*. 4(1).
- Radar Indo. (2024). *Terbengkalai, Plaza Tembilahan jadi sarang hantu*.
- Rahmadini, D., Indriani, R., & Febriana, N. (2024). *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal*. 8, 2783–2795.
- Rahmasari, A. G. (2021). *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 9(3), 77–86.
<https://doi.org/10.26740/akunesa.v9n3.p77-86>
- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2023). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(1), 49.
<https://doi.org/10.35914/jemma.v2i1.142>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004a). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Republik Indonesia. (2004b). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Riau Akses. (2024). *Kondisi pasar memprihatinkan, pedagang terpaksa berjualan di reruntuhan bangunan*.
- Ridwan, & Nawir, I. S. (2021). *Buku Ekonomi Publik*.
- Rinaldi Rinaldi, Alawi Parkindungan Hasibuan, Putri Kemala Dewi Lubis, & Jelita Simanungkalit. (2024). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021-2023. *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 32–41.
<https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.627>
- Rivatul, A., Handayani, S., Oktavia Putri, M., Yunia Dwitara, H., & Puspasari, A. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Pemerintahan Di Kota Bekasi Tahun 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 7(2), 279–286.
<https://doi.org/10.57093/metansi.v7i2.274>
- Sahrudin. (2022). *Mengukur Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Oleh*. 1(7), 1903–1912.
- Saputra, E., Latif, I. N., & Haryadi, R. M. (2020). *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur*. 1–11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Saputra, R., Ramziah, R., & Akmal, S. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Pidie. *Jurnal Mafebis*, 2(3). <https://doi.org/10.47647/MAFEBIS.v2i2.590>
- Sedarmayanti. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama.
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). *Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara*. 14, 1–12.
- Sihotang, D. T., Mollet, J. A., & Hutajulu, H. (2025). *Pengaruh Efektivitas PAD , Kemandirian Keuangan Daerah , Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Provinsi Papua Pegunungan*. 3(1), 1–9.
- Siktania Maria Dilliana, S.Akun., M.Si., Ak Henrikus Herdi, SE., M. S. . (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*.
- Siti Sriningsih, Bq. Ismiwati, M. S. (2021). Jurnal Kompetitif : Media Informasi Ekonomi Pembangunan , Manajemen dan Akuntansi. *Jurnal Kompetitif*, 7(1), 39–55.
- Sugeha, F. F., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2025). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2011-2013. *Accountability*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.32400/ja.8420.4.1.2015.131-139>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); Edisi Kedu). Alfabeta.
- Taruni, P., & Diatmika, I. P. G. (2025). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Badung Tahun 2020-2024. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 16(02), 308–318.
- Tran7 Riau. (2025). *Banjir rob tahunan kembali genangi ruas jalan Tembilahan, BPBD Inhil perketat patroli dan peringatan dini*.
- Tumija, Hakiki Doni, I., & Agustina. (2023). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Author : Affiliation : Diagram Pencar hasil analisis Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, Vol.10, No, 56–78.
- UJDIH BPK. (2019). *Tinjauan Hukum Tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019: Vol. Tulisan Hu* (Issue 2019).
- Winanti, N. R., Akuntansi, P. S., Studi, P., Akuntansi, K., & Bandung, U. T. (2025). *Analisis kinerja dan sektor strategis belanja daerah: studi kasus di sekretariat dprd provinsi jawa tengah*. 1–8.
- Wulandari, P., Ramadhan, P. R., & Tripriyono, A. (2025). *Economics and Digital Business Review Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2020*. 6(2), 1123–1132.



© Hak ci

Hak Cipta Diili

1. Dilarang m

a. Pengutip

b. Pengutipan tidak mengu

2. Dilarang mengu

LAMPIRAN

Lampiran 1: Rincian Target dan Realisasi Pendapatan 9 OPD (2022–2024)

No	Nama OPD	Target 2022	Realisasi 2022	%	Target 2023	Realisasi 2023	%	Target 2024	Realisasi 2024	%
1	BAPENDA	45.755.457.247	42.094.882.644	92,00%	47.577.957.247	48.403.409.250	101,73%	62.607.500.000	47.048.850.037	75,15%
2	BKAD	1.787.085.069.682	1.751.781.082.482	98,02%	1.881.833.172.636	1.930.123.772.971	102,57%	1.989.535.268.408	1.869.764.878.893	93,98%
3	DINKES	37.122.879.156	25.592.565.954	68,94%	36.971.077.457	31.347.366.975	84,79%	104.411.001.260	113.635.419.306	108,83%
4	DISHUB	826.000.000	840.003.000	101,70%	921.000.000	801.481.300	87,02%	810.000.000	1.606.980.486	198,39%
5	PUTR	820.000.000	455.753.000	55,58%	820.000.000	669.835.900	81,69%	820.000.000	2.119.176.170	258,44%
6	PERIKANAN	84.250.000	1.200.000	1,42%	84.500.000	2.100.000	2,49%	84.000.000	3.150.000	3,75%
7	DINSOS	80.000.000	61.110.000	76,39%	80.000.000	61.110.000	76,39%	80.000.000	61.110.000	76,39%
8	PANGAN (DTPH)	23.950.000	13.500.000	56,37%	23.950.000	11.980.000	50,02%	23.750.000	18.100.000	76,21%
9	SETDA	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0	61.800.000	100,00%
TOTAL		1.871.930.416.085	1.820.972.907.080	97,28%	1.968.311.657.340	2.011.421.056.396	102,19%	2.158.433.319.668	2.034.319.464.892	94,25%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing OPD (Data Diolah oleh peneliti, 2025)



Lampiran 2: Rincian Target dan Realisasi Belanja 14 OPD (2022–2024)

No	Nama OPD	Tahun	Anggaran Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	% Total	Anggaran Belanja Operasi	Realisasi Belanja Operasi	% Operasi	Anggaran Belanja Modal	Realisasi Belanja Modal	% Modal
1	BAPENDA	2022	15.650.989.173	12.622.797.022	80,65%	15.333.739.173	12.321.631.022	80,36%	317.250.000	301.166.000	94,93%
		2023	17.569.941.421	14.151.354.516	80,54%	17.253.861.361	13.861.950.656	80,34%	316.080.060	289.403.860	91,56%
		2024	16.328.396.331	13.976.421.122	85,60%	16.328.396.331	13.626.698.750	83,45%	356.675.898	349.722.372	98,05%
2	BKAD	2022	42.621.425.954	18.316.981.765	42,98%	18.144.482.119	16.082.431.087	88,64%	34.000.000	29.875.000	87,87%
		2023	29.136.232.840	21.666.911.916	74,36%	27.600.032.840	20.323.098.898	73,63%	1.536.200.000	1.343.813.018	87,48%
		2024	33.341.537.206	26.008.110.300	78,01%	29.092.077.977	23.342.770.144	80,24%	1.580.000.000	1.507.355.000	95,40%
3	DINKES	2022	241.337.782.182	210.038.097.582	87,03%	219.584.170.478	191.832.480.053	87,36%	21.753.611.704	18.205.617.529	83,69%
		2023	264.050.504.770	214.884.206.939	81,38%	230.417.607.099	192.818.503.289	83,68%	33.632.897.671	22.065.703.650	65,61%
		2024	387.001.898.677	334.922.262.351	86,54%	354.767.800.760	316.810.294.246	89,30%	32.234.097.917	18.111.968.104	56,19%
4	DISHUB	2022	13.510.216.687	11.751.630.167	86,98%	10.618.576.687	9.209.079.925	86,73%	2.891.640.000	2.542.550.242	87,93%
		2023	18.593.749.339	15.188.424.497	81,69%	13.353.749.199	11.111.208.593	83,21%	5.240.000.140	4.077.215.904	77,81%
		2024	25.105.228.182	18.541.072.642	73,85%	19.104.819.782	14.013.420.431	73,35%	6.000.408.400	4.527.652.211	75,46%
5	PUTR	2022	130.973.244.188	103.125.954.332	78,74%	61.137.929.048	54.686.679.658	89,45%	69.835.315.140	48.439.274.674	69,36%
		2023	184.127.373.870	120.756.594.185	65,58%	67.667.761.246	58.963.699.825	87,14%	116.459.612.624	61.792.894.360	53,06%
		2024	209.749.928.423	149.015.511.687	71,04%	60.263.383.734	43.673.450.429	72,47%	149.486.544.689	105.342.061.258	70,47%
6	PERIKANAN	2022	14.532.590.173	11.608.518.719	79,88%	13.292.234.673	10.738.179.979	80,79%	1.240.355.500	870.338.740	70,17%
		2023	18.641.676.070	11.400.946.107	61,16%	18.236.176.070	11.246.002.107	61,67%	405.500.000	154.944.000	38,21%
		2024	7.606.614.344	6.352.718.107	83,52%	7.552.243.744	6.300.475.957	83,43%	54.370.600	52.242.150	96,09%
7	DINSOS	2022	17.973.157.238	15.685.675.106	87,27%	17.894.557.238	15.607.921.106	87,22%	78.600.000	77.754.000	98,92%
		2023	11.388.402.642	8.737.994.216	76,73%	11.267.502.642	8.623.061.786	76,53%	120.900.000	114.932.430	95,06%
		2024	9.912.630.769	6.821.998.530	68,82%	9.845.392.216	6.792.807.730	68,99%	67.238.553	29.190.800	43,41%
8	PANGAN	2022	28.016.847.075	25.143.441.369	89,74%	27.365.147.075	24.563.477.269	89,76%	651.700.000	579.964.100	88,99%
		2023	31.720.755.449	24.764.464.488	78,07%	29.397.115.449	23.361.698.873	79,47%	2.323.640.000	1.402.765.615	60,37%
		2024	18.029.471.035	13.824.800.487	76,68%	18.029.471.035	13.824.800.487	76,68%	-	-	0,00%
9	PERKEBUNAN	2022	24.621.066.182	20.485.444.377	83,20%	24.163.167.747	20.064.913.527	83,04%	457.898.435	420.530.850	91,84%
		2023	41.992.966.125	31.853.702.451	75,85%	36.024.784.125	26.646.153.961	73,97%	5.968.182.000	5.207.548.490	87,26%
		2024	29.992.135.300	21.722.942.048	72,43%	29.925.644.700	21.657.751.748	72,37%	66.490.600	65.190.300	98,04%
10	SETDA	2022	83.404.074.220	78.825.008.604	94,51%	82.689.644.220	78.133.693.302	94,49%	714.430.000	691.315.302	96,76%
		2023	100.890.371.578	87.646.075.320	86,87%	99.996.471.578	87.009.906.990	87,01%	893.900.000	636.168.330	71,17%
		2024	92.165.377.837	83.504.167.740	90,60%	91.540.763.676	82.892.441.766	90,55%	624.614.161	611.725.974	97,94%
11	PENDIDIKAN	2022	601.127.749.901	561.224.946.102	93,36%	556.308.462.901	525.335.472.036	94,43%	44.819.287.000	35.889.474.066	80,08%
		2023	643.846.476.990	596.048.541.775	92,58%	602.073.307.374	558.780.516.374	92,81%	41.773.169.616	37.268.025.401	89,22%
		2024	782.055.692.439	666.216.687.089	85,19%	718.017.016.193	601.466.545.681	83,77%	64.038.676.246	64.750.141.407	101,11%
12	PERKIM	2022	49.744.771.273	45.813.073.980	92,10%	27.972.053.873	25.096.359.888	89,72%	21.772.717.400	20.716.714.092	95,15%
		2023	70.665.756.681	58.816.968.809	83,23%	33.545.666.681	28.474.868.809	84,88%	37.120.090.000	30.342.100.000	81,74%
		2024	60.407.949.822	47.979.420.649	79,43%	30.718.224.547	22.640.614.649	73,70%	29.689.725.275	25.338.806.000	85,35%
13	DPMPTSP	2022	11.591.690.054	8.731.051.822	75,32%	8.108.990.054	7.264.553.194	89,59%	3.482.700.000	1.466.498.628	42,11%
		2023	16.069.040.633	9.463.706.008	58,89%	12.781.040.633	9.268.006.008	72,51%	3.288.000.000	195.700.000	5,95%
		2024	10.667.312.000	8.716.440.167	81,71%	10.667.312.000	8.716.440.167	81,71%	-	-	0,00%
14	SETWAN	2022	94.338.311.255	94.330.305.245	99,99%	91.529.933.463	91.529.933.463	100,00%	2.808.377.792	2.800.371.782	99,71%
		2023	131.550.136.318	106.686.829.992	81,10%	125.238.636.318	104.826.098.312	83,70%	6.311.500.000	1.860.731.680	29,48%
		2024	123.091.168.435	99.603.354.383	80,92%	120.982.481.454	98.836.360.853	81,69%	2.108.688.081	766.943.530	36,37%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing OPD (Data Diolah oleh peneliti,2025)



Lampiran 3: Efektivitas Pendapatan

OPD	2022				2023				2024			
	Realisasi Pendapatan	Target Anggaran Pendapatan	100%	Total	Realisasi Pendapatan	Target Anggaran Pendapatan	100%	Total	Realisasi Pendapatan	Target Anggaran Pendapatan	100%	Total
BAPENDA	42.094.882.644	45.755.457.247	100%	92,00%	48.403.409.250	47.577.957.247	100%	101,73%	47.048.850.037	62.607.500.000	100%	75,15%
BKAD	1.751.781.082.482	1.787.085.069.682	100%	98,02%	1.930.123.772.971	1.881.833.172.636	100%	102,57%	1.869.764.978.893	1.989.535.286.408	100%	93,98%
DINKES	25.592.565.954	37.122.879.156	100%	68,94%	31.347.366.975	36.971.077.457	100%	84,79%	113.635.419.306	104.411.001.260	100%	108,83%
DISHUB	840.003.000	826.000.000	100%	101,70%	801.481.300	921.000.000	100%	87,02%	1.606.980.486	810.000.000	100%	198,39%
PUTR	455.753.000	820.000.000	100%	55,58%	669.835.900	820.000.000	100%	81,69%	2.119.176.170	820.000.000	100%	258,44%
PERIKANAN	1.200.000	84.250.000	100%	1,42%	2.100.000	84.500.000	100%	2,49%	3.150.000	84.000.000	100%	3,75%
DINSOS	61.110.000	80.000.000	100%	76,39%	61.110.000	80.000.000	100%	76,39%	61.110.000	80.000.000	100%	76,39%
PANGAN (DTPHP)	13.500.000	23.950.000	100%	56,37%	11.980.000	23.950.000	100%	50,02%	18.100.000	23.750.000	100%	76,21%
SETDA	0	0	100%	100%	0	0	100%	100%	61.800.000	-	100%	100%
TOTAL	1.820.840.097.080	1.871.797.606.085	100%	97,28%	2.011.421.056.396	1.968.311.657.340	100%	102,19%	2.034.319.564.892	2.158.371.537.668	100%	94,25%

Sumber: Diolah Peneliti 2025

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

tanpa mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Lampiran 4: Efektivitas Belanja

OPD	2022				2023				2024			
	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	100%	Total	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	100%	Total	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	100%	Total
BAPENDA	12.622.797.022	15.650.989.173	100%	80,65%	14.151.354.516	17.569.941.421	100%	80,54%	13.976.421.122	16.328.396.331	100%	85,60%
BKAD	18.316.981.765	42.621.425.954	100%	42,98%	21.666.911.916	29.136.232.840	100%	74,36%	26.008.110.300	33.341.537.206	100%	78,01%
DINKES	210.038.097.582	241.337.782.182	100%	87,03%	214.884.206.939	264.050.504.770	100%	81,38%	334.922.262.351	387.001.898.677	100%	86,54%
DISHUB	11.751.630.167	13.510.216.687	100%	86,98%	15.188.424.497	18.593.749.339	100%	81,69%	18.541.072.642	25.105.228.182	100%	73,85%
PUTR	103.125.954.332	130.973.244.188	100%	78,74%	120.756.594.185	184.127.373.870	100%	65,58%	149.015.511.687	209.749.928.423	100%	71,04%
PERIKANAN	11.608.518.719	14.532.590.173	100%	79,88%	11.400.946.107	18.641.676.070	100%	61,16%	6.352.718.107	7.606.614.344	100%	83,52%
DINSOS	15.685.675.106	17.973.157.238	100%	87,27%	8.737.994.216	11.388.402.642	100%	76,73%	6.821.998.530	9.912.630.769	100%	68,82%
PANGAN (DTPHP)	25.143.441.369	28.016.847.075	100%	89,74%	24.764.464.488	31.720.755.449	100%	78,07%	13.824.800.487	18.029.471.035	100%	76,68%
PERKEBUNAN	20.485.444.377	24.621.066.182	100%	83,20%	31.853.702.451	41.992.966.125	100%	75,85%	21.722.942.048	29.992.135.300	100%	72,43%
SETDA	78.825.008.604	83.404.074.220	100%	94,51%	87.646.075.320	100.890.371.578	100%	86,87%	83.504.167.740	92.165.377.837	100%	90,60%
PENDIDIKAN	561.224.946.102	601.127.749.901	100%	93,36%	596.048.541.775	643.846.476.990	100%	92,58%	666.216.687.089	782.055.692.439	100%	85,19%
PERKIM	45.813.073.980	49.744.771.273	100%	92,10%	58.816.968.809	70.665.756.681	100%	83,23%	47.979.420.649	60.407.949.822	100%	79,43%
DPMPTSP	8.731.051.822	11.591.690.054	100%	75,32%	9.463.706.008	16.069.040.633	100%	58,89%	8.716.440.167	10.667.312.000	100%	81,71%
SETWAN	94.330.305.245	94.338.311.255	100%	99,99%	106.686.829.992	131.550.136.318	100%	81,10%	99.603.354.383	123.091.168.435	100%	80,92%
TOTAL	1.217.702.926.192	1.369.443.915.555	100%	88,92%	1.322.066.721.219	1.580.243.384.726	100%	83,66%	1.497.205.907.302	1.805.455.340.800	100%	82,93%

Sumber: Diolah Peneliti 2025

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan lain yang sah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Halaman | Undang-Undang

Lampiran 5: Pertumbuhan Pendapatan

OPD	Pertumbuhan 2022				Pertumbuhan 2023				Pertumbuhan 2024			
	Pn 2022	Po 2021	Po 2021	Total	Pn 2023	Po 2022	Po 2022	Total	Pn 2024	Po 2023	Po 2023	Total
BAPENDA	42.094.882.645	44.246.826.288	44.246.826.288	-4,86%	48.403.409.250	42.094.882.645	42.094.882.645	14,99%	47.048.850.037	48.403.409.250	48.403.409.250	-2,80%
BKAD	1.751.781.082.483	1.777.394.989.592	1.777.394.989.592	-1,44%	1.930.123.772.971	1.751.781.082.483	1.751.781.082.483	10,18%	1.869.764.878.893	1.930.123.772.971	1.930.123.772.971	-3,13%
DINKES	25.592.565.955	27.698.871.081	27.698.871.081	-7,60%	31.347.366.975	25.592.565.955	25.592.565.955	22,49%	113.635.419.306	31.347.366.975	31.347.366.975	262,50%
DISHUB	840.003.001	1.058.925.000	1.058.925.000	-20,67%	801.481.300	840.003.001	840.003.001	-4,59%	1.606.980.486	801.481.300	801.481.300	100,50%
PETRA	455.753.001	1.092.240.850	1.092.240.850	-58,27%	669.835.900	455.753.001	455.753.001	46,97%	2.119.176.170	669.835.900	669.835.900	216,37%
PERIKANAN	1.200.001	2.750.000	2.750.000	-56,36%	2.100.000	1.200.001	1.200.001	75,00%	3.150.000	2.100.000	2.100.000	50,00%
DINSOS	61.110.001	60.000.000	60.000.000	1,85%	61.110.000	61.110.001	61.110.001	0,00%	61.110.000	61.110.000	61.110.000	0,00%
PANGAN (DPPH)	13.500.001	15.650.000	15.650.000	-13,74%	11.980.000	13.500.001	13.500.001	-11,26%	18.100.000	11.980.000	11.980.000	51,09%
SETDA	0	0	0	0	0	0	0	0	61.800.000	0	0	100,00%
TOTAL	1.820.840.097.088	1.851.570.252.811	1.851.570.252.811	-1,66%	2.011.421.056.396	1.820.840.097.088	1.820.840.097.088	10,47%	2.034.319.464.892	2.011.421.056.396	2.011.421.056.396	1,14%

Sumber: Diolah Peneliti 2025

Lampiran 6: Pertumbuhan Belanja

OPD	Pertumbuhan 2022					Pertumbuhan 2023					Pertumbuhan 2024				
	Realisasi Blj Thn t	Realisasi Blj t-1	Realisasi Blj t-1	100%	Total	Realisasi Blj Thn t	Realisasi Blj t-1	Realisasi Blj t-1	100%	Total	Realisasi Blj Thn t	Realisasi Blj t-1	Realisasi Blj t-1	100%	Total
BAPENDA	12,622,797,022	11,285,839,880	11,285,839,880	100%	11.85%	14,151,354,516	12,622,797,022	12,622,797,022	100%	12.11%	13,976,421,122	14,151,354,516	14,151,354,516	100%	-1.24%
BKAD	18,316,981,765	20,161,414,080	20,161,414,080	100%	-9.15%	21,666,911,916	18,316,981,765	18,316,981,765	100%	18.29%	26,008,110,300	21,666,911,916	21,666,911,916	100%	20.04%
DINKES	210,038,097,582	227,298,040,966	227,298,040,966	100%	-7.59%	214,884,206,939	210,038,097,582	210,038,097,582	100%	2.31%	334,922,262,351	214,884,206,939	214,884,206,939	100%	55.86%
DISHUB	11,751,630,167	11,233,161,117	11,233,161,117	100%	4.62%	15,188,424,497	11,751,630,167	11,751,630,167	100%	29.25%	18,541,072,642	15,188,424,497	15,188,424,497	100%	22.07%
PUER	103,125,954,332	54,187,437,990	54,187,437,990	100%	90.31%	120,756,594,185	103,125,954,332	103,125,954,332	100%	17.10%	149,015,511,687	120,756,594,185	120,756,594,185	100%	23.40%
PERIKANA	11,608,518,719	10,645,588,299	10,645,588,299	100%	9.05%	11,400,946,107	11,608,518,719	11,608,518,719	100%	-1.79%	6,352,718,107	11,400,946,107	11,400,946,107	100%	-44.28%
DINSOS	15,685,675,106	11,210,699,247	11,210,699,247	100%	39.92%	8,737,994,216	15,685,675,106	15,685,675,106	100%	-44.29%	6,821,998,530	8,737,994,216	8,737,994,216	100%	-21.93%
PANGAN (DTPHP)	25,143,441,369	18,135,832,302	18,135,832,302	100%	38.64%	24,764,464,488	25,143,441,369	25,143,441,369	100%	-1.51%	13,824,800,487	24,764,464,488	24,764,464,488	100%	-44.17%
PERKEBUN	20,485,444,377	17,201,911,799	17,201,911,799	100%	19.09%	31,853,702,451	20,485,444,377	20,485,444,377	100%	55.49%	21,722,942,048	31,853,702,451	31,853,702,451	100%	-31.80%
SETDA	78,825,008,604	70,587,015,549	70,587,015,549	100%	11.67%	87,646,075,320	78,825,008,604	78,825,008,604	100%	11.19%	83,504,167,740	87,646,075,320	87,646,075,320	100%	-4.73%
PENDIDIKA	561,224,946,102	577,802,726,836	577,802,726,836	100%	-2.87%	596,048,541,775	561,224,946,102	561,224,946,102	100%	6.20%	666,216,687,089	596,048,541,775	596,048,541,775	100%	11.77%
PERKIM	45,813,073,980	50,314,609,951	50,314,609,951	100%	-8.95%	58,816,968,809	45,813,073,980	45,813,073,980	100%	28.38%	47,979,420,649	58,816,968,809	58,816,968,809	100%	-18.43%
DPMTSP	8,731,051,822	6,072,884,218	6,072,884,218	100%	43.77%	9,463,706,008	8,731,051,822	8,731,051,822	100%	8.39%	8,716,440,167	9,463,706,008	9,463,706,008	100%	-7.90%
SETWAN	94,330,305,245	73,463,897,550	73,463,897,550	100%	28.40%	106,686,829,992	94,330,305,245	94,330,305,245	100%	13.10%	99,603,354,383	106,686,829,992	106,686,829,992	100%	-6.64%
TOTAL	1,217,702,926,192	1,159,601,059,784	1,159,601,059,784	100%	5.01%	1,322,066,721,219	1,217,702,926,192	1,217,702,926,192	100%	8.57%	1,497,205,907,302	1,322,066,721,219	1,322,066,721,219	100%	13.25%

Sumber: Diolah Peneliti 2025



Lampiran 7: Efisiensi Belanja

OPD	2022				2023				2024			
	Realisasi Anggaran Belanja Operasi	Anggaran Belanja Daerah	100%	Total	Realisasi Anggaran Belanja Operasi	Anggaran Belanja Daerah	100%	Total	Realisasi Anggaran Belanja Operasi	Anggaran Belanja Daerah	100%	Total
BAPENDA	15.333.739.173	15.650.989.173	100%	97,97%	17.253.861.361	17.569.941.421	100%	98,20%	16.328.396.331	16.328.396.331	100%	100,00%
BKAD	18.144.482.119	42.621.425.954	100%	42,57%	27.600.032.840	29.136.232.840	100%	94,73%	29.092.077.977	33.341.537.206	100%	87,25%
DINKES	219.584.170.478	241.337.782.182	100%	90,99%	230.417.607.099	264.050.504.770	100%	87,26%	354.767.800.760	387.001.898.677	100%	91,67%
DISHUB	10.618.576.687	13.510.216.687	100%	78,60%	13.353.749.199	18.593.749.339	100%	71,82%	19.104.819.782	25.105.228.182	100%	76,10%
PUTR	61.137.929.048	130.973.244.188	100%	46,68%	67.667.761.246	184.127.373.870	100%	36,75%	60.263.383.734	209.749.928.423	100%	28,73%
PERIKANAN	13.292.234.673	14.532.590.173	100%	91,47%	18.236.176.070	18.641.676.070	100%	97,82%	7.552.243.744	7.606.614.344	100%	99,29%
DINSOS	17.894.557.238	17.973.157.238	100%	99,56%	11.267.502.642	11.388.402.642	100%	98,94%	9.845.392.216	9.912.630.769	100%	99,32%
PANGAN (DTPHP)	27.365.147.075	28.016.847.075	100%	97,67%	29.397.115.449	31.720.755.449	100%	92,67%	18.029.471.035	18.029.471.035	100%	100,00%
PERKEBUNAN	24.163.167.747	24.621.066.182	100%	98,14%	36.024.784.125	41.992.966.125	100%	85,79%	29.925.644.700	29.992.135.300	100%	99,78%
SETDA	82.689.644.220	83.404.074.220	100%	99,14%	99.996.471.578	100.890.371.578	100%	99,11%	91.540.763.676	92.165.377.837	100%	99,32%
PENDIDIKAN	556.308.462.901	601.127.749.901	100%	92,54%	602.073.307.374	643.846.476.990	100%	93,51%	718.017.016.193	782.055.692.439	100%	91,81%
PERKIM	27.972.053.873	49.744.771.273	100%	56,23%	33.545.666.681	70.665.756.681	100%	47,47%	30.718.224.547	60.407.949.822	100%	50,85%
DPMPTSP	8.108.990.054	11.591.690.054	100%	69,96%	12.781.040.633	16.069.040.633	100%	79,54%	10.667.312.000	10.667.312.000	100%	100,00%
SETWAN	91.529.933.463	94.338.311.255	100%	97,02%	125.238.636.318	131.550.136.318	100%	95,20%	120.982.481.454	123.091.168.435	100%	98,29%
TOTAL	1.174.143.088.749	1.369.443.915.555	100%	85,74%	1.324.853.712.615	1.580.243.384.726	100%	83,84%	1.516.835.028.149	1.805.455.340.800	100%	84,01%

Sumber: Diolah Peneliti 2025

1. Hal
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Lampiran 8: Kerasian Belanja Operasi

OPD	2022				2023				2024			
	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	100%	Total	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	100%	Total	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	100%	Total
BAPENDA	12321631022	12.622.797.022	100%	97,61%	13.861.950.656	14.151.354.516	100%	97,95%	13.626.698.750	13.976.421.122	100%	97,50%
BKAD	16.082.431.087	18.316.981.765	100%	87,80%	20.323.098.898	21.666.911.916	100%	93,80%	23.342.770.144	26.008.110.300	100%	89,75%
DINKES	191.832.480.053	210.038.097.582	100%	91,33%	192.818.503.289	214.884.206.939	100%	89,73%	316.810.294.246	334.922.262.351	100%	94,59%
DISHUB	9.209.079.925	11.751.630.167	100%	78,36%	11.111.208.593	15.188.424.497	100%	73,16%	14.013.420.431	18.541.072.642	100%	75,58%
PUTR	10.738.179.979	103.125.954.332	100%	10,41%	11.246.002.107	120.756.594.185	100%	9,31%	6.300.475.957	149.015.511.687	100%	4,23%
PERIKANAN	15.607.921.106	11.608.518.719	100%	134,45%	8.623.061.786	11.400.946.107	100%	75,63%	6.792.807.730	6.352.718.107	100%	106,93%
DINSOS	54.686.679.658	15.685.675.106	100%	348,64%	58.963.699.825	8.737.994.216	100%	674,80%	43.673.450.429	6.821.998.530	100%	640,19%
PANGAN (DTPHP)	24.563.477.269	25.143.441.369	100%	97,69%	23.361.698.873	24.764.464.488	100%	94,34%	13.824.800.487	13.824.800.487	100%	100,00%
PERKEBUNAN	20.064.913.527	20.485.444.377	100%	97,95%	26.646.153.961	31.853.702.451	100%	83,65%	21.657.751.748	21.722.942.048	100%	99,70%
SETDA	78.133.693.302	78.825.008.604	100%	99,12%	87.009.906.990	87.646.075.320	100%	99,27%	82.892.441.766	83.504.167.740	100%	99,27%
PENDIDIKAN	525.335.472.036	561.224.946.102	100%	93,61%	558.780.516.374	596.048.541.775	100%	93,75%	601.466.545.681	666.216.687.089	100%	90,28%
PERKIM	25.096.359.888	45.813.073.980	100%	54,78%	28.474.868.809	58.816.968.809	100%	48,41%	22.640.614.649	47.979.420.649	100%	47,19%
DPMPSTP	7.264.553.194	8.731.051.822	100%	83,20%	9.268.006.008	9.463.706.008	100%	97,93%	8.716.440.167	8.716.440.167	100%	100,00%
SETWAN	91.529.933.463	94.330.305.245	100%	97,03%	104.826.098.312	106.686.829.992	100%	98,26%	98.836.360.853	99.603.354.383	100%	99,23%
TOTAL	1.082.466.805.509	1.217.702.926.192	100%	88,89%	1.155.314.774.481	1.322.066.721.219	100%	87,39%	1.274.594.873.038	1.497.205.907.302	100%	85,13%

Sumber: Diolah Peneliti 2025

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan lain yang bersifat akademis.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 9: Kerasian Belanja Modal

OPD	2022				2023				2024			
	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	100%	Total	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	100%	Total	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	100%	Total
BAPENDA	301.166.000	12.622.797.022	100%	2,39%	289.403.860	14.151.354.516	100%	2,05%	349.722.372	13.976.421.122	100%	2,50%
BKAD	29.875.000	18.316.981.765	100%	0,16%	1.343.813.018	21.666.911.916	100%	6,20%	1.507.355.000	26.008.110.300	100%	5,80%
DINKES	18.205.617.529	210.038.097.582	100%	8,67%	22.065.703.650	214.884.206.939	100%	10,27%	18.111.968.104	334.922.262.351	100%	5,41%
DISHUB	2.542.550.242	11.751.630.167	100%	21,64%	4.077.215.904	15.188.424.497	100%	26,84%	4.527.652.211	18.541.072.642	100%	24,42%
PUTR	48.439.274.674	103.125.954.332	100%	46,97%	61.792.894.360	120.756.594.185	100%	51,17%	105.342.061.258	149.015.511.687	100%	70,69%
PERIKANAN	870.338.740	11.608.518.719	100%	7,50%	154.944.000	11.400.946.107	100%	1,36%	52.242.150	6.352.718.107	100%	0,82%
DINSOS	77.754.000	15.685.675.106	100%	0,50%	114.932.430	8.737.994.216	100%	1,32%	29.190.800	6.821.998.530	100%	0,43%
PANGAN (DTPHP)	579.964.100	25.143.441.369	100%	2,31%	1.402.765.615	24.764.464.488	100%	5,66%	-	13.824.800.487	100%	0,00%
PERKEBUNAN	420.530.850	20.485.444.377	100%	2,05%	5.207.548.490	31.853.702.451	100%	16,35%	65.190.300	21.722.942.048	100%	0,30%
SETDA	691.315.302	78.825.008.604	100%	0,88%	636.168.330	87.646.075.320	100%	0,73%	611.725.974	83.504.167.740	100%	0,73%
PENDIDIKAN	35.889.474.066	561.224.946.102	100%	6,39%	37.268.025.401	596.048.541.775	100%	6,25%	64.750.141.407	666.216.687.089	100%	9,72%
PERKIM	20.716.714.092	45.813.073.980	100%	45,22%	30.342.100.000	58.816.968.809	100%	51,59%	25.338.806.000	47.979.420.649	100%	52,81%
DPMPPTSP	1.466.498.628	8.731.051.822	100%	16,80%	195.700.000	9.463.706.008	100%	2,07%	-	8.716.440.167	100%	0,00%
SETWAN	2.800.371.782	94.330.305.245	100%	2,97%	1.860.731.680	106.686.829.992	100%	1,74%	766.943.530	99.603.354.383	100%	0,77%
TOTAL	133.031.445.005	1.217.702.926.192	100%	10,92%	166.751.946.738	1.322.066.721.219	100%	12,61%	221.452.999.106	1.497.205.907.302	100%	14,79%

Sumber: Diolah Peneliti 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, dan sebagainya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 10: Dokumentasi

OPD	Narasumber	Dokumentasi
11/12/2025 BKAD (Permintaan Data)	Ibu Wulan	
27/01/2026 BAPENDA	Pak Guzali	
15/01/2026 BKAD	Pak Andrey Alfarizi	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12/01/2026 DINKES	Pak Rama	
27/01/2026 DISHUB	Pak Iman	
19/01/2026 PUTR	Pak Yusnaldi	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14/01/2026 PERIKANAN	Pak M. Taufik	
21/01/2026 DINSOS	Ibu Zahra Diannisa	
13/01/2026 PANGAN (DTPHP)	Pak Benny Murdhani	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13/01/2026 PERKEBUNAN	Pak Surya	
13/01/2026 SETDA	Pak Revilion Tijar Pak Sukatno	
22/01/2026 PENDIDIKAN	Ibu Yasinta	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19/01/2026 PERKIM	Pak Yusnaldi	
19/01/2026 DPMPTSP	Pak Apridoni	
21/01/2026 SETWAN	Pak Supriyadi	

Sumber: Diolah Peneliti 2026

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 11: Teks Wawancara

Nama – Nama OPD Dan Fungsinya

No	OPD	Fungsi Utama bagi Rakyat	Manfaat Langsung bagi Masyarakat
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR)	Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, serta pengendalian banjir	Mengurangi banjir, memperlancar mobilitas, dan mendukung aktivitas ekonomi
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM)	Penyediaan perumahan layak, air bersih, sanitasi, dan penataan kawasan	Meningkatkan kualitas hunian dan kesehatan lingkungan
3	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah	Meningkatkan kualitas SDM dan pemerataan pendidikan
4	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelolaan fasilitas kesehatan	Meningkatkan derajat kesehatan dan akses layanan medis
5	Dinas Perhubungan	Pengelolaan transportasi darat dan perairan	Menjamin keselamatan dan kelancaran transportasi masyarakat
6	Dinas Perikanan	Pembinaan dan pemberdayaan nelayan serta pengelolaan perikanan	Meningkatkan pendapatan nelayan dan ketahanan pangan
7	Dinas Pangan	Menjaga ketersediaan, distribusi, dan stabilitas pangan	Menjamin ketahanan pangan dan stabilitas harga
8	Dinas Perkebunan	Pengembangan dan perlindungan komoditas perkebunan rakyat	Meningkatkan kesejahteraan petani dan ekonomi pedesaan
9	Dinas Sosial	Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan	Melindungi masyarakat miskin dan korban bencana
10	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	Pengelolaan keuangan dan aset daerah	Menjamin APBD dan aset digunakan untuk kepentingan public
11	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	Pengelolaan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah	Menyediakan sumber pembiayaan pembangunan daerah
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi	Menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi
13	Sekretariat Daerah (SETDA)	Koordinasi kebijakan dan administrasi pemerintahan daerah	Menjamin kebijakan daerah berjalan efektif
14	Sekretariat DPRD (SETWAN)	Dukungan administratif DPRD	Memperkuat fungsi pengawasan dan aspirasi rakyat

Text Narasi Wawancara Kepada Masyarakat

Topik: Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Infrastruktur, Fasilitas Pendidikan, dan Pengelolaan Aset Publik di Kabupaten Indragiri Hilir

1) Pendahuluan (pembukaan wawancara)

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Perkenalkan, nama saya Herzela Maydea Sahara, mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan penelitian skripsi mengenai Analisis Rasio Kerasian Belanja Modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

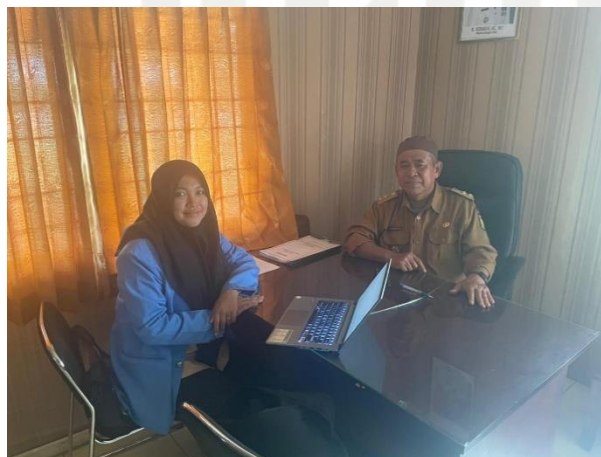
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Wawancara ini bertujuan untuk mendengarkan secara langsung pengalaman dan pendapat Bapak/Ibu sebagai masyarakat terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas publik yang dirasakan sehari-hari. Seluruh jawaban Bapak/Ibu bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Narasumber pertama : Pak Lurah Pekan Arba, Pak Rahman Hadi



12/Januari/2026

2) Fenomena Banjir Rob Dan Kondisi Infrastruktur Jalan

Konteks Penelitian: Data Laporan Realisasi Anggaran menunjukkan alokasi belanja infrastruktur yang besar, namun di lapangan masih sering terjadi banjir rob dan kerusakan jalan.

Pertanyaan:

1. Bagaimana dampak banjir rob yang terjadi hampir setiap tahun terhadap aktivitas sehari-hari Bapak/Ibu (bekerja, berdagang, sekolah anak, atau akses layanan)?

Narasumber: Ya, sementara banjir memang banjir tahunan pasti ada. Terus sekarang sudah mulai berkurang karena kita sudah bersihkan parit. Kuncinya di parit-parit itu. Ya sebetulnya kalau dikatakan menghambat, ya menghambat. Tapi itu memang sudah menjadi kebiasaan kami orang Tembilahan. Masih terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banjir itu pasti tahunan itu pasti ada. Cuma terkadang kita saja yang terkadang lalai. Kalau dulu kan kita punya parit-parit bersih, sekarang paritnya sudah nggak bersih lagi. Kuncinya sekarang ada di parit-parit. Intinya kan karena parit yang sudah dibersihkan, ya pasti air cepat surut lah. Berkurang lah ya, Pak.

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah pembangunan parit, dan peninggian jalan yang dilakukan pemerintah daerah selama ini sudah cukup membantu mengurangi dampak banjir?

Narasumber: Sudah, sudah mulai bergerak. Kita kan ya mulai bergerak lah kalau untuk penanganan-penanganan banjir itu, pasti dengan parit lah kuncinya. Sekarang sudah mulai dibersihkan dan diperbaiki.

Pewawancara: Kalau kita kilas balik nih, Pak, di tahun 2022, 2023, 2024, apakah itu tuh ada peningkatan, Pak? Atau masih sama?

Narasumber: Kita mulai peningkatannya tahun 2024 sampai 2025 inilah kalau saya yang menjalani, ada peningkatan. Perbaikan jalan mulai di Tembilahan, kemudian parit-parit sudah mulai dibersihkan.

Pewawancara: Berarti di 2022, 2023 belum ada ya, Pak?

Narasumber: Belum ada, mungkin bukan belum ada, ada upayanya ada, tapi tidak semasih yang ada di 2024-2025. Ya kan kita pergantian Bupati juga. Mungkin saja itu, tapi kan kita tidak bicara ke sana, ya sekarang gerakannya saja.

3. Bagaimana kondisi jalan di lingkungan Bapak/Ibu, khususnya menuju sekolah, pasar, dan fasilitas umum lainnya?

Narasumber: Oke, kalau jalan di sini kan ada yang besar ada yang kecil itu ya. Kalau untuk yang di sebelah sini untuk menuju ke sekolahnya masih bagus. Kemudian yang di daerah hulu, arah ke hulu ini yang masih hancur, kayak di situ ada SD 12, kemudian ada sekolah-sekolah yang di dalam itu jalannya memang belum diperbaiki, masih belum diperbaiki. Tapi kami upayakan meminta kepada pemerintah, untuk memohon kepada pimpinan untuk bisa diperbaiki.

4. Apakah kerusakan jalan sering menyebabkan kendaraan mogok, kecelakaan, atau hambatan ekonomi?

Narasumber: Kerusakan jalan itu biasanya memang kondisional ya. Kalau memang itu menghambat pasti, itu menghambat kondisionalnya kita memang terjadi di Tembilahan. Tapi kalau memang itu sering diupayakan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk perbaikan, itu memang kadang upaya bersama lah gitu ya, pasti itu pasti terjadi.

5. Menurut pengamatan Bapak/Ibu, apakah kerusakan jalan lebih disebabkan oleh kualitas pekerjaan, seringnya terendam banjir, atau kurangnya perawatan lanjutan?

Narasumber: Bisa. Kalau saya berpikir kemungkinan mungkin harus disesuaikan lah dengan kondisi, misalnya daerah ini daerah gambut, rawanya banyak, mungkin sesuaikan lah. Mungkin penimbunannya yang lebih didalamkan atau ditebalkan atau gimana. Kalau perawatan, kemungkinan ya juga mungkin bisa, perawatan tidak ada atau kurang perawatannya.

Pewawancara: Apalagi kan di lingkaran nih tiap tahun tuh pasti kena banjir kan, harusnya ada peninggian kan.

Narasumber: Lingkaran? Iya, lingkaran. Itu tiap tahun tuh pasti ada, cuma paritnya lah, paritnya lah kuncinya itu. Kalau jalan pasti harus ditinggikan.

Pewawancara: Berarti itu masih kurang kan, Pak, di lingkungan situ. Padahal di perkotaan, di M. Boya juga padahal kan itu banyak. Ini Pak, bagaimana kondisi bangunan sekolah negeri di sekitar tempat tinggal Bapak khususnya terkait ruang kelas, atap, toilet, dan fasilitas pendukung lainnya?

Narasumber: Ya kalau ada dua sekolah di Pekan Arba ini, yang satu kekurangan ruangan, yang kemudian dua sekolah ini masih kurang ruangan lah. Ruangannya kurang, kemudian fasilitasnya juga masih belum dilengkapi dengan baik, tapi sudah cukup memadai. Cuma kalau dikatakan kurang ya mesti kurang, pasti kurang itu. Tapi untuk sementara dikatakan memadai lah untuk jumlah yang belajar di sana. Pasti kurang itu.

3) Fenomena Fasilitas Sekolah Dan Akses Pendidikan

Konteks Penelitian: Anggaran pendidikan daerah relatif besar, namun sebagian besar terserap untuk belanja rutin, sementara perbaikan sarana fisik sekolah berjalan lambat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi bangunan sekolah negeri (SD/SMP) di sekitar tempat tinggal Bapak/Ibu, khususnya terkait ruang kelas, atap, toilet, dan fasilitas pendukung lainnya?

Narasumber: Ya kalau ada dua sekolah di Pekan Arba ini, yang satu kekurangan ruangan, yang kemudian dua sekolah ini masih kurang ruangan lah. Ruangnya kurang, kemudian fasilitasnya juga masih belum dilengkapi dengan baik, tapi sudah cukup memadai. Cuma kalau dikatakan kurang ya mesti kurang, pasti kurang itu. Tapi untuk sementara dikatakan memadai lah untuk jumlah yang belajar di sana. Pasti kurang itu.

2. Apakah kondisi fisik sekolah tersebut sudah memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak untuk belajar?

Narasumber: Kalau untuk rasa aman dan nyaman sudah. Kemungkinan untuk fasilitas pendukungnya lah gitu, seperti timbunan lapangan gitu.

3. Sejauh mana kondisi jalan rusak dan banjir rob memengaruhi kekhawatiran orang tua dalam menyekolahkan anak?

Narasumber: Jelas, Pak. Kalau itu pasti mempengaruhi lah ya. Kalau sama yang di sebelah di daerah jalan Harapan ke sana itu memang ada jalan penghubung lah kecil kemarin sudah diajukan, itu memang mengkhawatirkan kalau misalnya itu kena banjir, terpaksa jalannya harus memutar itu keluar dulu. Pasti khawatir orang tua.

4) Fenomena Aset Daerah Terbengkalai (Plaza Dan Pasar Rakyat)

Konteks Penelitian: Banyak aset daerah berupa bangunan publik yang kurang terawat dan belum memberikan manfaat ekonomi optimal bagi masyarakat.

Pertanyaan:

1. Apakah kondisi bangunan, kebersihan, dan fasilitas yang kurang memadai memengaruhi minat Bapak/Ibu untuk berbelanja atau berusaha di lokasi tersebut?

Narasumber: Yang namanya kebutuhan makro, kebutuhan yang memang primer, itu juga harus kami penuhi kan. Artinya memang kami harus cari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jika pemerintah memperbaiki bangunan, drainase, dan fasilitas pendukung pasar, apakah Bapak/Ibu akan lebih tertarik beraktivitas ekonomi di sana?

Pewawancara: Soalnya kan sampai sekarang Plaza, malahan Pasar Rakyat katanya hampir mau tutup sekarang. Kayak Plaza, kenapa ya pemerintah kurang memperhatikan itu? Padahal kan itu salah satu pendapatan aset daerah yang tinggi. Itu kan sebagai pembantu pedagang, masyarakat juga belanja di sana.

Narasumber: Pasar-pasar yang paling bagus tuh kan pasar yang memang menampung kegiatan masyarakat ya kan. Bukan kegiatan-kegiatan sendiri atau perusahaan perorangan.

3. Sebagai masyarakat, bagaimana perasaan Bapak/Ibu melihat bangunan milik pemerintah yang dibiarkan rusak padahal berpotensi menjadi pusat ekonomi rakyat?

Narasumber: Ya sebetulnya kalau itu kan sangat disayangkan kami masyarakat lah. Selaku masyarakat sangat menyayangkan itu. Tetapi juga kita bisa menilai kesanggupan pemerintah dan kondisional keuangannya juga tidak kami kesampingkan itu. Kami pasti memandang ke sana. Tapi kami selaku masyarakat pasti memerlukan lah.

Pewawancara: Karena mungkin kalau menurut pemerintahan bagus nya perbaikan jalan dulu daripada perbaikan bangunan pasar.

Narasumber: Ya itu skala prioritas, mana yang lebih didahulukan. Kalau kami tuh pengennya bagus kan namanya masyarakat.

Pewawancara: Kalau misalnya tiga tahun ke belakangan ini gimana, Pak? Ada nggak menurut Bapak perbaikannya di 2022, 2023, 2024?

Narasumber: Ada, pasti ada. Cuma mungkin tidak banyak, tidak semasih yang sekarang lah gitu. Ada itu pasti ada.

5) Harapan Masyarakat Dan Nilai Manfaat Anggaran (*Value For Money*)

Konteks Penelitian: Masyarakat merupakan penerima manfaat utama dari setiap rupiah anggaran daerah.

Pertanyaan:

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apa yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah saat ini: memperbaiki jalan dan parit agar tidak banjir, atau membangun gedung-gedung kantor baru?

Narasumber: Ya kalau kami masyarakat memang harus ada perbaikan jalan, gang, parit yang udah untuk keamanan dan lingkungan kami kan. Kebersihan, kesehatan lingkungan kami, itu penting. Nah sekarang memang mulailah kelihatan ada upaya itu. Dan kami sebagai masyarakat menyambut baik ada upaya perbaikan-perbaikan di fasilitas-fasilitas yang memang skala prioritasnya untuk kepentingan masyarakat.

- 2) Apakah Bapak/Ibu merasa manfaat pembangunan daerah selama ini sudah sebanding dengan pajak dan retribusi yang dibayarkan?

Narasumber: Kalau menurut kami itu belum, masih selaku masyarakat. Tapi bisa saja kami tidak tahu menilainya seperti apa. Tapi yang jelas kalau kami bayar pajak tentu ada timbal balik lah.

- 3) Apa pesan atau harapan Bapak/Ibu kepada pemerintah daerah agar anggaran pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil?

Narasumber: Harapan kami ya memang pemerintah agar memperhatikan skala prioritas kepentingan masyarakat, yang memang itu menjadi kebutuhan. Artinya memang keamanan, ketertiban lingkungannya, kesehatan untuk kepentingan masyarakat. Terutama jalan ya.

Pewawancara: Ini Pak kan di Pekan Arba nih kan banyak di pangan, pertanian kan. Nah sedangkan di pertanian nih Pak belanja modalnya kurang untuk membantu masyarakatnya. Menurut Bapak perlu nggak nih di Dinas Pangan nih kayak ngasih fasilitas untuk petani-petani untuk berkembang?

Narasumber: Kalau bicara soal fasilitas, dari dulu petani hidup aja tanpa fasilitas. Kan gitu. Tapi bagus kalau diberi fasilitas. Nah kalau lebih baik itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikanlah pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan ketimbang dulu kalau soal fasilitas ya semuanya petani jalan saja kan gitu. Tapi kalau bisa itu ada pelatihannya atau itu yang paling penting. Harusnya di belanja modal ni ada fasilitas-fasilitasnya, itu penting juga, tapi ada sistem-sistem pelatihan atau... Nah kalau kalau sayalah, kalau sering dibantu terus dengan ini dulu nanti akhirnya kan manja kalau saya gitu. Tapi kalau bisa itu ada pelatihan-pelatihan yang nanti mereka bisa bergerak sendiri dengan kemandirian ekonomi dan kemandirian pertanian gitu.

Pewawancara: Berarti sekarang masih kurang edukasinya berarti kurang edukasi ke masyarakat?

Narasumber: Yang sesuai dengan modernisasi lah gitu. Untuk apa alat didatangkan tapi mereka tidak bisa menggunakan. Kan gitu. Untuk apa bibit diberikan tapi tak tahu dengan proses penanamannya, jadi tadi ada ada hubungan lah hubungan timbal balik mereka tuh supaya paham dan mengerti oh ini ini teknologinya sekarang kayak begini gitu. Jadi buka jendela komunikasi lah dengan informasi.

Pewawancara: Jadi harapan Bapak nih di Dinas Pangan ni kan harus banyak mengedukasi dan bisa juga ngasih bibit-bibit yang dapat diolah.

Narasumber: Ya dikasih bibit pun kalau memang tidak ada informasinya bagaimana, kan gitu. Sama juga tadi kita diberi alat peralatan dengan apa namanya modernisasi menurut pertanian kan tapi mereka tidak bisa mengoperasikan apa gunanya kan gitu.

Pewawancara: Ya siap, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak.

Narasumber: Sama-sama.

Pewawancara: Pak boleh dokumentasi bentar?

Narasumber: Boleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber Kedua : Pak Amat



30/Januari/2026

Pewawancara: Ini tentang banjir, Pak. Di wilayah Sungai Luar bagaimana kondisinya, apakah sering terdampak rob?

Narasumber: Kalau di sini, banjir rob itu memang sudah jadi tamu rutin tiap tahun, pasti ada masanya air naik. Tapi sekarang ini rasanya mulai agak mendingan karena aliran parit sudah sering dibersihkan oleh warga secara swadaya. Kuncinya memang harus di parit-parit itu supaya air cepat turun kembali ke sungai.

Pewawancara: Kalau menurut Bapak nih, selama tinggal di Sungai Luar, apa dampak banjir rob yang datang tiap tahun itu terhadap aktivitas Bapak, seperti pergi kerja, berdagang, atau anak yang pergi sekolah?

Narasumber: Ya kalau dibilang menghambat, jelas sangat menghambat. Tapi namanya sudah jadi kebiasaan orang kita di sini, mau tak mau ya dijalani saja. Hanya saja kita sering lalai menjaga kebersihan saluran air. Kalau dulu parit kita jauh lebih dalam dan bersih, sekarang banyak yang sudah dangkal. Intinya kalau parit sudah dinormalisasi, air pasang itu tak akan lama merendam jalan kita, paling sebentar saja sudah surut.

Pewawancara: Menurut Bapak, apakah upaya pembangunan parit dan peninggian jalan yang dilakukan pemerintah daerah selama ini sudah cukup membantu mengurangi dampak banjir di Sungai Luar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Situs Resmi UIN Suska Riau
Situs Resmi UIN Suska Riau

Narasumber: Sudah ada nampak gerakannya, sudah mulai diperhatikan sedikit-sedikit. Kita bersyukur pemerintah mulai bergerak untuk urusan penanganan banjir ini, karena memang kuncinya di parit itu tadi. Sekarang parit di beberapa titik utama sudah mulai dikeruk dan diperbaiki supaya arus airnya lancar.

Pewawancara: Kalau kita kilas balik nih, Pak, di tahun 2022, 2023, sampai 2024, apakah Bapak merasakan ada peningkatan perbaikan di sini?

Narasumber: Peningkatannya baru mulai terasa betul di tahun 2024 menuju 2025 ini kalau menurut pantauan saya yang sehari-hari di sini. Perbaikan jalan di beberapa jalur utama Sungai Luar sudah mulai nampak, parit-parit besar juga sudah mulai dibersihkan secara masif supaya tak menyumbat lagi.

Pewawancara: Berarti di tahun 2022 atau 2023 yang lalu belum terlalu terasa ya, Pak?

Narasumber: Belum terlalu nampak, mungkin bukannya tak ada kerja, tapi belum sedahsyat atau semasif yang kita lihat di tahun 2024 ini. Mungkin karena faktor pergantian kepemimpinan atau kebijakan baru juga. Tapi kita tak usah bahas politiknya, yang penting sekarang gerakannya sudah mulai masuk ke wilayah kita.

Pewawancara: Mengenai kondisi jalan di lingkungan Bapak, khususnya akses menuju pasar atau instansi pendidikan seperti pondok pesantren, bagaimana kondisinya sekarang?

Narasumber: Nah ini yang jadi masalah besar. Kalau jalan utama mungkin lumayan, tapi coba lihat jalan ke arah Pondok Pesantren di Simpang Tiga itu. Jalannya sudah hancur lebur dan rusak parah sudah lama sekali. Padahal di sana ada sekolah agama, tempat anak-anak kita menimba ilmu. Jalan di sana seolah terlupakan, belum ada perbaikan yang serius sampai sekarang. Kami sangat berharap pemerintah segera melirik ke arah sana untuk diperbaiki.

Pewawancara: Apakah kerusakan jalan ke arah pondok tersebut sering menyebabkan kendala seperti motor mogok atau hambatan bagi wali santri?

Narasumber: Sering sekali, apalagi kalau hujan atau rob, jalannya jadi bubur. Kasihan kita melihat orang tua yang datang dari jauh untuk menjenguk anaknya di pondok itu. Mereka harus bolak-balik lewat jalan rusak, kadang motornya jatuh atau mesinnya mati. Padahal orang tua ini semangat sekali mau lihat anak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tapi jalannya menghalangi. Hambatan ekonomi pun terasa karena pengangkutan barang ke pondok jadi lebih mahal ongkosnya.

Pewawancara: Menurut pengamatan Bapak, apa penyebab utama jalan ke arah Simpang Tiga itu cepat sekali rusak?

Narasumber: Bisa jadi karena kualitas pekerjaannya dulu kurang pas dengan kondisi tanah kita yang gambut dan rawa. Harusnya pengerjaannya disesuaikan, penimbunannya harus lebih dalam dan aspalnya lebih tebal. Selain itu, faktor sering terendam air rob dan kurangnya perawatan rutin membuat lubang kecil cepat sekali jadi lubang besar yang membahayakan.

Pewawancara: Selain jalan, bagaimana dengan kondisi fisik bangunan pondok atau sekolah di sekitar sini, apakah sudah memadai?

Narasumber: Ada beberapa sekolah yang masih kekurangan ruang kelas. Fasilitas penunjang lainnya seperti toilet atau asrama santri juga masih perlu banyak sentuhan. Sudah memadai untuk belajar, tapi kalau dibilang ideal ya masih jauh. Masih banyak yang kurang dan perlu ditambah supaya anak-anak kita bisa belajar dengan lebih tenang.

Pewawancara: Apakah kondisi jalan yang hancur itu memengaruhi minat atau kekhawatiran orang tua untuk menyekolahkan anaknya di pondok Sungai Luar?

Narasumber: Tentu saja. Orang tua pasti khawatir kalau jalannya rusak parah, apalagi kalau banjir. Mereka takut keselamatan anaknya di jalan. Kita ini inginnya Pemerintah daerah melirik ke Sungai Luar ini supaya pondok pesantren kita bisa terkenal. Karena lokasinya lumayan jauh dari perkotaan Tembilahan, akses jalan itulah satu-satunya harapan agar masyarakat dari luar Inhil tertarik menyekolahkan anaknya ke sini. Kalau jalannya bagus, orang pasti mau datang.

Pewawancara: Bagaimana dengan aset daerah lainnya seperti pasar atau Plaza di kota, apakah kondisinya memengaruhi minat Bapak untuk berdagang atau belanja di sana?

Narasumber: Namanya pasar itu kan kebutuhan pokok, kita pasti ke sana. Tapi kalau bangunannya kumuh, kotor, dan drainasenya mampet, ya kita malas juga lama-lama di sana. Kalau pemerintah mau memperbaiki fasilitas pasar dan menjamin kebersihannya, tentu kita sebagai masyarakat kecil akan lebih semangat beraktivitas ekonomi di sana.

Narasumber: Sangat disayangkan sekali, kami sebagai warga merasa itu mubazir. Padahal kalau dirawat dan dikelola dengan benar, bisa jadi tempat orang cari nafkah. Tapi kita juga paham mungkin pemerintah punya keterbatasan dana, tapi ya jangan sampai dibiarkan hancur begitu saja, rugi kita sebagai pembayar pajak.

Narasumber: Kalau tanya warga kecil seperti kami, ya jelas perbaikan jalan, gang, dan parit itu yang nomor satu. Itu menyangkut keamanan dan kesehatan lingkungan kita. Kantor baru itu nanti dulu, yang penting jalan ke sekolah dan pondok pesantren kita mulus supaya ekonomi lancar dan anak-anak aman pergi mengaji.

Narasumber: Kalau jujur, rasanya belum sebanding. Kami tetap bayar kewajiban kami, tapi timbal baliknya berupa fasilitas jalan yang bagus belum kami rasakan sepenuhnya, terutama di daerah pelosok Sungai Luar ini. Kami ingin ada keadilan dalam pembangunan, jangan cuma di kota saja yang dipercantik.

Narasumber: Harapan kami cuma satu, tolong perhatikan skala prioritas. Tolong perhatikan jalan ke pondok pesantren kami di Simpang Tiga itu. Kami ingin pendidikan agama di sini maju dan dikenal orang banyak. Kalau akses jalannya mantap, orang dari luar daerah pun tak segan datang ke Sungai Luar. Itu yang jadi kebutuhan paling mendesak kami sekarang.

Pewawancara: Mengenai data anggaran, kabarnya biaya operasi seperti gaji pegawai lebih besar daripada belanja modal untuk bangun jalan. Bagaimana tanggapan Bapak?

Pewawancara: Terkait pangan dan pertanian, apakah bantuan untuk petani di Sungai Luar sudah efektif menurut Bapak?

Pewawancara: Kita beralih ke sektor perikanan, Pak. Mengingat Sungai Luar ini berada di daerah perairan dan mayoritas warga adalah nelayan, menurut Bapak apakah bantuan-bantuan yang dikucurkan pemerintah selama ini sudah efektif dan tepat sasaran?

Pewawancara: Maksud Bapak, bantuan alat tersebut tidak dibarengi dengan bimbingan teknis bagi para nelayan?

Pewawancara: Lalu, apa harapan Bapak terkait peran dinas terkait untuk memperbaiki kondisi ini agar ekonomi nelayan di Sungai Luar bisa lebih mandiri?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Harusnya ada hubungan timbal balik yang terus-menerus. Dinas itu jangan cuma datang pas serah terima barang untuk foto-foto laporan saja, tapi harus sering turun memberi penyuluhan rutin. Ajarkan kami cara merawat mesin, cara membaca potensi ikan, sampai cara mengolah hasil laut supaya punya nilai tambah. Kami ingin bantuan itu jadi jalan untuk kemandirian ekonomi kami, bukan cuma sekadar bantuan sosial yang habis pakai lalu hilang.

Pewawancara: Jadi intinya masyarakat lebih butuh "pemberdayaan" daripada sekadar "pemberian" barang ya, Pak?

Narasumber: Nah, itu maksud saya. Kalau cuma kasih barang tanpa ilmu, ya nelayan tetap begini-begini saja nasibnya. Kami ingin suara kami ini sampai ke telinga orang-orang di atas sana, supaya kebijakan anggaran itu benar-benar dipikirkan manfaat jangka panjangnya untuk masyarakat kecil seperti kami.

Pewawancara: Baik Pak, terima kasih banyak atas waktu dan informasinya. Sangat bermanfaat untuk data saya.

Narasumber: Sama-sama, semoga suara kami ini sampai ke telinga orang-orang di atas sana.

Pewawancara: Pak, boleh dokumentasi sebentar untuk laporan?

Narasumber: Boleh, silakan diatur saja fotonya.

6) Penutup Wawancara

Terima kasih banyak atas waktu dan pendapat Bapak. Seluruh informasi yang disampaikan sangat berharga dan akan digunakan sebagai bahan penelitian untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pedoman Wawancara Terstruktur

1) Pembukaan Wawancara

“Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herzela Maydea Sahara, mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang menyusun skripsi mengenai Analisis Rasio Kerasian Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Wawancara ini bertujuan untuk mengonfirmasi hasil analisis data keuangan daerah khususnya rasio efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kerasian belanja dengan kondisi nyata pelaksanaan program dan pelayanan publik di lapangan. Seluruh pertanyaan bersifat akademis, tidak bermaksud menilai individu, dan hanya digunakan sebagai bahan analisis ilmiah. Saya berharap Bapak/Ibu dapat memberikan penjelasan secara objektif dan terbuka.”

2) Pertanyaan Umum (Pengantar)

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?
2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?
3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

3) Pertanyaan Inti Wawancara Per OPD

Disusun berdasarkan indikator: efektivitas, efisiensi, pertumbuhan, dan kerasian belanja, serta dikaitkan dengan fenomena lapangan.

4) Penutup Wawancara

Terima kasih atas waktu dan penjelasan Bapak/Ibu. Seluruh informasi ini akan digunakan sebagai bahan analisis objektif dalam penyusunan rekomendasi kebijakan agar pengelolaan anggaran daerah ke depan lebih berpihak pada pelayanan publik dan kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah): Pak Guzali

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____

Jabatan : _____

OPD : _____

Tanggal Wawancara: _____

"Assalamu'alaikum Bapak/Ibu, terima kasih atas waktu dan sambutan baiknya. Dalam penelitian skripsi saya, saya telah melakukan telaah teknis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bapenda periode 2022 hingga 2024. Berdasarkan perhitungan rasio yang saya lakukan, saya mencatat beberapa dinamika kinerja yang sangat menarik:

- Pada tahun 2023, Efektivitas Pendapatan mencapai angka yang sangat luar biasa yaitu 101,73%.
- Namun pada tahun 2024, terdapat penurunan rasio efektivitas menjadi 75,15%, yang dibarengi dengan Rasio Efisiensi yang menyentuh angka 100%. Mohon izin Bapak/Ibu, saya ingin berdiskusi lebih mendalam mengenai faktor teknis dan kebijakan yang melatarbelakangi angka-angka tersebut."

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Jadi begini, kita harus pilah dulu tupoksinya. Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) itu tupoksi utamanya adalah koordinator pendapatan atau koordinator PAD. Namun, secara teknis pemungutan, Bapenda itu hanya memungut Pajak Daerah secara langsung. Sedangkan untuk Retribusi Daerah, pemungutnya adalah OPD teknis masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pewawancara: "Oh, OPD teknis itu maksudnya gimana, Pak?"

Narasumber: Iya, OPD teknis. Contohnya:

- 1) Retribusi parkir di tepi jalan umum, itu dinasnya Dinas Perhubungan.
- 2) Retribusi pasar, itu Dinas Perdagangan.
- 3) Retribusi persampahan, itu DLHK.
- 4) Retribusi kesehatan, itu Dinkes dan RSUD.

Jadi, Bapenda fungsinya sebagai koordinator untuk merekapitulasi laporan realisasi mereka. Tapi kalau untuk Pajak Daerah, itu murni tupoksi Bapenda selaku pemungut operasional.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Ada, kendala yang paling signifikan dan berulang selama 2022-2024 ini adalah:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak: Masih banyak masyarakat yang merasa bayar pajak itu beban, padahal itu kewajiban untuk pembangunan. Ini kendala klasik.
- 2) Validitas Data: Data objek pajak kita perlu terus dimutakhirkan (update). Contohnya PBB; banyak bangunan yang sudah berubah bentuk dulu rumah biasa sekarang jadi ruko tapi di data kami masih tercatat rumah biasa, jadi pajaknya kecil. Itu perlu kita update terus.
- 3) Kondisi Ekonomi: Ini faktor eksternal. Kalau ekonomi masyarakat lagi lesu, harga kelapa turun, harga pinang turun (komoditas utama Inhil), itu berdampak banget ke daya beli dan kemampuan bayar pajak masyarakat, terutama PBB dan Restoran.
3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Kalau bicara dampak kebijakan efisiensi, sebenarnya arahnya justru mendorong kami untuk mengubah pola pelayanan menjadi lebih modern. Dampaknya ke pelayanan publik justru positif dalam hal kemudahan akses. Karena dituntut efisien, strategi kami adalah Digitalisasi. Kami permudah masyarakat supaya tidak perlu antre atau datang jauh-jauh. Sekarang bayar PBB sudah bisa lewat QRIS, Mobile Banking, atau gerai seperti Indomaret dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pewawancara: Oh, PBJT itu gabungan apa saja, Pak?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Hasil perhitungan menunjukkan terjadinya kontraksi pertumbuhan pendapatan sebesar -2,8% pada tahun 2024. Strategi intensifikasi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekstensifikasi apa yang menurut Bapak/Ibu masih memerlukan penguatan lebih lanjut agar tren pendapatan daerah dapat kembali tumbuh positif secara stabil?

Narasumber: Penurunan di 2024 ini kan karena adanya regulasi baru, UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022, yang mengubah struktur pajak menjadi PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Strategi penguatan kami ada dua yang utama:

- 1) Pemutakhiran Data (*Update Data*): Ini harus diperkuat. Banyak data objek pajak yang tidak valid, misalnya fisik bangunan sudah jadi ruko tapi data masih rumah biasa, jadi pajaknya kecil. Ini yang harus kita kejar.
 - 2) Penegakan Hukum (*Law Enforcement*): Kita akan lebih tegas. Yang nunggak pajak, kita pasang stiker atau spanduk 'Belum Bayar Pajak' di tempat usahanya. Ini terbukti efektif memberikan efek jera agar pendapatan kembali naik.
- f. Data menunjukkan bahwa sekitar 98% anggaran terserap untuk belanja operasional rutin. Mengingat pentingnya modernisasi sistem, adakah rencana strategis Bapenda untuk meningkatkan porsi Belanja Modal, khususnya dalam pengembangan sistem IT perpajakan? Mengapa investasi digital ini belum menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tiga tahun terakhir?

Narasumber: Kenapa biaya operasional kami tinggi? Karena kami harus melakukan Uji Petik turun ke lapangan.

Pewawancara: Uji Petik itu biayanya besar ya, Pak?

Pewawancara: Iya, karena itu butuh personil turun langsung menghitung potensi real sehari-hari. Menghitung berapa motor parkir, berapa orang makan di restoran, untuk mencari potensi aslinya. Investasi IT (Sistem) memang penting dan sudah kami mulai dengan tapping box, tapi sistem secanggih apa pun kalau validitas data dasarnya salah, hasilnya akan salah. Makanya anggaran banyak terserap untuk operasional pemutakhiran data dan uji petik guna memastikan data di sistem itu valid.

- g. Dengan rasio efisiensi yang mencapai 100%, sejauh mana upaya Bapenda dalam mentransformasi metode pemungutan dari sistem manual ke sistem digital yang lebih hemat biaya? Apakah terdapat kendala teknis tertentu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat metode pemungutan saat ini masih memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi?

Narasumber: Transformasi sudah berjalan lewat pembayaran digital (QRIS/Banking) dan *tapping box*. Kendala teknisnya adalah Validitas Data dan Kesadaran Wajib Pajak. Meskipun sistem sudah digital, kalau wajib pajaknya masih 'nakal' atau datanya belum *update*, kami tetap harus turun tangan secara manual (operasional) untuk mengejar mereka. Jadi biaya operasional tinggi itu untuk menutup celah kebocoran yang belum bisa dijangkau oleh sistem digital sepenuhnya.

h. Bagaimana Bapak/Ibu menilai prinsip *Value For Money* (Manfaat bagi Rakyat) dari penggunaan anggaran Bapenda selama ini? Apakah setiap rupiah biaya operasional yang dikeluarkan sudah memberikan dampak yang maksimal terhadap kemandirian fiskal daerah kita?

Narasumber: Harapannya tentu PAD kita makin mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer pusat. Setiap rupiah yang kami keluarkan untuk memungut pajak, itu kembali lagi ke masyarakat. Contohnya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang jadi primadona pajak kita, itu dananya dipakai untuk membiayai penerangan jalan yang dinikmati rakyat. Upaya kami mengejar pajak lewat operasional yang ketat adalah untuk memastikan keadilan dan kemandirian fiskal daerah kita.

i. Sebagai motor utama pendapatan daerah, langkah inovatif apa yang telah disiapkan Bapenda untuk memastikan bahwa di masa depan, biaya operasional pemungutan pajak dapat lebih efisien dan pendapatan asli daerah (PAD) dapat meningkat melalui dukungan teknologi yang lebih mumpuni?

Narasumber: Langkah inovatif kami ke depan fokus pada tiga hal:

- 1) Digitalisasi Penuh: Memperluas penggunaan *tapping box* dan kanal pembayaran digital agar tidak ada lagi uang tunai yang 'tercecer'.
- 2) Pemutakhiran Data Masif: Memperbaiki database agar potensi pajak tergarap semua.
- 3) Penegakan Hukum Tegas: Menggunakan sanksi sosial (stiker/spanduk) sebagai *shock therapy* bagi penunggak.

Dengan tiga hal ini, kami yakin biaya operasional manual bisa ditekan dan PAD bisa meningkat signifikan.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan, 2026

(_____)

NIP: _____

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah): Pak Andry

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____
Jabatan : _____
OPD : _____
Tanggal Wawancara : _____

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Prioritas anggaran kami di BKAD selama periode ini fokusnya adalah memaksimalkan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Perlu dipahami, investasi di BKAD itu bukan seperti menanam saham, tapi lebih ke pemanfaatan aset untuk Sewa-Menyewa. Prioritas pendapatan kami genjot dari sewa gedung, bangunan, dan lapangan. Dulu ada sewa alat berat, tapi sekarang fokus di aset properti. Sedangkan dari sisi belanja, prioritas kami ada urutannya:

- 1) Belanja Wajib (Mandatory): Gaji pegawai dan operasional kantor (listrik/air). Ini prioritas nomor satu.
- 2) Belanja Program Prioritas: Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan.
- 3) Belanja Modal: Ini prioritas terakhir (penunjang).

Pewawancara: Terkait belanja modal dan manajemen aset, mengapa investasi internal tidak diprioritaskan untuk efisiensi kerja OPD? Seperti nambah-nambah aset bangunan?

Narasumber: Yang belanja modal itu sifatnya tidak wajib, dia hanya penunjang. Seandainya pun tidak kita laksanakan (beli aset baru), kita masih bisa jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan fasilitas seadanya. Jadi kalau anggaran terbatas, belanja modal yang kita kurangi, yang penting program kemanusiaan dan gaji jalan dulu.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Kendala berulang yang paling teknis dan mempengaruhi penyerapan anggaran tiap tahun adalah masalah Kekosongan Jabatan (Formasi Pegawai) atau SDM. Dalam perencanaan (RKA), kami menganggarkan gaji dan tunjangan berdasarkan 'Peta Jabatan' yang ideal/penuh. Misalnya kami anggar untuk 10 orang pejabat/staf. Namun, dalam realisasinya di lapangan, ternyata ada pegawai yang pensiun atau jabatan kosong karena tidak ada yang memenuhi syarat kompetensi. Akibatnya, uang gaji yang sudah disiapkan untuk posisi kosong itu tidak bisa dicairkan, dan akhirnya menjadi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Jadi penyerapan tidak 100% bukan karena program gagal, tapi karena orangnya tidak ada.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Narasumber: Misalnya ada kepegawaian yang tersedia, tapi untuk saat ini kosong saja tiga. Tiga ini anggarannya ada, tapi orangnya tidak bisa diisi. Makanya tidak sesuai nih (realisasi dan anggaran).

Pewawancara: Berarti karena syarat kompetensi tidak terpenuhi ya Pak?

Narasumber: Iya, karena tidak ada yang memenuhi syarat di bidang itu, tidak bisa didudukkan pejabatnya. Tapi kita tetap harus menganggarkan, mana tahu tiba-tiba terisi di pertengahan tahun.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Dampaknya pasti ada, terutama pada Fasilitas Penunjang.

Ketika terjadi efisiensi atau refocusing, yang pertama kali kami potong adalah Belanja Modal (pembelian kendaraan, rehab gedung, beli komputer baru). Pelayanan publik tetap berjalan, tapi dengan fasilitas yang ada (existing). Kami tidak memaksakan pengadaan baru. Prinsipnya, pelayanan administrasi dan gaji tidak boleh macet, tapi kenyamanan fasilitas mungkin agak tertahan karena anggarannya dialihkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Jadi tidak apa-apa di tahun itu tidak ada anggaran belanja modal?

Narasumber: Tidak apa-apa. Karena belanja modal tidak wajib. Setiap OPD tidak harus menganggap pengadaan aset baru itu wajib setiap tahun. Kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

a. Berdasarkan data tahun 2022, kami mencatat tingkat penyerapan anggaran berada di kisaran 42%. Mohon izin mengonfirmasi, faktor teknis atau tantangan sistemik apa yang muncul pada tahun tersebut sehingga penyerapan belum berjalan maksimal dan berdampak pada munculnya SiLPA yang cukup signifikan?

Narasumber: Nah, ini harus hati-hati membacanya. Di tahun 2022 itu justru kami sebut Sangat Efisien (hemat), kenapa SiLPA-nya besar? Faktor utamanya adalah Belanja Tak Terduga (BTT).

Anggaran BTT itu kita siapkan besar untuk jaga-jaga bencana (longsor, kebakaran, banjir). Di tahun 2022, alhamdulillah kejadian bencana mungkin sedikit. Karena bencananya sedikit, maka dana BTT tidak terpakai (tidak terserap). Karena tidak terpakai, dia jadi SiLPA. Secara statistik penyerapan terlihat rendah (42%), tapi secara substansi itu bagus karena berarti tidak ada musibah.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Di BKAD sangat efisien nih Pak 2022, di 2023 dia menjadi 'kurang efisien'. Apa penyebabnya?

Narasumber: "Iya, karena Belanja Tak Terduga tadi. Di 2023 mungkin kejadian bencananya lebih banyak, ada tanah longsor, dll. OPD teknis seperti BPBD mengajukan dana BTT, cairilah uangnya. Karena uang keluar (terserap), maka rasio efisiensinya turun (karena uang habis), tapi penyerapannya naik. Kalau 2022, uangnya utuh karena tidak ada bencana.

b. Dari melihat adanya perubahan pada rasio efisiensi belanja internal, dari 42,57% di tahun 2022 menjadi 87,25% di tahun 2024. Bagaimana Bapak/Ibu memandang peningkatan belanja operasional administratif ini? Apakah hal tersebut merupakan dampak dari penyesuaian beban kerja baru atau adanya kebutuhan manajerial dalam penguatan tata kelola keuangan daerah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Ini perlu diluruskan cara bacanya. Di tahun 2022 itu, penyerapannya rendah (42%) justru karena kita sangat efisien dalam menjaga pos Belanja Tak Terduga (BTT). BTT itu anggarannya ada di BKAD. Dana ini sifatnya standby untuk bencana (longsor, kebakaran, banjir). Di tahun 2022, alhamdulillah kejadian bencana sedikit, sehingga dana BTT tidak terpakai (menjadi SiLPA). Makanya serapannya terlihat rendah. Sedangkan di 2023 dan 2024, kejadian bencana atau kebutuhan mendesak meningkat, sehingga dana BTT itu cair dan terserap. Jadi kenaikan angka rasio itu bukan semata beban kerja administratif, tapi karena realisasi dana darurat tadi.

(Pertanyaan Spontan Mahasiswa):

Pewawancara: Berarti di 2022 itu padahal belanjanya sangat efisien ya Pak (hemat)?

Narasumber: Iya, efisien. Karena resesi belanja (BTT) tadi tidak banyak kejadiannya. Kalau 2023 menjadi 'kurang efisien' (serapan tinggi) karena dananya terpakai untuk bencana.

- c. Bapak/Ibu, data menunjukkan pertumbuhan belanja birokrasi internal di BKAD tetap menunjukkan tren positif (di atas 10%) di saat pendapatan daerah secara umum sedang berkontraksi. Bagaimana strategi BKAD dalam menjaga prinsip keserasian belanja agar pertumbuhan biaya rutin ini tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah yang sedang terbatas?

Narasumber: Begini ya, Dek. Kita harus bedakan dulu jenis belanjanya. Di dalam belanja birokrasi itu, komponen terbesarnya adalah Belanja Wajib (Mandatory Spending), seperti Gaji Pegawai (ASN & PPPK), Listrik, Air, dan Internet kantor. Kenapa trennya tetap positif atau naik walaupun pendapatan turun? Karena ada faktor inflasi dan kenaikan pangkat berkala pegawai yang tidak bisa kita hindari. Gaji itu tidak mungkin kita potong. Strategi keserasiannya adalah: ketika fiskal daerah terbatas, yang kami 'korbankan' atau kami potong adalah Belanja Modal (beli aset/fisik) dan belanja kegiatan yang tidak mendesak. Tapi 'dapur' operasional kantor (gaji & operasional rutin) harus tetap terjaga supaya pelayanan keuangan tidak lumpuh.

Pewawancara: Jadi kalau belanja modal masih bisa kita pertahankan atau hilangkan, tapi kalau gaji tidak bisa ya Pak?

d. Dapatkah Bapak/Ibu menjelaskan kebijakan di balik pertumbuhan belanja internal BKAD yang mencapai 20,04% di tahun 2024, sementara di sisi lain beberapa OPD teknis mengalami pemangkasan anggaran? Bagaimana BKAD menyelaraskan prioritas ini demi tercapainya tujuan pelayanan publik yang tetap seimbang?

(Pertanyaan Spontan Mahasiswa dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti kenaikan realisasi itu bisa jadi karena dana darurat (BTT) yang terpakai ya Pak?

Narasumber: Betul. Seperti kasus 2022 ke 2023. Di 2022 kami terlihat hemat (efisien) karena BTT tidak terpakai (sedikit bencana). Di 2023/2024 terserap banyak karena ada kejadian longsor atau kebutuhan mendesak. Jadi itu bukan boros, tapi kebutuhan darurat.

e. Selaku pengelola aset daerah, kami mencatat porsi belanja modal internal BKAD berada di angka 5–6%. Dalam perspektif jangka panjang, bagaimana Bapak/Ibu menilai urgensi investasi pada aset internal (seperti sistem IT atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana pendukung) guna meningkatkan efisiensi kerja BKAD dalam melayani OPD lainnya dibandingkan dengan belanja operasional?

Narasumber: Terkait ini, kami punya prinsip bahwa Belanja Modal itu sifatnya tidak wajib (Non-Mandatory), dia hanya penunjang.

Jujur saja, dalam kondisi keuangan daerah yang sulit, prioritas kami adalah:

- 1) Gaji & Operasional (Wajib).
- 2) Program Kemanusiaan/Layanan Masyarakat.
- 3) Baru Belanja Modal.

Apakah IT dan sarana itu penting? Penting. Tapi seandainya kami tidak beli komputer baru tahun ini, atau tidak rehab gedung, kami masih bisa jalan dengan fasilitas existing (yang ada). Pelayanan ke OPD lain tidak akan berhenti cuma gara-gara komputer lama. Jadi demi efisiensi, investasi internal ini yang kami tunda dulu.

(Pertanyaan Spontan Mahasiswa dalam Wawancara):

Pewawancara: Jadi tidak apa-apa di tahun itu tidak ada anggaran belanja modal sama sekali?

Narasumber: Tidak apa-apa. Karena belanja modal tidak wajib. Setiap OPD tidak harus menganggap pengadaan aset baru itu harus ada setiap tahun. Kita sesuaikan dengan kemampuan kantong daerah.

f. Merujuk pada prinsip *Value For Money*, langkah-langkah strategis apa yang telah disiapkan BKAD sebagai pusat koordinasi keuangan dalam mendorong efisiensi belanja rutin, sehingga setiap rupiah APBD ke depannya dapat lebih optimal dikonversi menjadi pembangunan aset yang produktif bagi masyarakat?

Narasumber: Prinsip *Value For Money* di BKAD itu fokusnya pada Optimalisasi Aset (Sewa-Menyewa). Investasi kami bukan seperti beli saham, tapi bagaimana belanja rutin yang kami keluarkan itu bisa menjaga aset daerah (Gedung, Bangunan, Lapangan) agar layak disewakan dan menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Langkah strategisnya:

- 1) Pemetaan Aset: Kami fokus mengelola aset gedung dan bangunan agar bisa disewakan ke pihak ketiga atau masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Iya, karena Belanja Tak Terduga tadi. Di 2023 mungkin kejadian bencananya lebih banyak, ada tanah longsor, dll. OPD mengajukan dana, cairilah uangnya. Karena uang keluar (terserap), maka rasio efisiensinya turun (karena uang habis terpakai), tapi itu untuk kebutuhan urgen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- h. Sebagai pengelola aset daerah, mengapa belanja modal aset internal sangat rendah dan fluktuatif (sekitar 5–6%) dibandingkan belanja operasional yang mendominasi?

Narasumber: Ini kembali ke skala prioritas anggaran kita. Belanja Modal itu sifatnya tidak wajib (Non-Mandatory), dia hanya penunjang. Seandainya pun tidak kita laksanakan (beli aset baru/rehab), kita masih bisa jalan dengan fasilitas yang seadanya (existing). Prioritas kami urutannya; Belanja Wajib: Gaji dan kegiatan rutin, Program Prioritas: Kemanusiaan/Masyarakat, Belanja Modal: Ini yang terakhir. Jadi kalau ada keterbatasan fiskal atau refocusing, belanja modal inilah yang bisa diabaikan atau dicoret duluan. Sementara gaji dan kegiatan prioritas harus tetap dipertahankan.

- i. Sebagai pengelola aset, mengapa investasi internal tidak diprioritaskan untuk efisiensi kerja OPD?

Narasumber: Pemahaman 'Investasi' di BKAD itu agak berbeda. Kami bukan perusahaan yang investasi beli alat biar kerja cepat. Fungsi investasi kami adalah Pemanfaatan Aset untuk Pendapatan (Sewa-Menyewa). Kami 'belanja' aset itu tujuannya supaya bisa disewakan dan menghasilkan PAD. Prioritas kami adalah memelihara aset yang menghasilkan uang, seperti Gedung, Bangunan, dan Lapangan.

Kalau investasi internal untuk alat kerja sendiri, selama yang lama masih bisa dipakai, ya kita pakai itu saja. Fokus kita adalah aset yang bisa 'dijual' (disewakan) ke pihak luar.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Seperti kan, nambah-nambah aset daerah kita boleh sih, seperti bangunan?

Narasumber: Investasi BKAD yang besar ini, kita sebenarnya belanja aja (pengelola). Kalau untuk mendapatkan (pendapatan), paling investasinya untuk sewa-menyewa yang paling penting. Sewa gedung, bangunan, lapangan. Itu yang kita genjot. Dulu masih ada sewa alat berat, tapi sekarang fokusnya di gedung dan bangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan,

2026

(_____)

NIP: _____

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dinas Kesehatan (DINKES): Pak Rama

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____
Jabatan : _____
OPD : _____
Tanggal Wawancara : _____

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Prioritas anggaran kita selama ini memang terlihat sangat didominasi oleh Belanja Operasi. Berdasarkan data LRA, rasio belanja operasi mencapai 91,33% atau sekitar Rp191,3 Miliar. Artinya, Dinas Kesehatan terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai, barang, dan jasa dibandingkan dengan belanja modal atau kegiatan fisik yang mendukung pelayanan langsung ke masyarakat. Padahal, belanja modal itu sangat penting untuk penambahan aset seperti alat medis.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti rasionya 91,33% ya Pak? Ibaratnya agak kurang lah fasilitasnya kalau operasionalnya segitu?

Narasumber: Iya, kurang baik. Artinya belanja operasinya ketinggian, harusnya di bawah itu. Kalau belanja modal terpenuhi, kebutuhan masyarakat lebih terjamin dan orang lebih nyaman berobat.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Ada beberapa kendala yang terus berulang. Pertama, masalah evaluasi di tingkat legislatif. Kita sudah menganggarkan di rencana awal, tapi

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Narasumber: Benar, itu namanya sama saja dengan pemborosan. Makanya perencanaan itu bagus, tapi kalau sampai di DPRD tidak disetujui atau terkendala teknis lelang, ya jadinya tidak jalan.

Narasumber: Dampaknya sangat terasa pada ketersediaan fasilitas penunjang bagi masyarakat. Terkadang kendala teknis di lapangan juga menghambat, seperti proses lelang yang gagal karena tidak ada pemenang lelang. Selain itu, faktor lokasi pembangunan yang berada di daerah-daerah terpencil juga membuat pembangunan kurang terlaksana tepat waktu. Karena porsi belanja operasinya terlalu besar dan belanja modalnya rendah, fasilitas medis kita menjadi kurang memadai.

Pewawancara: Ada juga dinas yang tidak ada belanja modalnya sama sekali ya Pak? Seperti Penanaman Modal atau Pangan?

Pendapatan BLUD melonjak hingga lebih dari +262,51% pada 2024. Apakah capaian ini mencerminkan kinerja nyata atau akibat target awal yang terlalu rendah?

Narasumber: Kita melihat ada kecenderungan di beberapa dinas, seperti Dinas Sosial itu pendapatan daerahnya cuma copy-paste dari tahun ke tahun. Sebelumnya cuma copy-paste saja, padahal rakyat kita banyak yang kurang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Artinya ini belanja operasinya ketinggian. Harusnya di bawah itu. Belanja operasi itu isinya belanja pegawai (termasuk jasa pelayanan), barang, dan jasa. Berarti ini Dinas Kesehatannya terlalu banyak menghabiskan anggaran untuk operasional birokrasi dan jasa pelayanan dibandingkan dengan kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik atau belanja modalnya. Idealnya porsi untuk fasilitas fisik harus lebih besar agar fasilitas medis kita bertambah.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Tadi saya hitung Pak, rasionya tembus 91,33%. Berarti itu kegiatannya kalah ya Pak sama belanja pegawainya?

Narasumber: Iya, belanja operasinya terlalu tinggi. Kurang baik itu porsinya kalau dibandingkan dengan penambahan aset untuk kesehatan masyarakat.

d. Mengapa daya serap belanja tertahan di kisaran 80–87% selama tiga tahun?

Narasumber: Terkadang kendalanya karena masalah waktu atau teknis pelaksanaan di lapangan. Misalnya sudah dianggarkan, tapi saat berjalan ada kendala lelang, seperti tidak ada pemenang lelang. Kemudian faktor lokasi juga berpengaruh besar, karena tempatnya jauh, terlalu masuk ke daerah-daerah terpencil. Itu yang membuat realisasi pembangunan kurang terlaksana tepat waktu sehingga penyerapannya tidak bisa 100%.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Seharusnya jangan sampai sudah ada anggarannya tapi pembangunannya tidak jalan ya Pak? Itu kan sayang budgetnya.

Narasumber: Benar, itu namanya sama saja dengan pemborosan. Sudah ada uangnya tapi karena kendala teknis atau lokasi yang jauh, manfaatnya tidak sampai ke masyarakat.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan,

2026

(_____)

NIP: _____

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Nama : _____

Jabatan : _____

OPD : _____

Tanggal Wawancara : _____

Narasumber: Gambaran umumnya, anggaran prioritas utama kami dialokasikan pada beberapa kegiatan krusial. Pertama, pengamanan hari besar seperti Natal, Tahun Baru (Nataru), dan Idul Fitri dalam satu paket penjagaan. Kedua, fasilitas pengantaran Jemaah Haji; di tahun 2022 kita masih lewat darat menggunakan bus ke Pekanbaru, lalu sekarang beralih lewat laut langsung dari pelabuhan. Ketiga, penyediaan serta pemeliharaan fasilitas jalan seperti markah dan lampu-lampu jalan (PJU) yang kami rawat rutin.

Narasumber: Kendala utama yang sering kami hadapi adalah faktor alam atau cuaca. Terutama untuk pekerjaan teknis di lapangan seperti pemeliharaan lampu jalan. Kalau cuaca tidak bersahabat, seperti hujan lebat atau banjir, kita tidak bisa memaksakan perbaikan karena faktor keselamatan (risiko tersetrum). Hal-hal seperti ini yang terkadang menghambat jadwal penyerapan anggaran yang sudah direncanakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Iya, sangat berpengaruh. Kalau alam tidak mendukung, kita tidak bisa kerja, otomatis penyerapan anggarannya juga tertunda.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Langkah efisiensi terbesar yang kami lakukan adalah pada pembayaran rekening listrik PJU (Penerangan Jalan Umum). Dulu sistemnya pascabayar dan tagihannya sering tidak terukur. Sekarang kami melakukan kebijakan meterisasi atau mengganti ke sistem Token (Prabayar). Dengan cara ini, pengeluaran daerah untuk listrik jalan jadi lebih efisien, terukur, dan tidak membengkak lagi, sehingga sisa anggarannya bisa dialokasikan ke pelayanan publik lainnya.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti dengan sistem token ini anggaran jadi lebih terkontrol ya Pak dibandingkan meteran biasa?

Narasumber: Betul, jadi lebih terukur. Kita tahu berapa yang habis dan tidak ada lagi tagihan yang tiba-tiba melonjak di luar perkiraan.

1. Melihat tren efektivitas pendapatan yang sempat melampaui target di tahun 2023 namun sedikit terkoreksi di tahun 2024, bagaimana Bapak/Ibu memandang akurasi dalam penetapan target pendapatan selama tiga tahun terakhir? Apakah terdapat tantangan dalam memetakan potensi riil di lapangan (seperti retribusi parkir atau perhubungan lainnya) agar target yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang dinamis?

Narasumber: Untuk retribusi parkir tepi jalan umum, tantangannya adalah target yang ditetapkan terlalu tinggi. Penghitungan potensi di awal seringkali mengasumsikan semua kendaraan yang lewat itu parkir, padahal kenyataannya tidak semua kendaraan berhenti atau parkir; banyak yang hanya lewat saja. Karena targetnya ketinggian dan tidak mencerminkan kondisi riil ekonomi masyarakat, maka capaian persentasenya terlihat rendah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Izin Pak, retribusi parkir di tepi jalan ini capaiannya rendah cuma 13,38%. Apakah ini karena ada kebocoran atau memang targetnya yang ketinggian Pak?

Narasumber: Itu karena targetnya ketinggian. Makanya untuk tahun 2025 ini targetnya sudah kami turunkan atau rasionalkan agar sesuai dengan potensi nyata di lapangan, supaya capaiannya nanti bisa lebih bagus dan realistis.

Pewawancara: Apa langkah strategis agar pembangunan fasilitas publik tidak mengalami keterlambatan?

Narasumber: Kami menggunakan Tabel Penilaian Risiko yang didampingi oleh Inspektorat. Jadi sebelum risiko keterlambatan itu muncul, kami sudah punya tabel pengendalian di setiap bidang untuk menangani masalah tersebut secara teknis agar tidak menghambat pembangunan.

2. Berdasarkan analisis rasio keserasian, terlihat bahwa Belanja Operasional tetap stabil di angka sekitar 80%. Bagaimana strategi Dinas Perhubungan dalam menyeimbangkan antara kebutuhan biaya operasional administratif kantor dengan kebutuhan pembangunan fisik fasilitas perhubungan yang juga sangat dinantikan oleh masyarakat?

Narasumber: Strategi kami dalam menyeimbangkan anggaran adalah dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat dan keselamatan. Prioritas utama kami adalah:

- 1) Pengamanan Hari Besar: Penjagaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta Idul Fitri. Ini menyerap anggaran operasional besar karena melibatkan personel.
- 2) Fasilitas Haji: Pelayanan pengantaran Jemaah Haji (kini beralih via laut).
- 3) Pemeliharaan Fisik: Penyediaan dan perawatan fasilitas jalan seperti markah jalan dan lampu PJU (Penerangan Jalan Umum). Jadi, operasional administratif tetap jalan, tapi pemeliharaan fisik fasilitas umum juga menjadi menu wajib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terdapat catatan mengenai penurunan daya serap Belanja Modal dari 86% (2022) menjadi 73% (2024). Mohon izin mengonfirmasi, kendala teknis atau administratif apa yang biasanya menjadi tantangan berulang setiap tahunnya? Apakah hal ini terkait dengan proses lelang pengadaan alat transportasi/fasilitas jalan, ataukah ada faktor eksternal lainnya yang menghambat realisasi fisik di lapangan?

Narasumber: Tantangan berulang yang menghambat realisasi fisik di lapangan setiap tahunnya bukan masalah administrasi lelang, melainkan Faktor Alam (Cuaca). Narasumber menekankan bahwa pekerjaan perbaikan fasilitas (terutama kelistrikan/PJU) sangat bergantung pada cuaca. Jika hujan atau banjir, pekerjaan harus dihentikan demi keselamatan (risiko tersetrum). Inilah yang sering membuat penyerapan anggaran fisik tertunda atau tidak maksimal.

4. Dengan daya serap belanja modal yang berada di angka 73%, bagaimana Dinas Perhubungan memastikan bahwa fasilitas perhubungan (seperti rambu jalan, penerangan, atau dermaga) tetap berfungsi optimal untuk melayani masyarakat Inhil, khususnya di wilayah yang rawan banjir atau daerah pesisir?

Narasumber: Meskipun ada kendala penyerapan, Dinas Perhubungan tetap melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset vital seperti Lampu Jalan (PJU) dan Markah Jalan. Untuk wilayah pesisir atau terkait transportasi air (seperti layanan Haji), fokusnya kini beralih menggunakan moda transportasi laut langsung dari pelabuhan (tidak lagi via darat ke provinsi), yang menuntut kesiapan fasilitas pelabuhan/dermaga.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Terkait fasilitas jalan tadi, itu pemeliharaannya rutin Pak?

Narasumber: Iya, seperti markah, lampu-lampu, itu kami yang merawat dan mengadakannya. Kalau dulu haji lewat darat, sekarang beralih ke laut, jadi fokus fasilitasnya menyesuaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Merujuk pada prinsip *Value For Money*, bagaimana Bapak/Ibu mengevaluasi setiap rupiah belanja yang dikeluarkan agar benar-benar efektif meningkatkan PAD sekaligus memberikan kenyamanan transportasi bagi warga Inhil?

Narasumber: Untuk efisiensi belanja (*Value For Money*), kami melakukan terobosan pada beban biaya terbesar dinas, yaitu rekening listrik PJU.

- 1) Efisiensi Belanja: Mengubah sistem listrik dari pascabayar ke Token (Meterisasi). Ini agar tagihan terukur dan tidak membengkak, sehingga anggaran lebih efektif.
- 2) Evaluasi PAD (Retribusi Parkir): Kami mengevaluasi bahwa target pendapatan parkir sebelumnya terlalu tinggi dan tidak realistis (menganggap semua kendaraan yang lewat pasti parkir).

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Izin Pak, retribusi parkir capaiannya rendah cuma 13%. Apakah ini karena kebocoran atau targetnya ketinggian?

Narasumber: Itu karena targetnya ketinggian. Diasumsikan semua kendaraan parkir, padahal kenyataannya cuma lewat. Makanya realisasinya terlihat rendah.

6. Apa langkah strategis yang direncanakan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan ketepatan target pendapatan di tahun mendatang, sekaligus mempercepat proses realisasi belanja modal agar pembangunan fasilitas publik tidak lagi mengalami keterlambatan?

Narasumber: Ada dua strategi utama untuk tahun mendatang:

- 1) Untuk Pendapatan (PAD): Melakukan Rasionalisasi Target. Di tahun 2025, target retribusi diturunkan/disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar persentase capaiannya bisa maksimal dan masuk akal.
- 2) Untuk Percepatan Realisasi Belanja Modal: Menggunakan Tabel Penilaian Risiko (Manajemen Risiko). Setiap bidang menyusun tabel risiko yang didampingi oleh Inspektorat. Sebelum risiko keterlambatan muncul, pengendaliannya sudah disiapkan di awal tahun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Apakah ada langkah strategis agar pembangunan fasilitas publik tidak mengalami keterlambatan?

Narasumber: Tapi strateginya, kami punya Tabel Penilaian Risiko. Ini didampingi Inspektorat. Jadi sebelum risiko muncul, kami sudah buat tabel pengendaliannya di masing-masing bidang. Itu strateginya.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan, 2026

(_____)

NIP: _____

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR): Pak Yusnaldi

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____
Jabatan : _____
OPD : _____
Tanggal Wawancara : _____

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Gambaran umum prioritas anggaran kami tidak muncul begitu saja, melainkan disusun secara berjenjang mulai dari aspirasi masyarakat (Musrenbang Desa, Kecamatan, hingga OPD). Setelah disepakati dalam KUA-PPAS dan menjadi APBD, itulah yang kami laksanakan. Secara spesifik, prioritas anggaran terbagi ke dalam bidang-bidang teknis utama di PUTR, yaitu; Bidang Bina Marga (Pembangunan Jalan dan Jembatan), Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bidang Tata Ruang, Bidang Jasa Konstruksi dan Perumahan/Kawasan Permukiman.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti sudah ditetapkan dari Setda-nya? Berarti dari dinas ini gak ada ya Pak (target rasio sendiri)? Sebetulnya kalau mau dibagi seperti itu bisa saja, tapi apakah itu yang terdapat?

Narasumber: Tidak. Kita perencanaan ini berdasarkan kebutuhan tematik. Misalnya kebutuhan rumah ibadah, jalan desa, atau irigasi. Kita tidak mematok 'Oh, belanja operasi harus sekian persen'. Itu bukan patokan kinerja kami.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: (Dalam rekaman ini, narasumber tidak menjabarkan kendala teknis lapangan seperti cuaca/lelang secara spesifik, namun menekankan pada batasan kewenangan perencanaan). Perencanaan kami terikat pada Mandatory Spending (Belanja Wajib) yang diatur undang-undang. Kendala atau pola penyerapan lebih ditentukan oleh aturan pusat, seperti UU HKPD terbaru yang mewajibkan belanja infrastruktur minimal 40%. Kami bekerja mengikuti DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang sudah disahkan, bukan berdasarkan analisis rasio internal.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Narasumber menegaskan bahwa proporsi anggaran infrastruktur sudah diatur persentasenya oleh pusat. *"Kalau proporsi infrastruktur itu, itu ada 10 persen minimal misalnya, sudah tuh pendidikan 20 persen, kesehatan sekian persen. Nah untuk Infrastruktur (Dinas PU) minimal 40%."* Jadi, efisiensi atau refocusing di sektor PUTR tetap harus mengacu pada batas minimal belanja modal infrastruktur yang sudah ditetapkan aturan (mandatory).

a. Pendapatan PUTR melonjak hingga 258,44%. Apakah ini akibat under-targeting agar terlihat berprestasi secara administratif?

Narasumber: Narasumber tidak membenarkan atau membahas lonjakan angka tersebut secara spesifik, namun ia menolak penggunaan analisis rasio keuangan (seperti efisiensi/efektivitas pendapatan) sebagai tolak ukur kinerja internal Dinas PUTR. Menurutnya, Dinas PUTR adalah dinas teknis belanja, bukan dinas penghasil pendapatan utama. Analisis mengenai target pendapatan dan rasio tersebut dianggap sebagai ranah BKAD atau Bappeda.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti kalau hasil dari rumus setiap OPD, datanya memang tidak dipegang oleh Dinas teknis seperti PUTR ya? Enggak ada rumus?

Narasumber: Enggak ada. Itu ranahnya analisis makro. Di buku pedoman teknis kami tidak ada menghitung rasio seperti itu. Kami pelaksana fisik.

b. Meskipun rasio efisiensi sangat baik (operasional <30%), mengapa daya serap belanja hanya sekitar 71,41%?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Narasumber menjelaskan bahwa mereka tidak menggunakan rasio "Operasional dan Belanja Modal" sebagai indikator keberhasilan penyerapan. Fokus mereka adalah Kebutuhan Tematik. Jika daya serap terlihat hanya 71%, itu harus dilihat dari realisasi fisik di lapangan (jalan/jembatan), bukan dari rumus akuntansi semata. Narasumber menyarankan agar analisis rasio seperti ini dikonfirmasi ke Tim Anggaran (TAPD) karena Dinas PUTR hanya memegang data fisik, bukan analisis rasio makro.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti dari dinas sendiri tidak ada data khusus mengenai rasio ini ya Pak? Misalnya target 2022 harus sekian persen?

Narasumber: Tidak ada. Kita tidak bisa mematok harus sekian persen. Kita berjalan sesuai kebutuhan masyarakat (Musrenbang) dan aturan Mandatory Spending pusat.

c. Belanja modal tumbuh masi hingga 46.97%(2022), 51.17%(2023), 70.69%(2024) Baik namun akses jalan di pelosok masih rusak parah dan rawan banjir didaerah perkotaan, Bagaimana penjelasan Bapak/Ibu? Bapak/Ibu, data menunjukkan bahwa 70% anggaran Dinas PUTR adalah untuk Belanja Modal (Betonisasi/Fisik). Namun, masyarakat masih mengeluhkan jalan-jalan di pelosok desa dan akses menuju sekolah di Tembilahan yang rusak parah dan rutin terendam banjir rob. Dengan porsi anggaran modal yang sangat besar ini, mengapa dampak perbaikan infrastruktur belum dirasakan secara merata oleh masyarakat?

Narasumber: Narasumber menjelaskan bahwa alokasi anggaran dan prioritas pembangunan di Dinas PUTR tidak didasarkan pada keinginan dinas semata atau target persentase pertumbuhan belanja modal, melainkan murni hasil dari aspirasi masyarakat (*Bottom-up*) dan Aturan Wajib (Mandatory Spending) dari pusat.

- 1) Mekanisme Aspirasi: Program pembangunan (jalan/drainase) disusun berjenjang mulai dari Musrenbang Desa, naik ke Kecamatan, hingga menjadi APBD. Jadi apa yang dibangun adalah apa yang diusulkan masyarakat dan disepakati dalam KUA-PPAS.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Mandatory Spending*: Porsi anggaran infrastruktur yang besar itu merupakan amanat Undang-Undang (UU HKPD) yang mewajibkan belanja infrastruktur minimal 40%.

3) *Pembagian Bidang*: Dana tersebut dibagi ke bidang teknis: Bina Marga (Jalan/Jembatan) dan Sumber Daya Air (untuk penanganan banjir/drainase). Jadi jika anggaran besar, itu karena aturan mewajibkan demikian untuk mengejar kebutuhan infrastruktur.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak selama periode 2022–2024?

Narasumber: Program kegiatan ini tidak muncul begitu saja. Ini disusun mulai dari bawah, dari rakyat. Ada Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, disampaikan ke OPD, baru jadi APBD. Kalau sudah jadi APBD, itulah program yang kami laksanakan. Prioritasnya ada di Bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air.

d. Rasio operasional Bapak/Ibu sangat kecil (28%). Apakah minimnya anggaran operasional/rutin ini menyebabkan fungsi pemeliharaan jalan lama terabaikan karena dinas terlalu fokus pada proyek pembangunan jalan beton yang baru?

Narasumber: Dinas PUTR tidak pernah mematok target rasio operasional harus sekian persen. Angka 28% itu adalah hasil statistik, bukan target kinerja. Perencanaan di PUTR didasarkan pada Kebutuhan Tematik (misalnya: butuh perbaikan jalan desa A, atau irigasi B), bukan berdasarkan rumus "harus ada keseimbangan antara operasi dan modal". Dinas PUTR bekerja berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), sehingga kecilnya rasio operasional tidak serta merta berarti pemeliharaan diabaikan, melainkan karena porsi belanja modal (fisik) memang diwajibkan sangat besar oleh aturan pusat.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Sebetulnya kalau mau dibagi seperti rumus itu bisa saja, tapi apakah itu yang terdapat (menjadi patokan)?

Narasumber: Tidak. Kita perencanaan ini berdasarkan kebutuhan tematik. Misalnya kebutuhan rumah ibadah, jalan desa. Kita tidak mematok 'Oh, belanja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasi harus sekian persen'. Tapi memang ada aturan mandatory, misalnya pendidikan 20%, kesehatan sekian, nah untuk Infrastruktur (PU) minimal 40%.

e. Hitungan saya menunjukkan rasio efisiensi Bapak/Ibu sangat baik (Sangat Efisien). Namun, angka realisasi belanja hanya 71,04%. Artinya, ada sekitar 29% dana yang sudah dianggarkan namun tidak terpakai dan mengendap sebagai SILPA. Mengapa dana sebesar itu (miliaran rupiah) gagal diserap untuk membangun jembatan atau drainase, padahal rakyat sangat membutuhkannya?

Narasumber: Ketika ditanya mengenai angka realisasi atau sisa anggaran (SILPA) berdasarkan rumus rasio efisiensi, narasumber menyatakan bahwa Dinas PUTR tidak memegang data analisis rasio tersebut. Narasumber menekankan posisi mereka sebagai Pelaksana Teknis Fisik, bukan perencana makro ekonomi. Menurut narasumber, analisis mengenai "mengapa ada sisa anggaran sekian persen" atau hitungan efisiensi belanja adalah ranah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau BKAD/Bappeda. Dinas PUTR hanya fokus melaksanakan fisik sesuai DPA yang turun.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti kalau hasil dari rumus setiap OPD, datanya memang tidak dipegang oleh Dinas teknis seperti PUTR ya Pak? Enggak ada rumus?

Narasumber: Enggak ada. Itu ranahnya analisis makro. Di buku pedoman teknis kami tidak ada menghitung rasio seperti itu. Kami pelaksana fisik. Mungkin data itu ada di BKAD atau Bappeda.

f. Apakah rendahnya serapan ini disebabkan oleh kendala cuaca (pasang surut banjir rob), keterlambatan proses lelang, atau adanya perencanaan teknis yang tidak matang di awal tahun?

Narasumber: Dalam wawancara, narasumber tidak secara spesifik "mengkambinghitamkan" cuaca atau proses lelang sebagai penyebab utama rendahnya serapan di forum ini (berbeda dengan Dishub yang eksplisit menyebut cuaca). Narasumber lebih menekankan bahwa Perencanaan Teknis mereka sudah sangat matang karena melalui proses berjenjang dari bawah (*Bottom-up*).

- Mekanisme Perencanaan: Program tidak muncul tiba-tiba, tapi dari Musrenbang Desa -> Kecamatan -> OPD -> KUA PPAS -> APBD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembelaan: Narasumber menyiratkan bahwa jika ada anggapan perencanaan tidak matang, itu keliru, karena mereka bekerja berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang merupakan hasil kesepakatan kebutuhan rakyat di Musrenbang.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti sudah ditetapkan dari Setda-nya? Berarti dari dinas ini gak ada ya Pak (evaluasi serapan pakai rumus)? Misalnya target di 2022 harus sekian?

Narasumber: Gak bisa. Kita perencanaan ini berdasarkan kebutuhan tematik dan teknis. Misalnya kebutuhan rumah ibadah, jalan desa, atau irigasi. Kita tidak mematok rasio, tapi melaksanakan apa yang sudah ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

- g. Jika membandingkan data 2022 hingga 2024, porsi modal PUTR selalu yang terbesar di Inhil. Bagaimana Bapak/Ibu mengevaluasi prinsip *Value For Money* (Manfaat bagi Rakyat) dari anggaran tersebut? Apakah Bapak/Ibu merasa porsi modal 70% tersebut sudah 'serasi' dengan kualitas jalan yang dinikmati masyarakat saat ini?

Narasumber: Narasumber menjelaskan bahwa porsi belanja modal yang besar (mencapai 70% atau dominan) bukan sekadar pilihan dinas untuk mengejar rasio "serasi", melainkan karena adanya Aturan Wajib (Mandatory Spending) dari Pemerintah Pusat. Mandatory Spending; Ada kewajiban undang-undang (UU HKPD) bahwa belanja infrastruktur minimal 40%. Jadi, porsi besar itu adalah bentuk kepatuhan terhadap regulasi pusat. *Value For Money* (Manfaat); Menurut narasumber, manfaat diukur dari terpenuhinya usulan "Tematik" masyarakat (seperti jalan desa/rumah ibadah) yang masuk lewat Musrenbang, bukan diukur dari rasio statistik keserasian.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Sebetulnya kalau mau dibagi seperti rumus itu bisa saja (untuk melihat keserasian), tapi apakah itu yang terdapat?

Narasumber: Tidak. Itu diajar (diatur) pusat. Kalau proporsi infrastruktur itu, itu ada minimalnya. Pendidikan 20%, Kesehatan sekian persen. Nah, untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Infrastruktur (PU) minimal 40%. Jadi kami mengikuti aturan itu, bukan rumus rasio keserasian sendiri.

Pewawancara: Meskipun efisiensi dianggap "Sangat Efisien", tapi realisasi belanja hanya 71%. Ada sisa sekitar 29% dana (miliaran rupiah) yang mengendap jadi SILPA. Mengapa dana sebesar itu tidak digunakan untuk memperbaiki jalan yang berlubang atau drainase, padahal rakyat sangat membutuhkannya?

Narasumber: Begini ya, kita harus melihat secara objektif. Masalah SILPA atau sisa anggaran itu ranah analisis makro di BKAD atau Bappeda, kami ini pelaksana fisik di lapangan. Namun soal jalan berlubang, kita jangan selalu bertanya "Kenapa harus pemerintah terus yang memperbaiki?". Harusnya masyarakat juga punya jiwa gotong royong. Kalau ada jalan rusak atau berlubang sedikit, ya gotong royonglah masyarakat di situ. Bisa dengan cara swadaya, kasih sedikit uang atau bantuan kepada warga yang mau memperbaiki jalan itu, biar sama-sama enak dan cepat tuntas. Jadi jangan cuma pasif menunggu pemerintah turun tangan; harus ada inisiatif dan semangat gotong royong dari warga sendiri agar fasilitas kita terjaga bersama.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan,

2026

UIN SUSKA RIAU

(_____)

NIP: _____

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6. Dinas Perikanan : Pak M. Taufik

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____

Jabatan : _____

OPD : _____

Tanggal Wawancara : _____

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Prioritas anggaran kita selama ini banyak difokuskan pada penguatan kelompok nelayan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). Kita memverifikasi usulan-usulan yang masuk, baik itu usulan reguler maupun usulan melalui jalur aspirasi dewan (Pokir) untuk daerah-daerah seperti Tempuling, Kempas, atau Reteh. Selain itu, fokus utama kita saat ini adalah pada penyelenggaraan pelatihan untuk memberikan keahlian teknis kepada nelayan agar mereka tidak hanya bergantung pada bantuan alat.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti bantuan itu banyak masuk lewat jalur aspirasi dewan (Pokir) ya, Pak?

Narasumber: Iya, anggota dewan punya konstituen nelayan di daerah pemilihannya. Mereka masukkan usulan lewat aplikasi juga, dan kami di dinas bertugas memverifikasi usulan tersebut secara teknis. Jangan sampai bantuannya salah sasaran atau kelompoknya fiktif. Kami seleksi betul mana yang lengkap administrasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Kendala utamanya adalah masalah administrasi dan waktu pengusulan di aplikasi SIPD. Kelompok nelayan itu harus mengajukan usulan satu tahun sebelum alokasi; misalnya untuk anggaran tahun 2027, usulan sudah harus masuk di tahun 2025. Masalahnya, nelayan kita ini terkadang hanya tahu cara menangkap ikan saja, tapi urusan administrasi dan Skripsi mereka sering tidak paham atau terlambat mengurusnya, sehingga sistem di aplikasi terkunci.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti kendala administrasi dari kelompok nelayan itu sendiri ya, Pak?

Narasumber: Iya, itu salah satunya. Kami sering membantu memverifikasi, tapi jika dalam waktu yang ditentukan dokumen tidak lengkap, ya kami tinggalkan karena sistem di aplikasi itu terkunci secara otomatis.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Dampaknya adalah kami mengubah pola pemberian bantuan. Sekarang postur anggaran kita lebih banyak ke penyelenggaraan pelatihan. Kita ajak nelayan ikut pelatihan, kita beri makan, minum, dan uang saku agar mereka punya keahlian. Kami ingin mereka mandiri, karena masalah klasiknya adalah masyarakat sering merasa bantuan itu adalah hak yang harus didapat terus-menerus tanpa ada peningkatan produksi yang nyata.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Bagaimana dengan efektivitas bantuan yang diberikan? Saya melihat di data tahun 2022-2023 efektivitas belanja modalnya kurang maksimal.

Narasumber: Ini masalah klasik. Kadang kelompok sudah diberikan bantuan aset, tapi bukannya meningkatkan produksi malah minta bantuan lagi di tahun berikutnya. Makanya sekarang kita fokus ke pelatihan agar mentalitasnya berubah dari sekadar penerima bantuan menjadi nelayan yang mandiri dan maju.

a. Berdasarkan rasio efektivitas, pendapatan sektor perikanan secara konsisten tertahan di bawah 4% selama tiga tahun terakhir. Mengapa potensi ekonomi maritim Inhil yang begitu luas, dengan mayoritas masyarakat bermata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencapaian sebagai nelayan, belum mampu tergarap secara fiskal menjadi PAD yang signifikan? Kendala regulasi atau sarana apa yang menyebabkan sektor ini belum produktif bagi daerah?

Narasumber: Masalah pendapatan ini memang pelik karena kita terkendala pada instrumen penarikan dan regulasinya. Inhil memang punya potensi maritim yang sangat besar, namun banyak hasil laut kita itu langsung keluar tanpa tercatat secara administratif sebagai PAD kita. Selain itu, metode penangkapan nelayan kita juga masih banyak yang bersifat tradisional, sehingga potensi ekonomi yang luas ini belum mampu terkonversi menjadi angka fiskal yang signifikan bagi daerah.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Mengapa potensi ekonomi maritim Inhil yang luas belum mampu bergerak secara fiskal menjadi PAD yang signifikan, Pak?

Narasumber: Ya itu tadi, instrumen penarikan dan regulasinya yang masih sulit. Banyak hasil laut yang "lewat" begitu saja tanpa masuk ke pencatatan pendapatan daerah kita. Nelayan kita juga masih tradisional dalam pembinaannya.

- b. Data menunjukkan angka yang cukup mengejutkan pada Rasio Belanja Operasional yang mencapai rentang 201% hingga 966%. Secara teknis akuntansi, angka ini menunjukkan biaya rutin birokrasi jauh melampaui total anggaran dinas yang tersedia. Apakah ini merupakan dampak dari penyesuaian akun belanja, hutang belanja masa lalu, ataukah mencerminkan beban birokrasi yang terlalu besar sehingga menyerap porsi anggaran dinas secara tidak proporsional?

Narasumber: Angka belanja operasional yang tinggi ini mencerminkan perubahan postur kegiatan kami. Saat ini, anggaran kami banyak dialokasikan untuk penyelenggaraan pelatihan. Kegiatan pelatihan itu komponennya adalah belanja operasional (makan, minum, uang saku peserta, honor instruktur), bukan belanja modal. Selain itu, beban operasional juga terserap untuk kegiatan verifikasi lapangan. Kami harus turun memverifikasi kelompok nelayan (baik usulan reguler maupun Pokir dewan) untuk memastikan mereka bukan kelompok fiktif. Proses administrasi di aplikasi SIPD juga memakan sumber daya operasional untuk memastikan usulan masuk tepat waktu.

Pewawancara: Berarti sekarang fokusnya bukan kasih alat lagi ya Pak, tapi pelatihan?

Pada tahun 2024, terjadi kontraksi anggaran ekstrem sebesar -44% pada belanja Dinas Perikanan. Mengingat Inhil memiliki garis pantai yang panjang, apakah penurunan anggaran yang sangat drastis ini menandakan bahwa sektor perikanan tidak lagi menjadi prioritas dalam rencana strategis daerah saat ini? Bagaimana Dinas menjalankan program pembinaan nelayan dengan anggaran yang dipangkas hampir setengahnya?

Narasumber: Penurunan ini bukan berarti tidak prioritas, tapi lebih kepada kendala teknis sistem perencanaan (SIPD). Aturan sekarang sangat ketat: usulan harus masuk satu tahun sebelum tahun anggaran. Untuk anggaran 2024, usulan harus sudah lengkap di 2023. Banyak kelompok nelayan kita yang terlambat mengajukan atau Skripsinya tidak lengkap secara administrasi. Ketika batas waktu lewat, sistem di aplikasi terkunci otomatis (locked). Akibatnya, banyak program yang seharusnya bisa dianggarkan jadi tidak bisa masuk karena syarat administrasinya gagal di awal. Program pembinaan akhirnya kami jalankan sebatas yang berhasil lolos verifikasi SIPD saja.

Pewawancara: Jadi kalau telat *input*, hangus ya Pak anggarannya?

Dari sisi Rasio Kesenjangan, alokasi Belanja Modal hanya sebesar 0,82% di tahun 2024. Artinya, hampir seluruh anggaran habis untuk urusan rutin kantor. Dengan porsi bantuan fisik (seperti alat tangkap atau mesin kapal) yang kurang dari 1%, apa yang masih bisa menjadi program unggulan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'kebanggaan' dinas ini dalam memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan?

Narasumber: Program unggulan kami bergeser dari "Bantuan Fisik/Aset" menjadi "Peningkatan Kapasitas SDM". Kami menyadari bahwa memberikan aset (alat tangkap/mesin) seringkali tidak efektif karena menimbulkan ketergantungan. Program unggulan saat ini adalah pelatihan teknis. Kami ingin nelayan mandiri dengan skill yang baru, bukan nelayan yang setiap tahun hanya menunggu bantuan mesin baru. Manfaat langsungnya adalah ilmu dan sertifikasi keahlian, bukan lagi barang fisik.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Efektivitas belanja modalnya kan kurang maksimal Pak di data saya, kenapa begitu?

Narasumber: Itu masalah klasik. Dikasih bantuan aset, bukannya produksi naik, malah tahun depan minta lagi. Makanya belanja modal kita kurangi, kita genjot di pelatihannya.

- Merujuk pada prinsip *Value For Money* (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas), bagaimana Bapak/Ibu mengevaluasi penggunaan anggaran selama 3 tahun ini? Apakah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk operasional dinas sudah sebanding dengan kemajuan teknologi nelayan di lapangan?

Narasumber: Evaluasi kami menunjukkan adanya tantangan besar pada "mentalitas" nelayan. Selama 3 tahun ini, kami melihat bahwa sekadar menggelontorkan uang untuk bantuan alat tidak serta merta memberikan *value* berupa peningkatan produksi. Seringkali bantuan dianggap sebagai "hak" rutin. Oleh karena itu, *Value For Money* sekarang kami kejar melalui perubahan pola pikir. Mungkin hasilnya tidak terlihat fisik (seperti tumpukan jaring baru), tapi diharapkan terlihat dari kemandirian nelayan jangka panjang. Meskipun kami akui, mengubah kultur nelayan tradisional menjadi modern itu sangat sulit dan butuh waktu lama.

- Jika data menunjukkan birokrasi menghabiskan lebih dari 90% anggaran sementara nelayan hanya mendapatkan kurang dari 1% dalam bentuk bantuan fisik, bagaimana dinas merespons persepsi masyarakat bahwa kebijakan anggaran saat ini belum berpihak pada rakyat kecil di pesisir?"Pendapatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sektor perikanan tertahan di bawah 4% selama tiga tahun. Mengapa potensi ekonomi maritim Inhil tidak tergarap secara fiskal padahal di inhil banyak masyarakat mata penjahariaanya sebagai nelayan?

Narasumber: Persepsi itu muncul karena masyarakat masih mengukur keberpihakan dari "berapa barang yang saya terima". Padahal, biaya birokrasi yang besar itu digunakan untuk memfasilitasi mereka juga, seperti memverifikasi Skripsi agar bantuan (terutama dari aspirasi Dewan/Pokir) tepat sasaran dan tidak jatuh ke kelompok fiktif.

Kami juga meluruskan bahwa anggaran operasional itu lari ke rakyat juga dalam bentuk fasilitas pelatihan (uang saku dan konsumsi). Jadi keberpihakannya ada, hanya bentuknya bukan lagi bagi-bagi barang secara masif.

Pertanyaan Tambahan: Pendapatan sektor perikanan tertahan di bawah 4% selama tiga tahun. Mengapa potensi ekonomi maritim Inhil tidak tergarap secara fiskal?

Narasumber: Ini masalah yang pelik. Potensi kita besar, tapi instrumen penarikan retribusi dan regulasinya lemah.

- 1) Kebocoran Wilayah: Banyak hasil tangkapan laut kita (ikan/udang) langsung dibawa keluar daerah atau diekspor di tengah laut tanpa mendarat di pelabuhan kita, sehingga tidak tercatat dan tidak bisa ditarik retribusinya.
- 2) Sifat Tradisional: Nelayan kita mayoritas tradisional, sulit dikenakan pajak atau retribusi yang ketat.
- 3) Regulasi: Kita belum memiliki regulasi yang kuat untuk memaksa hasil laut mendarat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) lokal sebelum dijual keluar.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Mengapa potensi ekonomi maritim Inhil yang luas belum mampu bergerak secara fiskal, Pak?

Narasumber: Ya karena itu tadi, instrumen penarikan dan regulasinya. Barangnya ada, potensinya ada, tapi "lewat" begitu saja tanpa masuk ke kas daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan,

2026

(_____)

NIP: _____

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dinas Sosial (DINSOS): Ibu Zahra Diannisa

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____

Jabatan : _____

OPD : _____

Tanggal Wawancara : _____

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Selama periode 2022–2024, prioritas utama kami tetap terfokus pada penguatan jaring pengaman sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti lansia terlantar, anak yatim, serta penyandang disabilitas. Selain itu, fokus anggaran diarahkan pada validasi dan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Mengingat kondisi geografis Indragiri Hilir, penanganan fakir miskin dan kesiapsiagaan bencana, khususnya bantuan logistik tanggap darurat untuk korban banjir rob, menjadi bagian krusial dalam alokasi anggaran kami setiap tahunnya.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Kendala utama yang sering muncul adalah sinkronisasi data antara pelaporan dari tingkat desa/kecamatan dengan sistem verifikasi di tingkat pusat yang memerlukan waktu cukup lama. Secara geografis, wilayah kita yang didominasi perairan juga menjadi tantangan besar dalam distribusi bantuan ke pelosok, karena biaya transportasi air yang cukup tinggi dan sangat bergantung pada kondisi alam. Selain itu, fluktuasi kapasitas fiskal daerah seringkali memaksa kami melakukan penyesuaian anggaran di tengah jalan, yang secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknis berdampak pada kecepatan penyerapan anggaran belanja barang yang sudah direncanakan di awal tahun.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Kebijakan efisiensi dan *refocusing* anggaran menuntut kami untuk lebih selektif dalam menetapkan skala prioritas. Dampaknya terasa pada pengurangan kegiatan yang bersifat administratif dan seremonial di kantor. Namun, kami memastikan bahwa pelayanan dasar dan penyaluran bantuan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas yang tidak boleh dikurangi. Untuk menutupi celah pendanaan akibat efisiensi tersebut, kami meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta mengoptimalkan peran pilar-pilar sosial di lapangan agar kualitas pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tetap terjaga meski dengan anggaran yang terbatas.

a. Bapak/Ibu, merujuk pada hasil hitungan rasio saya, belanja operasional di tahun 2024 tercatat mencapai 640%. Secara teknis, apakah angka ini muncul karena adanya pembayaran hutang belanja tahun-tahun sebelumnya, ataukah ada pergeseran anggaran bantuan sosial darurat yang cukup besar di tengah tahun sehingga melampaui perencanaan awal?"

Narasumber: Terdapat penyesuaian anggaran melalui mekanisme perubahan APBD/anggaran internal, khususnya terkait kebutuhan yang bersifat mendesak seperti bantuan sosial darurat dan kegiatan operasional penunjang lainnya.

b. Bagaimana Dinas Sosial menyikapi perbedaan yang sangat lebar antara target anggaran operasional dengan realisasinya ini? Apakah ada kendala dalam sistem perencanaan di awal tahun?"

Narasumber: Dinas Sosial memandang perbedaan yang sangat besar antara target anggaran operasional dan realisasinya sebagai indikasi bahwa perencanaan anggaran di awal tahun belum sepenuhnya sesuai penanganan masalah sosial. Meskipun sebagian disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak terduga dan perubahan kebijakan di tengah tahun, kondisi ini tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam proyeksi kebutuhan dan penetapan pagu awal.

Data menunjukkan terjadi kontraksi pertumbuhan belanja sebesar -21,93% pada tahun 2024. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan fenomena banjir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Kontraksi pertumbuhan belanja sebesar -21,93% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa penurunan alokasi anggaran Dinas Sosial lebih dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian anggaran dan keterbatasan kapasitas anggaran daerah, bukan semata-mata oleh penurunan kebutuhan sosial.

Narasumber: tidak, karena prioritas anggaran lebih diarahkan pada belanja langsung kepada masyarakat, seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan kelompok rentan dan cenderung mengutamakan belanja yang berdampak langsung dan cepat dirasakan oleh Masyarakat.

Narasumber: Belanja operasional tidak seluruhnya bersifat administratif kantor. didalamnya termasuk biaya operasional lapangan seperti honor pendamping sosial, transportasi petugas, distribusi bantuan, pengantaran logistik ke daerah yang bersifat belanja barang dan jasa.

Narasumber: pengadaan logistik dan bantuan sosial dilakukan melalui belanja operasional, khususnya pada pos belanja barang dan jasa seperti belanja yang diserahkan kepada masyarakat. Artinya, meskipun belanja modal relatif minim, kebutuhan logistik tetap dapat dipenuhi melalui pengadaan langsung sesuai kebutuhan saat terjadi bencana dan bantuan logistik dari Dinas Sosial Provinsi Riau dan Sentra Abiseka Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Inhil sering mengalami musibah banjir rob. Dengan postur anggaran yang didominasi biaya rutin kantor, bagaimana Dinas Sosial memastikan stok logistik dan bantuan sosial tetap tersedia secara fisik bagi warga yang terdampak, mengingat belanja modal asetnya sangat minim?

Narasumber:

- meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, antara lain melalui pengendalian biaya operasional, optimalisasi pola penyaluran bantuan, serta pemanfaatan sumber daya yang sudah ada agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
- Melakukan penyesuaian prioritas program, dengan memfokuskan anggaran pada kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat miskin dan rentan.
- Memperkuat koordinasi dan kolaborasi pendanaan, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Sentra Abiseka Kementerian Sosial Republik Indonesia maupun mitra nonpemerintah, untuk mengakses program bantuan sosial tambahan sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun pendapatan daerah menurun.
- Sebagai instansi garda terdepan kesejahteraan rakyat, bagaimana Dinas Sosial menyeimbangkan antara kebutuhan biaya kantor yang besar dengan hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan fisik yang nyata? Apakah ada rencana untuk meningkatkan porsi belanja modal di tahun-tahun mendatang agar lebih 'serasi'?

Narasumber: Dinas Sosial menyeimbangkan kedua hal tersebut dengan mengoptimalkan belanja operasional agar tetap mendukung kegiatan lapangan. Ya, Dinas Sosial berencana meningkatkan porsi belanja untuk diserahkan kepada pihak ke 3 (tiga) secara bertahap di tahun-tahun mendatang seperti sarana pendukung pelayanan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan Narasumber:

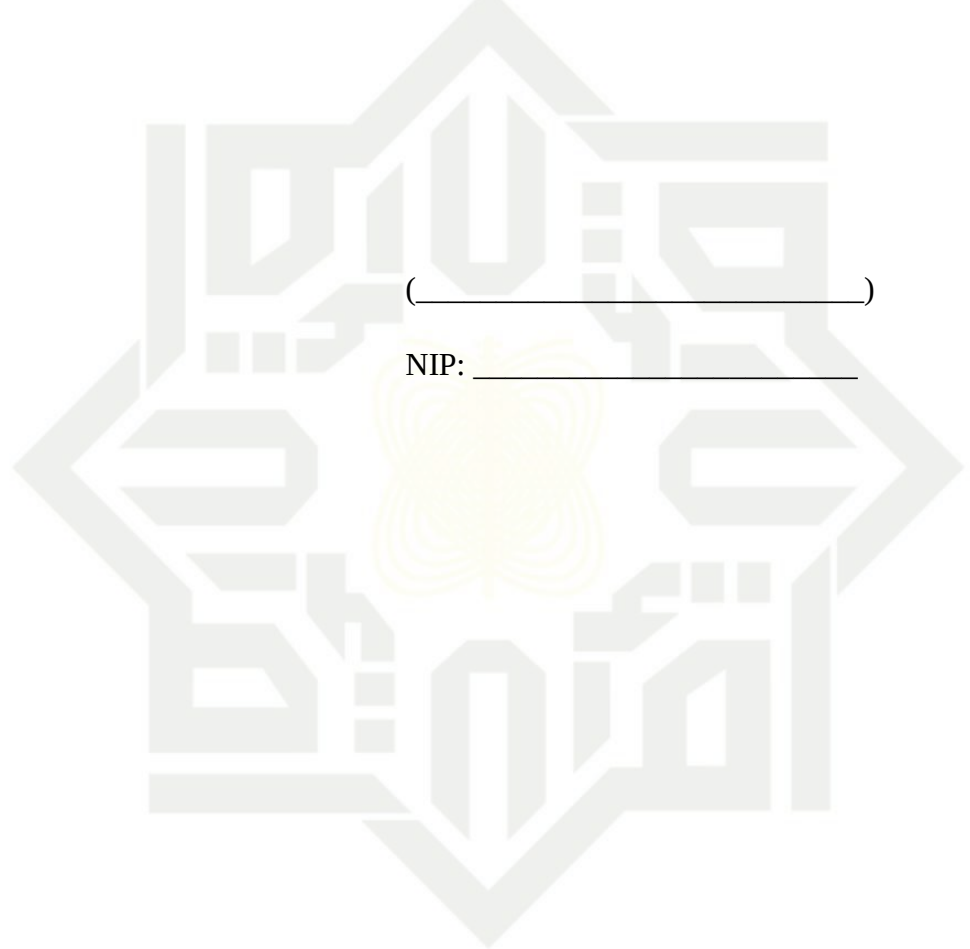
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan,

2026

(_____)

NIP: _____



UIN SUSKA RIAU

Narasumber: Iya, Gerakan Pangan Murah. Itu kita keliling ke kecamatan-kecamatan. Anggarannya banyak lari ke situ, untuk subsidi harga dan transportasi distribusi barangnya.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Kendala yang paling sering dan berulang ada dua.

- 1) Faktor Geografis: Kabupaten Inhil ini daerahnya unik, banyak sungai dan parit. Akses darat ke pelosok banyak yang rusak. Ini membuat biaya operasional dan transportasi untuk distribusi pangan menjadi sangat tinggi dan memakan waktu.
- 2) *Refocusing* Anggaran (Defisit): Hampir setiap tahun kami menghadapi pemotongan pagu anggaran karena kondisi keuangan daerah yang defisit. Jadi rencana kegiatan yang sudah disusun (Plan A, Plan B) seringkali tidak bisa berjalan semua karena anggarannya dikurangi di tengah jalan.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti kalau defisit itu, program yang sudah direncanakan bisa batal ya Pak?

Narasumber: Bukan batal total, tapi dikurangi volumenya. Misalnya mau ke 10 lokasi, karena dipotong, jadi cuma bisa 5 lokasi.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Dampaknya tentu terasa pada cakupan wilayah pelayanan. Karena anggaran dipangkas, kami tidak bisa menjangkau semua daerah. Strateginya, kami tidak menurunkan kualitas, tapi kami memilih Lokus Prioritas. Kami menggunakan Peta Kerentanan Pangan dan data Stunting. Daerah yang merah (rawan pangan atau tinggi stunting), itu yang kami dahulukan. Jadi pelayanan publik tetap berjalan efektif menyasar mereka yang paling membutuhkan.

a. Mengapa pendapatan sektor pertanian masih rendah meskipun mayoritas masyarakat Inhil bekerja sebagai petani?

Narasumber: Ini yang perlu diluruskan. Dinas Pangan itu bukan OPD Penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kami ini OPD tipe Pelayanan. Tupoksi kami adalah menjaga ketersediaan dan keamanan pangan, bukan memungut pajak dari petani. Kalaupun ada pendapatan yang tercatat, itu kecil sekali, biasanya dari retribusi layanan sertifikasi PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) untuk

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Narasumber: Betul. Kami bukan seperti Bapenda. Kami pelayanan. Kalau kami targetkan pendapatan tinggi, nanti malah membebani masyarakat yang mau sertifikasi pangan.

Narasumber: (Narasumber terkejut dengan data 0% dan langsung melakukan konfirmasi ke staf diluar ruangan). Sebentar, masa nol persen? Perasaan tahun 2024 kemarin kita ada belanja modal.

(Staf menjawab: "Ada Pak, laptop.")

Terkait kebutuhan alat produksi petani (seperti traktor), itu ranahnya Dinas Pertanian, bukan Dinas Pangan. Dinas Pangan lebih ke distribusi dan cadangan pangan, jadi belanja kami lebih banyak di "Belanja Barang dan Jasa" (beli beras/minyak untuk dijual murah), bukan belanja modal fisik yang besar.

Pewawancara: Oh, berarti ada ya Pak belanja modalnya, cuma mungkin nilainya kecil jadi terbulatkan 0%?

Anggaran dipangkas hingga -44%. Bagaimana strategi menjaga ketahanan pangan daerah dalam kondisi ini?

Narasumber: Dengan pemangkasan anggaran hampir setengahnya, strategi kami adalah Efisiensi Basis Lokus. Kami tidak lagi menyebar program secara merata ("bagi rata"), tapi fokus pada Daerah Rawan Pangan. Kami punya data peta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerentanan pangan. Desa-desa yang masuk kategori sangat rawan, itulah yang kami serbu dengan bantuan pangan dan pasar murah. Daerah yang sudah mandiri pangan, kami lepas dulu. Jadi ketahanan pangan tetap terjaga di titik-titik yang paling.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan, 2026

(_____)

NIP: _____

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

9. Dinas Perkebunan: Pak Surya

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____
Jabatan : _____
OPD : _____
Tanggal Wawancara : _____

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Prioritas anggaran Dinas Perkebunan selama periode tersebut tetap fokus pada Infrastruktur Perkebunan. Mengingat mayoritas masyarakat Inhil adalah petani kelapa, masalah utama yang dihadapi adalah kerusakan kebun akibat intrusi air laut. Oleh karena itu, anggaran kami diprioritaskan untuk perbaikan Trio Tata Air (Tanggul, Saluran, dan Pintu Air/Klep). Kami mengerahkan alat berat (ekskavator) untuk menyelamatkan kebun-kebun masyarakat yang tanggulnya jebol.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Prioritasnya kemana aja Pak arahnya?

Narasumber: Tetap ke infrastruktur. Kita bantu perbaiki tanggul masyarakat. Itu yang paling utama.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Kendala yang paling krusial dan berulang adalah masalah Tunda Bayar akibat kondisi kas daerah yang defisit.

Secara fisik pekerjaan di lapangan mungkin selesai, tapi pembayaran kepada pihak ketiga (penyedia) sering tertunda hingga menyeberang tahun anggaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tahun 2023, kami mengalami tunda bayar sekitar Rp125 Juta.
- Tahun 2024, angka tunda bayar meningkat menjadi Rp390 Juta.

Ini menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan daerah (fiskal) tidak sanggup menutupi rencana belanja yang sudah ditetapkan, sehingga menghambat kelancaran program.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti tunda bayar ini mencerminkan kondisi keuangannya sedang tidak baik ya Pak?

Narasumber: Betul. Kalau ada tunda bayar, itu cerminan bahwa pendapatan daerah tidak mampu mendongkrak atau membayar lunas semua belanja. Barang tidak ada (uang kas kosong), kalau dipaksa belanja pun hanya akan menambah hutang.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Dampak efisiensi atau rasionalisasi anggaran tentu berpengaruh pada volume bantuan. Misalnya, untuk operasional alat berat yang tadinya direncanakan butuh minyak (BBM) 1 ton, karena efisiensi dikurangi menjadi setengah ton. Otomatis jam kerja alat berat berkurang dan panjang tanggul yang bisa diperbaiki juga berkurang. Namun, kami berusaha agar dampak ini tidak mematikan program prioritas, hanya mengurangi cakupannya saja.

a. Mengapa sektor perkebunan sebagai urat nadi ekonomi daerah tidak mampu menunjukkan pertumbuhan PAD yang stabil?

Narasumber: Ini persepsi yang harus diluruskan. Dinas Perkebunan adalah *Cost center* (Pusat Biaya), bukan *Profit Center* (Pusat Laba). Tugas kami adalah membelanjakan uang (*spending money*) untuk membantu petani memperbaiki kebunnya, bukan mencari untung dari petani. Kami tidak berjualan hasil kebun: Yang panen sawit atau kelapa itu petani, untungnya untuk petani.

- 1) Keterbatasan Sumber PAD: Pendapatan kami hanya berasal dari retribusi kecil seperti penjualan bibit atau sewa asrama/mess dinas.
- 2) Pajak: Pajak hasil bumi atau PPN sektor perkebunan itu ranahnya Pemerintah Pusat atau Bapenda, bukan masuk ke kas Dinas Perkebunan. Jadi wajar jika PAD kami terlihat kecil dan tidak stabil.

Na
me
lap
(T
uan
pe
me
un
(P
Pe
Pa
Na
op

- (P)
Pe
Pa
Na
op

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti uang operasional yang besar itu larinya ke fisik juga ya Pak sebenarnya?

Narasumber: Iya, ke fisik juga output-nya. Beli minyak buat ekskavator itu kan operasional, tapi hasilnya tanggul (fisik).

Narasumber: Iya, ke fisik juga output-nya. Beli minyak buat ekskavator itu kan operasional, tapi hasilnya tanggul (fisik).

Narasumber: Iya, ke fisik juga output-nya. Beli minyak buat ekskavator itu kan operasional, tapi hasilnya tanggul (fisik).

Narasumber: Iya, ke fisik juga output-nya. Beli minyak buat ekskavator itu kan operasional, tapi hasilnya tanggul (fisik).

Narasumber: Iya, ke fisik juga output-nya. Beli minyak buat ekskavator itu kan operasional, tapi hasilnya tanggul (fisik).

Narasumber: Iya, ke fisik juga output-nya. Beli minyak buat ekskavator itu kan operasional, tapi hasilnya tanggul (fisik).

Narasumber: Iya, ke fisik juga output-ny

Narasumber: Iya, ke fisik juga output-nya. Beli minyak buat ekskavator itu kan operasional, tapi hasilnya tanggul (fisik).

Narasumber: Iya, ke fisik juga output-nya. Beli minyak buat ekskavator itu kan operasional, tapi hasilnya tanggul (fisik).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan,

2026

(_____)

NIP: _____

UIN SUSKA RIAU

Narasumber: Program kegiatan ini disusun berdasarkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kepala Daerah, yang dituangkan dalam program dan kegiatan. Mekanismenya seperti apa? Ada Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Desa, ada Musrenbang Kecamatan, ada Musrenbang Kabupaten. Nah dari Musrenbang itu semua, maka dibuatlah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, namanya RKPD. RKPD ini disampaikan ke DPRD untuk dibahas menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Setelah itu baru diusulkan melalui R-APBD, dibahas menjadi APBD. Kalau sudah menjadi APBD, itulah nanti program kegiatan yang kita laksanakan. Di Dinas Pekerjaan Umum ini ada Bidang Bina Marga, ada Bidang Cipta Karya, ada Bidang Sumber Daya Air, ada Bidang Tata Ruang, ada Bidang Bina Konstruksi, yang umum sekarang penggabungan ini ada Bidang Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman), menjadi enam bidang satu sekretariat. Jadi mekanismenya seperti itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Prioritas anggarannya itu ya di lima bidang itu, tapi yang pada umumnya yang lebih besar porsi di Bina Marga. Karena Bina Marga ini infrastruktur vital masyarakat, jalan dan jembatan gitu kan. Cipta Karya kan pembangunan gedung-gedung.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Ya tentunya iya, ada penganggaran yang berulang karena kan APBD kita ini dibatasi dengan anggaran yang terbatas terkait dengan pendapatan. Misalnya jalan gitu kan, katakanlah jalan yang akan kita laksanakan dari jalan Tembilahan menuju Sapat gitu kan... (terhenti sejenak karena ada telepon masuk). Keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran makanya kurang maksimal ya. Kalau berkaitan dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah) total, silakan ke Bapenda.

a. Bapak/Ibu, SETDA adalah jantung pemerintahan. Namun data LRA 2022-2024 menunjukkan stabilitas belanja operasi SETDA konsisten di angka 99%, sementara dinas teknis (Perikanan/Pangan) justru dipotong drastis hingga -44% di 2024. Bagaimana SETDA menjelaskan prinsip keadilan dan keserasian belanja dalam kebijakan TAPD ini, ketika birokrasi tetap 'aman' sementara urusan perut rakyat (petani/nelayan) anggarannya dikorbankan?

Narasumber: Terkait data minus 44% di Dinas Perikanan dan Pangan, itu Adik lihatnya sebagai pemotongan atau pertumbuhan belanja? Itu pertumbuhan belanja, bukan pemotongan anggaran. Kenapa terjadi penurunan pertumbuhan belanja di sana? Bagus Adik pergi ke dinas teknisnya langsung, ke Pangan atau Perikanan. Tanya apa justifikasi dari OPD tersebut kenapa terjadi penurunan belanja. Kalau LRA (Laporan Realisasi Anggaran) di SETDA stabil 99%, itu karena SETDA fungsinya memfasilitasi dan mengkoordinasi OPD-OPD lain. Masalah teknis ada di dinas terkait. Jadi kalau dari BKAD datanya begitu, tanya justifikasinya ke OPD teknisnya langsung.

b. Di tahun 2023-2024, keluhan banjir rob dan jalan rusak menuju sekolah meningkat. Dengan belanja rutin birokrasi (rapat/perjalanan dinas) yang tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi prioritas di SETDA, kebijakan strategis apa yang sebenarnya sudah dihasilkan untuk mengatasi banjir rob secara nyata? Mengapa penghematan belanja rutin tidak dilakukan untuk menambah anggaran darurat infrastruktur tersebut?

Narasumber: Kalau masalah banjir, masalah jalan rusak, itu adanya di OPD-OPD teknis (seperti PU), bukan di SETDA. SETDA itu tugasnya memfasilitasi dan mengkoordinasi ke OPD-OPD tersebut. Adik tanya soal penghematan belanja rutin? Malahan kami dua tahun terakhir ini tidak ada perjalanan dinas lagi. Saking efisiensinya, tidak ada lagi perjalanan. Belanja-belanja perjalanan dinas sudah dirasionalisasikan semuanya. Jadi kalau dibilang belanja rutin prioritas, itu sudah kami potong habis karena efisiensi tadi. Kebijakan strategis kami ya lewat koordinasi itu. Pimpinan selalu menyampaikan evaluasi kegiatan di masyarakat lewat rapat-rapat koordinasi dengan OPD teknis.

- c. Banyak aset daerah seperti Plaza Tembilahan dan Pasar Rakyat yang terbengkalai. Mengapa output koordinasi SETDA belum mampu mendorong perbaikan aset-aset ini agar produktif menghasilkan PAD? Apakah SETDA menyadari bahwa membiarkan aset rusak justru menambah kerugian daerah jangka panjang dibanding biaya operasional kantor?

Narasumber: Terkait Pasar Rakyat, itu pengelolaannya sepenuhnya berada di pihak ketiga (PKI) sejak tahun 2006 dengan sistem BKS (Bangun Guna Serah) selama 25 tahun. Jadi Pemda belum bisa masuk ke sana karena masih terikat kerja sama. Kalau terkait Plaza Tembilahan, kerja samanya baru berakhir di 2024 kemarin. Aset itu baru diserahkan ke pemerintah. Sekarang ini masih dalam proses pengamanan aset dan penyelesaian sengketa, karena kemarin sempat ada masalah dengan pihak lain. Solusinya gimana biar produktif? Kita akan lakukan kerja sama dengan pihak ketiga lagi, polanya BGS (Bangun Guna Serah). Pihak ketiga yang bangun dan kelola, nanti baru diserahkan ke kita. Tapi prosesnya panjang, aset harus clean and clear dulu baru bisa dilelang ke pihak ketiga.

- d. Bapak/Ibu, merujuk pada prinsip *Value For Money* (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas), setiap rupiah harus bermanfaat bagi publik. Bagaimana Bapak/Ibu selaku Ketua TAPD menjelaskan 'hasil' nyata dari belanja operasional SETDA yang mencapai 99% tersebut bagi kesejahteraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat? Apakah hasil koordinasi birokrasi ini sudah sebanding dengan penderitaan siswa yang harus melewati jalan rusak setiap hari?

Narasumber: Kalau belanja SETDA itu yang umum aja ya, belanja SETDA itu memfasilitasi. Termasuk pembinaan dan pengkoordinasian. Hasil nyatanya? Kami di bagian pembangunan misalnya, sebulan bisa dua kali rapat evaluasi realisasi fisik dan keuangan seluruh OPD. Lewat forum itu pimpinan mengevaluasi semua kegiatan di OPD, termasuk masalah jalan rusak dan banjir tadi. Kalau SETDA tidak jalan, koordinasi ke OPD teknis bisa macet. Jadi, realisasi 99% itu adalah untuk memfasilitasi semua kebutuhan koordinasi OPD-OPD dalam kondisi efisiensi ini. Walaupun tidak bisa semuanya terakomodir karena keterbatasan dana, pemerintah selalu berusaha. Kalau kita dapat dana sendiri, kita jempot bola.

- e. Selaku Ketua TAPD, apa pertimbangan logis Bapak/Ibu saat memotong anggaran bantuan nelayan/petani di 2024, namun tetap mempertahankan anggaran operasional birokrasi di level yang sangat tinggi? Apakah ada rencana untuk melakukan refocusing besar-besaran agar APBD lebih 'serasi' antara kepentingan kantor dan kepentingan rakyat?

Narasumber: Kendalanya itu, kalau dari pusat menuntut harus efisiensi dan realisasi, ya kita lakukan pengurangan anggaran. Contohnya, tahun 2025 kita sudah susun kegiatan anggarannya 500 juta. Pas masuk tahun 2026, keluar surat aturan baru harus efisiensi, ya hilang 200 juta, tinggal 300 juta. Kita harus menyesuaikan lagi. Pertimbangannya adalah SETDA memiliki 11 bagian yang masing-masing punya kegiatan prioritas berbeda yang harus tetap jalan, seperti bagian keuangan, pembangunan, dan pemerintahan. Refocusing itu otomatis terjadi karena transfer pusat (TKD) berkurang. Ini sangat berdampak pada kualitas pelayanan publik, kami akui itu. Tapi 'jantung' pemerintahan (SETDA) harus tetap hidup untuk mengoordinasikan sisa anggaran yang ada agar pemerintahan tidak berhenti total.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan Narasumber:

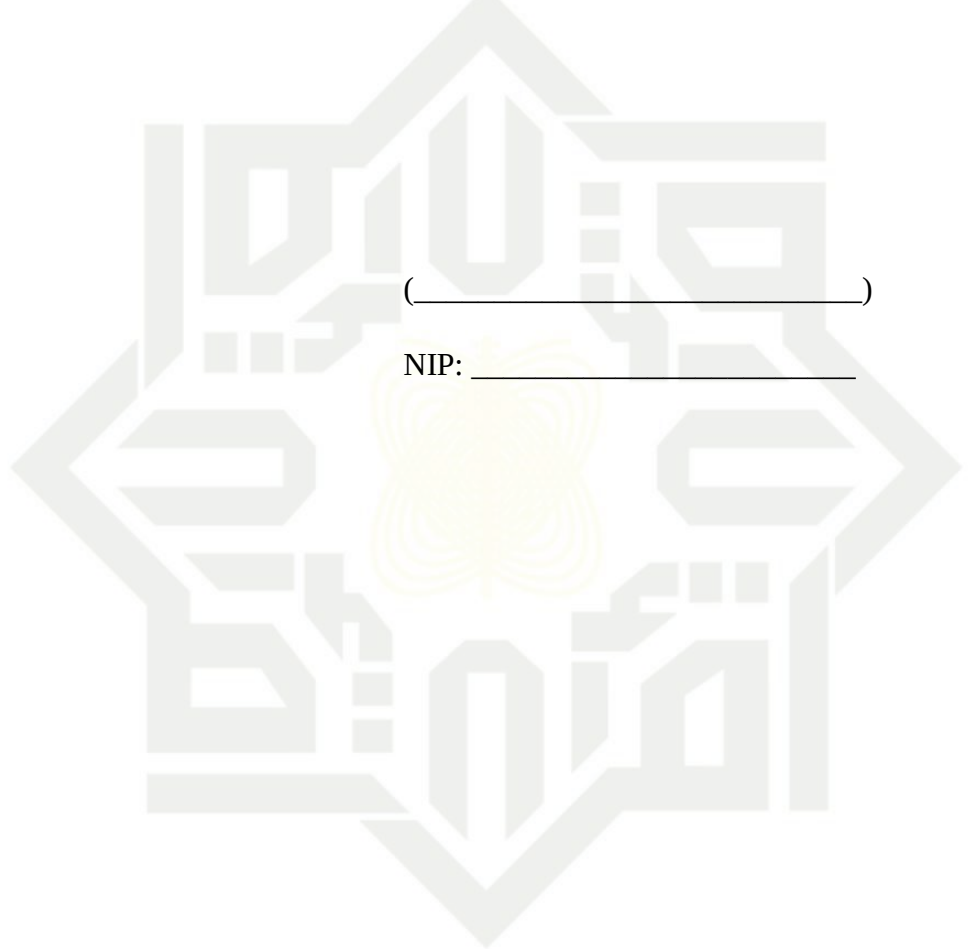
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan,

2026

(_____)

NIP: _____



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

11. Dinas Pendidikan: Ibu Yasinta

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____

Jabatan : _____

OPD : _____

Tanggal Wawancara : _____

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Gambaran Umum Prioritas Anggaran OPD Dinas Pendidikan (2022-2024) yaitu Anggaran Dinas Pendidikan selama 2022-2024 sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasional (90-93%), seperti gaji dan biaya rutin, sementara belanja modal untuk pembangunan fasilitas fisik sekolah hanya sekitar 6-9%. Hal ini menghambat upaya perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan banyak sekolah. Kendala Penyerapan Anggaran; Penyerapan anggaran mengalami penurunan dari 93,36% pada 2022 menjadi 85,19% pada 2024. Faktor administrasi dan teknis menjadi penghalang utama, memperlambat pelaksanaan proyek yang sangat dibutuhkan. Dampak Efisiensi Anggaran; Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran berdampak pada kualitas fasilitas pendidikan, khususnya perbaikan gedung sekolah yang terbengkalai. Dengan belanja modal terbatas, kami kesulitan untuk memperbaiki fasilitas yang sangat mendesak. Solusi ke Depan; Kami perlu memperbaiki koordinasi dengan Dinas PUTR dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk lebih banyak alokasi perbaikan fisik agar sekolah-sekolah dapat menyediakan lingkungan belajar yang lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Terdapat beberapa kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran setiap tahun. Salah satunya adalah masalah administratif yang memakan waktu. Hal ini seringkali menyebabkan keterlambatan dalam alokasi dana dan memperlambat pelaksanaan proyek. Selain itu, kendala teknis, seperti kurangnya kapasitas di lapangan untuk mengelola proyek, juga menjadi penghambat. Misalnya, dalam perbaikan fasilitas sekolah, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah sering kali menghambat percepatan pekerjaan. Faktor lainnya adalah perubahan kebijakan dan refocusing anggaran yang dilakukan di tengah tahun, yang membuat perencanaan menjadi tidak fleksibel dan sulit untuk diikuti. Semua faktor ini saling berinteraksi, menyebabkan penyerapan anggaran yang tidak maksimal, meskipun kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan sangat mendesak. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan dalam manajemen administrasi dan koordinasi antar-OPD untuk memperlancar proses perencanaan dan penyerapan anggaran.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran membawa dampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan. Meskipun bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, kebijakan ini sering kali mengarah pada pengurangan anggaran di sektor yang sangat membutuhkan, seperti perbaikan infrastruktur sekolah dan pengadaan fasilitas pendidikan lainnya. Akibatnya, kualitas fasilitas fisik sekolah, yang merupakan bagian penting dari pelayanan pendidikan, terganggu. Gedung yang rusak atau kurang memadai tetap tidak diperbaiki, sementara kebutuhan pengadaan alat pendidikan juga terhambat. Di sisi lain, meskipun anggaran untuk belanja operasional tetap terjaga, hal ini justru menambah beban rutin tanpa memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, meski kebijakan efisiensi penting untuk menjaga kestabilan keuangan, dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik menjadi tantangan yang perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatasi dengan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan prioritas yang lebih terfokus.

a. Izin Bapak/Ibu, saya ingin mengonfirmasi bagaimana perbandingan data tahunan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sekolah di Indragiri Hilir." "Berdasarkan perhitungan Rasio Keserasian, pada tahun 2022 dan 2023, porsi belanja modal sekolah hanya di kisaran 6%. Meski naik menjadi 9,72% di tahun 2024, angka ini masih menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran terserap untuk belanja rutin (gaji dan operasional kantor). Bagaimana Bapak/Ibu memandang keterbatasan ruang fiskal ini dalam upaya merehabilitasi sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan?

Narasumber: Kami mengakui bahwa porsi belanja modal yang hanya mencapai 6% pada tahun 2022 dan 2023, serta sedikit meningkat menjadi 9,72% di tahun 2024, menunjukkan keterbatasan ruang fiskal yang kami hadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, terutama dalam merehabilitasi sekolah-sekolah yang kondisinya memprihatinkan. Dengan hampir seluruh anggaran terserap untuk belanja rutin, seperti gaji dan operasional kantor, kami menghadapi tantangan besar dalam mendanai perbaikan fisik sekolah yang sangat dibutuhkan.

Keterbatasan anggaran ini tentu menjadi hambatan dalam upaya kami untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, yang sangat krusial untuk menciptakan lingkungan belajar yang layak dan nyaman. Kami menyadari bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada aspek pengajaran, tetapi juga pada fasilitas yang mendukung proses belajar. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mencari solusi, salah satunya dengan mengoptimalkan alokasi anggaran dan meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait, guna memastikan perbaikan fasilitas sekolah dapat terus berjalan meskipun dengan keterbatasan anggaran yang ada.

b. Dengan porsi belanja modal yang hanya sekitar 9%, bagaimana Dinas menentukan skala prioritas antara perbaikan gedung sekolah yang lapuk, pengadaan alat laboratorium, dan pembangunan perpustakaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Dalam situasi dengan porsi belanja modal yang terbatas, sekitar 9%, Dinas Pendidikan harus sangat bijaksana dalam menentukan skala prioritas. Prioritas utama kami tentu adalah perbaikan gedung sekolah yang lapuk dan tidak layak digunakan, karena kondisi gedung yang rusak akan langsung memengaruhi kenyamanan dan keselamatan siswa. Setelah perbaikan gedung, pengadaan alat laboratorium dan pembangunan perpustakaan juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dalam keterbatasan anggaran, kami mengutamakan perbaikan gedung yang lebih mendesak, mengingat dampaknya yang langsung terhadap proses belajar mengajar. Untuk pengadaan alat laboratorium dan pembangunan perpustakaan, kami berusaha untuk mencari solusi alternatif, seperti penggalangan dana tambahan melalui kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga lain. Kami juga berfokus pada penggunaan anggaran yang ada dengan seefisien mungkin, agar seluruh sektor pendidikan mendapat perhatian yang proporsional, meskipun dengan keterbatasan dana.

- c. Data menunjukkan Rasio Realisasi Belanja Dinas Pendidikan mengalami penurunan, dari 93,36% pada tahun 2022 menjadi 85,19% pada tahun 2024. Mengapa daya serap anggaran justru menurun di saat kebutuhan perbaikan sekolah sangat mendesak? Kendala administrasi atau teknis apa yang paling sering muncul di lapangan?

Narasumber: Penurunan daya serap anggaran dari 93,36% pada 2022 menjadi 85,19% pada 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, meskipun kebutuhan perbaikan sekolah sangat mendesak. Salah satu kendala utama adalah masalah administratif, seperti proses verifikasi anggaran dan persyaratan yang cukup rumit, yang memakan waktu lebih lama daripada yang diharapkan. Hal ini seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana, yang menghambat pelaksanaan proyek perbaikan sekolah. Selain itu, kendala teknis di lapangan juga sering muncul, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelola proyek di tingkat daerah, serta masalah koordinasi antara berbagai pihak terkait. Proses pengadaan barang dan jasa juga terkadang menghadapi hambatan, baik dari segi waktu maupun prosedur. Semua faktor ini berkontribusi pada penurunan daya serap anggaran, meskipun kebutuhan akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan fasilitas pendidikan sangat mendesak. Kami berupaya untuk memperbaiki manajemen administrasi dan koordinasi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di masa mendatang.

d. Mengingat fenomena banjir rob yang sering merendam pemukiman dan akses jalan, banyak sekolah di Tembilahan dan daerah pesisir yang ikut terdampak. Apakah dalam perencanaan anggaran 2022-2024, Dinas sudah memiliki perhitungan khusus atau 'anggaran darurat' untuk meninggikan halaman sekolah atau memperbaiki sanitasi sekolah yang rusak akibat air pasang?

Narasumber: Kami sangat menyadari dampak dari fenomena banjir rob yang sering merendam pemukiman dan akses jalan, yang juga memengaruhi kondisi sekolah di daerah pesisir, seperti di Tembilahan. Dalam perencanaan anggaran 2022-2024, kami memang belum memiliki perhitungan anggaran darurat yang spesifik untuk menangani kerusakan akibat air pasang, seperti meninggikan halaman sekolah atau perbaikan sanitasi yang terendam. Keterbatasan ruang fiskal dan alokasi anggaran yang lebih terfokus pada belanja rutin menjadi tantangan dalam merencanakan anggaran darurat semacam itu. Namun, ke depan, kami berencana untuk memasukkan anggaran cadangan atau anggaran darurat dalam perencanaan anggaran berikutnya, khususnya untuk daerah yang sering terdampak banjir rob. Kami juga akan berkoordinasi lebih intensif dengan Dinas terkait untuk memastikan bahwa perbaikan infrastruktur, seperti meninggikan halaman sekolah dan memperbaiki sanitasi, menjadi prioritas dalam anggaran yang akan datang, mengingat pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa.

e. Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi keluhan masyarakat mengenai kondisi sekolah yang kurang nyaman saat pasang tiba, sementara dari data rasio terlihat pertumbuhan belanja modal fisik kita peningkatannya sangat lambat setiap tahunnya?

Narasumber: Kami sangat menghargai keluhan masyarakat mengenai kondisi sekolah yang kurang nyaman saat pasang tiba, dan kami menyadari bahwa hal ini menjadi perhatian penting. Meskipun ada peningkatan belanja modal fisik yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercatat setiap tahun, memang anggaran yang tersedia untuk perbaikan fisik sekolah masih terbatas, sehingga perbaikan yang dilakukan tidak secepat yang diharapkan. Dalam keterbatasan anggaran, kami harus melakukan prioritas yang ketat, dengan memfokuskan pada kondisi yang paling mendesak terlebih dahulu, seperti perbaikan gedung yang sudah tidak layak pakai. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran untuk perbaikan infrastruktur sekolah, khususnya untuk wilayah yang sering terdampak banjir rob dan pasang surut. Ke depan, kami akan berupaya agar peningkatan belanja modal fisik dapat berjalan lebih cepat, dengan mengoptimalkan perencanaan anggaran dan berkoordinasi lebih intensif dengan pihak terkait. Kami juga akan mempertimbangkan usulan masyarakat sebagai bagian dari prioritas perbaikan fasilitas yang harus segera dilakukan.

- f. Banyak siswa yang kesulitan menuju sekolah karena jalanan yang rusak dan banjir. Sejauh mana Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas PUTR untuk memastikan anggaran pembangunan jalan diprioritaskan pada akses menuju fasilitas pendidikan?

Narasumber: Kami sangat memahami kesulitan yang dialami oleh siswa yang harus melewati jalan rusak dan banjir untuk menuju sekolah. Aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan merupakan masalah penting yang perlu segera diatasi. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan telah berkoordinasi secara rutin dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) untuk memastikan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan yang mengarah ke sekolah-sekolah di daerah terdampak menjadi prioritas. Kami berusaha agar dalam perencanaan anggaran, pembangunan jalan menuju fasilitas pendidikan dapat diprioritaskan, mengingat pentingnya akses yang lancar dan aman bagi siswa. Selain itu, kami juga mendorong agar Dinas PUTR menganggarkan perbaikan jalan yang sering terdampak banjir rob, agar siswa tidak kesulitan dalam melakukan aktivitas belajar. Kami berharap dengan koordinasi yang lebih intensif, anggaran untuk pembangunan jalan ini bisa lebih optimal, sehingga memudahkan siswa dalam mengakses pendidikan dengan lebih baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada fenomena masyarakat lebih memilih menyekolahkan anak ke luar daerah atau sekolah swasta karena fasilitas sekolah negeri yang dianggap tertinggal. Bagaimana strategi Dinas agar belanja operasional yang mencapai 90% tersebut bisa dikonversi menjadi peningkatan mutu layanan yang bisa 'melirik' kembali minat masyarakat lokal?

Narasumber: Kami menyadari fenomena masyarakat yang lebih memilih sekolah swasta atau luar daerah karena fasilitas sekolah negeri yang dianggap kurang memadai. Untuk itu, strategi yang kami terapkan adalah mengoptimalkan penggunaan belanja operasional yang mencapai 90%, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah negeri. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan pelatihan bagi guru untuk memastikan kualitas pengajaran yang lebih baik dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kami berusaha untuk memperbaiki fasilitas yang ada secara bertahap, meskipun dengan anggaran terbatas, melalui peningkatan efisiensi penggunaan dana operasional yang tersedia. Kami juga akan menggali potensi kerja sama dengan pihak swasta atau lembaga lain untuk mendukung perbaikan fasilitas dan pengadaan alat pendidikan yang lebih modern. Dengan strategi ini, kami berharap dapat menarik minat masyarakat lokal kembali untuk memilih sekolah negeri, karena selain kualitas pengajaran yang lebih baik, fasilitas yang lebih memadai juga akan turut mendukung kenyamanan dan prestasi siswa.

h. Merujuk pada prinsip *Value For Money* (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas), bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas penggunaan anggaran pendidikan selama 3 tahun terakhir? Apakah belanja rutin yang besar ini sudah menghasilkan *outcome* berupa kenyamanan belajar yang nyata bagi siswa di daerah terpencil?

Narasumber: Merujuk pada prinsip *Value For Money* (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas), kami menyadari bahwa meskipun anggaran pendidikan sebagian besar digunakan untuk belanja rutin, hasilnya belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kenyamanan belajar, khususnya bagi siswa di daerah terpencil. Selama tiga tahun terakhir, meskipun ada peningkatan dalam efisiensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan anggaran, belanja rutin yang besar, seperti gaji pegawai dan operasional kantor, belum sepenuhnya berkontribusi pada perbaikan fasilitas fisik sekolah yang mendesak. Namun, kami berusaha memastikan bahwa anggaran yang ada tetap memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan kualitas pengajaran dan pelatihan guru. Untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi, kami perlu memperbaiki alokasi anggaran agar lebih banyak dana yang bisa digunakan untuk perbaikan fasilitas, khususnya di daerah terpencil yang sangat membutuhkan perhatian. Kami juga terus mengevaluasi dan mencari cara untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran agar memberikan hasil yang lebih nyata dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung bagi siswa.

- i. Jika kita melihat tren pertumbuhan anggaran dari 2022 ke 2024, belanja pegawai terus meningkat namun kondisi fisik banyak sekolah masih stagnan. Apa langkah konkret yang direncanakan Dinas agar di tahun-tahun mendatang, APBD pendidikan tidak lagi hanya habis untuk 'menghidupi birokrasi', melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya melalui gedung sekolah yang megah dan fasilitas yang lengkap?

Narasumber: Kami menyadari bahwa meskipun anggaran untuk pendidikan terus meningkat, sebagian besar dana tersebut masih terserap untuk belanja pegawai, sementara kondisi fisik banyak sekolah tetap stagnan. Untuk itu, langkah konkret yang kami rencanakan adalah melakukan penataan ulang prioritas anggaran, dengan memastikan alokasi yang lebih besar untuk belanja modal, khususnya untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai. Kami juga berencana untuk mengoptimalkan penggunaan dana dengan memperbaiki efisiensi dalam pengelolaan belanja operasional, agar sebagian besar anggaran dapat dialokasikan untuk infrastruktur dan fasilitas yang langsung mendukung kualitas pendidikan. Selain itu, kami akan mencari sumber pendanaan alternatif, seperti bekerja sama dengan pihak swasta atau lembaga lainnya, untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Dengan perencanaan yang lebih terfokus dan penggunaan anggaran yang lebih efisien, kami berharap di tahun-tahun mendatang, APBD pendidikan dapat memberikan dampak yang lebih nyata,

dengan terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, fasilitas yang lengkap, dan gedung sekolah yang layak bagi siswa.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan, 2026

(_____)

NIP: _____

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM): Pak Yusnaldi

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____
Jabatan : _____
OPD : _____
Tanggal Wawancara : _____

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Sama seperti di PUTR, program di PERKIM ini tidak muncul begitu saja. Ini semua disusun secara berjenjang mulai dari bawah, dari aspirasi rakyat. Mekanismenya melalui Musrenbang Desa, naik ke Kecamatan, baru masuk ke OPD kami. Prioritasnya jelas, yaitu penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), prasarana sarana dan utilitas (PSU) perumahan, serta sanitasi dan air bersih pedesaan. Setelah disepakati di KUA-PPAS dan jadi APBD, itulah yang kami eksekusi di lapangan.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Perencanaan kami sangat terikat pada aturan pusat dan Mandatory Spending. Kami bekerja mengikuti DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang sudah disahkan. Jadi, kalau ditanya kendala penyerapan, pola kami itu mengikuti aturan pusat seperti UU HKPD terbaru. Kami fokus pada target fisik yang sudah dipatok di DPA, bukan berdasarkan hitungan rasio-rasio internal.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Kebijakan efisiensi itu hal biasa, tapi perlu diingat bahwa porsi infrastruktur termasuk perumahan dan permukiman itu sudah ada batas minimalnya dari pusat. Infrastruktur itu minimal 40% menurut aturan terbaru. Jadi, kalau ada *refocusing*, kami tetap harus mengacu pada batas minimal tersebut agar pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga.

a. PERKIM memiliki postur belanja paling seimbang. Apa strategi perencanaannya?

Narasumber: Kami tidak mematok strategi "harus seimbang" di angka tertentu. Angka yang adik lihat itu sebenarnya adalah cerminan dari di lapangan. Jika usulan Musrenbang untuk perumahan dan sanitasi banyak yang disetujui, maka belanjanya terlihat besar. Kami tidak mengejar angka rasio, kami mengejar target fisik sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Bagaimana dampak pemangkasan anggaran terhadap penyediaan air bersih dan sanitasi pasca-banjir?

Narasumber: Kami pelaksana teknis. Kami laksanakan apa yang sudah tertuang di DPA. Kalau anggarannya ada di DPA, ya kami bangun. Penentuan prioritas apakah air bersih atau sanitasi itu sudah diputuskan di tingkat perencanaan makro (Bappeda) berdasarkan hasil Musrenbang tadi.

c. Dengan porsi belanja modal yang hanya sekitar 9%, bagaimana Dinas menentukan skala prioritas antara perbaikan gedung sekolah yang lapuk, pengadaan alat laboratorium, dan pembangunan perpustakaan?

Narasumber: Skala prioritas itu bukan kami yang menentukan secara sepihak. Itu hasil dari Musrenbang. Mana yang paling mendesak bagi rakyat, itu yang diusulkan ke KUA-PPAS. Kami di dinas hanya menjalankan bidang teknisnya saja.

d. Data menunjukkan Rasio Realisasi Belanja Dinas Pendidikan mengalami penurunan, dari 93,36% pada tahun 2022 menjadi 85,19% pada tahun 2024. Mengapa daya serap anggaran justru menurun di saat kebutuhan perbaikan sekolah sangat mendesak? Kendala administrasi atau teknis apa yang paling sering muncul di lapangan?

Narasumber: Masalah daya serap itu ranahnya analisis makro. Di buku pedoman teknis kami tidak ada menghitung rasio daya serap dengan rumus

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Narasumber: Kami pelaksana fisik. Selama pekerjaan berjalan sesuai teknis, kami jalan terus. Urusan rumus-rumus rasio itu ranahnya analisis makro di Setda atau Bappeda.

Narasumber: Semua program kami masuk melalui perencanaan reguler. Untuk hal-hal yang sifatnya mendesak, biasanya masuk dalam kategori kebutuhan tematik di tahun anggaran berjalan atau melalui mekanisme anggaran yang sudah diatur oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Narasumber: Kami menyerap aspirasi melalui Musrenbang. Kalau masyarakat mengusulkan perbaikan drainase permukiman dan disetujui di APBD, kami kerjakan. Kami tidak bisa mematok pertumbuhan modal harus sekian persen setiap tahun karena kami harus mengikuti plafon anggaran yang tersedia.

g. Merujuk pada prinsip *Value For Money* (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas), bagaimana Bapak/Ibu menilai efektivitas penggunaan anggaran pendidikan selama 3 tahun terakhir?

Hak Cipta Ditanggungjawab Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Efektivitas bagi kami adalah ketika usulan masyarakat di Musrenbang bisa kita wujudkan dalam bentuk fisik, baik itu rumah layak huni atau sanitasi yang baik. Soal hitungan efektivitas secara rumus, itu ranahnya BKAD.

h. Jika kita melihat tren pertumbuhan anggaran dari 2022 ke 2024, belanja pegawai terus meningkat namun kondisi fisik banyak sekolah masih stagnan. Apa langkah konkret yang direncanakan Dinas agar di tahun-tahun mendatang, APBD pendidikan tidak lagi hanya habis untuk 'menghidupi birokrasi', melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya melalui gedung sekolah yang megah dan fasilitas yang lengkap?

Narasumber: Kita sudah punya aturan Mandatory Spending dari pusat. Infrastruktur minimal 40%. Itu sudah menjadi langkah konkret agar anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik. Kami di Dinas PERKIM hanya memastikan fisik tersebut terbangun sesuai aturan.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti Bapak fokus ke fisik saja ya, tidak ke rumus-rumus tadi?

Narasumber: Iya. Kami pelaksana fisik. Enggak ada rumus-rumus begitu di buku pedoman teknis kami. Itu ranahnya analisis makro di BKAD atau Bappeda.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan, 2026

(_____)

NIP: _____

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

13. DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan PTSP): Pak Apridoni

Petunjuk Pengisian: Wawancara dilaksanakan setelah analisis rasio keuangan selesai. Pertanyaan disusun berdasarkan temuan spesifik dari setiap OPD. Hasil wawancara dicatat dalam lembar ini dan wajib ditandatangani oleh narasumber untuk memvalidasi keabsahan data.

Identitas Narasumber:

Nama : _____
Jabatan : _____
OPD : _____
Tanggal Wawancara : _____

Pernyataan Narasumber:

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Prioritas utama kami di DPMPTSP adalah Pelayanan Perizinan dan Promosi Penanaman Modal. Anggaran kami fokuskan untuk operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Selain itu, prioritas lainnya adalah kegiatan pengawasan dan pengendalian (Wasdal) ke lapangan untuk memantau realisasi investasi perusahaan.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Prioritas anggarannya ke mana saja Pak fokusnya?

Narasumber: Ya itu tadi, operasional MPP. Listrik, internet, kebersihan. Karena kita ini wajah pelayanan. Kalau MPP mati lampu atau internet putus, pelayanan berhenti. Jadi anggarannya kita amankan di situ dulu.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Kendala berulang yang sering kami hadapi adalah Perubahan Regulasi Pusat dan Sistem OSS (Online Single Submission). Sistem ini domainnya pusat (BKPM). Seringkali sistem *error* atau *maintenance* yang menghambat pelayanan di daerah, padahal anggaran sosialisasi sudah disiapkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pewawancara: Masa nol persen Pak? Enggak ada beli laptop atau AC baru gitu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Enggak ada. Kita pakai yang lama saja. Dihemat-hemat. Yang penting internetnya jalan buat akses OSS. Kalau beli aset baru nanti dulu lah, nunggu anggaran daerah sehat.

c. Mengapa belanja promosi investasi justru dipangkas (-7,9%)?

Narasumber: Itu dampak dari Refocusing Anggaran. Ketika daerah mengalami defisit, pos-pos yang dianggap bisa ditunda, seperti pameran investasi ke luar daerah atau *event* promosi besar, itu yang dikurangi. Kami mengubah strategi promosi menjadi lebih digital atau *targeted* (langsung mendatangi calon investor potensial) yang biayanya lebih murah daripada ikut pameran besar.

d. Berdasarkan data tahun 2024, terlihat alokasi Belanja Modal berada pada angka yang sangat minimal. Dalam perspektif manajemen pelayanan, bagaimana Bapak/Ibu mensiasati pemeliharaan sarana fisik seperti perangkat sistem perizinan atau ruang layanan agar tetap memberikan kenyamanan maksimal bagi para pemohon izin?

Narasumber: Pemeliharaan itu tidak selalu masuk Belanja Modal. Kalau sekadar servis AC, perbaikan komputer rusak, atau beli sparepart, itu masuknya ke Belanja Pemeliharaan (Barang dan Jasa) di pos Operasional. Jadi meskipun Belanja Modal 0%, bukan berarti kami tidak merawat aset. Kami tetap rawat menggunakan dana operasional rutin agar ruang layanan tetap nyaman.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Kalau ada yang rusak gimana Pak kalau belanja modalnya nol?

Narasumber: Ya diperbaiki. Pakai dana pemeliharaan rutin. Itu masuknya belanja operasi, bukan belanja modal. Kecuali kita beli AC baru, itu baru masuk belanja modal.

e. Mengingat peran dinas dalam mempromosikan potensi daerah, strategi kreatif apa yang Bapak/Ibu jalankan dalam memperkuat sistem aplikasi perizinan digital di tengah keterbatasan ruang fiskal untuk belanja modal aset?

Narasumber: Aplikasi perizinan utama kita itu OSS RBA, dan itu milik pusat (Gratis). Kami tidak perlu keluar uang untuk bangun aplikasi sendiri. Strategi kami adalah Pendampingan (Gerai Berbantuan). Karena banyak pelaku usaha di hilir yang masih gaptek, kami sediakan petugas di MPP untuk membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menginput data mereka ke OSS. Jadi sistemnya canggih dari pusat, kami yang jadi operator pendampingnya. Itu tidak butuh modal besar, cuma butuh tenaga SDM.

f. Selama tiga tahun terakhir, rasio belanja menunjukkan fokus yang sangat besar pada urusan operasional. Bagaimana Bapak/Ibu memandang efektivitas struktur belanja rutin ini dalam mendukung kelancaran birokrasi perizinan yang efisien dan responsif bagi masyarakat?

Narasumber: Struktur belanja kami memang mayoritas Operasional (Rutin) karena kami adalah Dinas Pelayanan, bukan Dinas Pekerjaan Umum yang bangun fisik. Biaya operasional yang besar itu terserap untuk:

- 1) Gaji Tenaga Honorer/Kontrak yang melayani di loket.
- 2) Listrik dan Internet MPP yang harus hidup full time.
- 3) Perjalanan Dinas Pengawasan ke lokasi investasi.

Jadi, belanja rutin itulah "mesin" birokrasi kami. Kalau itu dipangkas, justru pelayanan berhenti.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Jadi memang wajar ya Pak operasionalnya bengkok?

Narasumber: Sangat wajar. Karena tupoksi kami melayani orang, butuh orang (pegawai) dan butuh fasilitas kantor yang hidup.

g. Terdapat sedikit kontraksi pada pertumbuhan belanja promosi investasi. Bagaimana dinas tetap menjaga semangat 'menjemput bola' terhadap investor luar di tengah penyesuaian anggaran yang terjadi saat ini?

Narasumber: Semangat jemput bola tetap ada melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kami turun ke perusahaan-perusahaan yang sudah ada untuk memantau masalah mereka (debottlenecking). Kalau untuk investor baru dari luar, kami optimalkan Peta Potensi Investasi Digital. Kami buat profil investasi yang menarik (misal potensi kelapa/sagu) dan kami sebar lewat website atau link ke BKPM Pusat, jadi investor bisa lihat tanpa kami harus pameran fisik ke Jakarta terus-menerus.

h. Melihat daya serap belanja yang cukup dinamis dari tahun ke tahun, kendala teknis apa yang biasanya muncul dalam proses perencanaan agar realisasi anggaran bisa lebih stabil di masa mendatang?

Investor tentu sangat memperhatikan faktor lingkungan seperti akses jalan dan tantangan banjir rob. Sejauh mana koordinasi lintas sektoral yang dilakukan DPMPTSP bersama instansi terkait (seperti PUTR/SETDA) untuk membangun kepercayaan investor bahwa tantangan alam ini dapat teratasi?

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Narasumber: Sering. Itu kendala utama investasi di Inhil. Infrastruktur dasar. Kita cuma bisa koordinasi, karena anggaran perbaikan jalan bukan di kami.

Narasumber: Ada. Itu masuk dalam Peta Potensi Investasi. Kami tawarkan aset-aset tidur milik Pemda (seperti Plaza yang kurang optimal) kepada pihak ketiga untuk dikelola (Sewa/Bangun Guna Serah). Kami bantu perizinannya supaya cepat. Tapi keputusan kerjasamanya ada di Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) dan Bagian Aset. Kami pintu masuknya saja.

Merujuk pada prinsip *Value For Money* (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas), bagaimana Bapak/Ibu menilai korelasi antara besarnya biaya operasional birokrasi dengan capaian realisasi investasi yang masuk ke Indragiri Hilir dalam tiga tahun terakhir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Kalau dilihat dari PAD (Retribusi), mungkin kami rugi karena biaya operasional besar tapi retribusi nol (gratis). Tapi kalau dilihat dari Realisasi Investasi, nilainya Triliunan. Uang operasional kami yang "cuma" miliaran itu menghasilkan investasi masuk yang memutar ekonomi masyarakat (buka lapangan kerja, pabrik beroperasi). Jadi *Value For Money*-nya di situ: *Multiplier Effect* ekonomi, bukan sekadar setoran PAD ke kas daerah.

Sebagai wajah depan daerah, sarana prasarana yang representatif tentu menjadi nilai tambah di mata calon investor. Bagaimana strategi Bapak/Ibu meyakinkan para pemangku kebijakan bahwa investasi internal pada sarana pelayanan (belanja modal) adalah kunci utama untuk mendatangkan investasi eksternal yang jauh lebih besar bagi kemajuan daerah?

Narasumber: Kami selalu sampaikan di rapat anggaran bahwa MPP adalah Wajah Daerah. Kalau investor datang mengurus izin tapi kantornya panas, kumuh, komputernya lambat, mereka akan *ilfeel* duluan. Kami berjuang meyakinkan TAPD (Tim Anggaran) bahwa peremajaan sarana IT dan kenyamanan ruang layanan itu investasi wajib untuk citra daerah. Meskipun saat ini masih sulit karena defisit, kami terus usulkan peremajaan bertahap.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan,

2026

(_____)

NIP: _____

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Sekretariat DPRD (SETWAN): Pak supriyadi

1. Bagaimana gambaran umum prioritas anggaran OPD Bapak/Ibu selama periode 2022–2024?

Narasumber: Prioritas anggaran utama kami di Setwan adalah Belanja Operasi. Mengapa? Karena sifat instansi kami adalah Pelayanan. Yang paling utama terserap untuk Gaji dan Tunjangan. Dari total anggaran yang besar itu, untuk gaji dan tunjangan anggota dewan serta staf saja sudah memakan sekitar Rp 30 Miliar lebih. Itu baru gaji dan tunjangan, belum kegiatan lainnya. Jadi, orientasi kami berbeda dengan dinas infrastruktur; kami fokus memfasilitasi kegiatan dewan.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Betul Pak, berarti porsinya sangat besar di sana ya dibanding modal?

Narasumber: Iya. Makanya kalau dibandingkan dengan Belanja Modal, perbandingannya jauh. Beda dengan Dinas PU. Belanja modal kami bukan untuk masyarakat luas, tapi hanya untuk kepentingan sarana perkantoran (meja, kursi, laptop) jika ada yang rusak.

2. Apakah terdapat kendala berulang yang memengaruhi perencanaan dan penyerapan anggaran tiap tahun?

Narasumber: Kendala teknis yang sering terjadi lebih kepada dinamika koordinasi. Contohnya saat kami memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (*Hearing*) atas aduan masyarakat. Kami sudah siapkan ruangan, konsumsi, dan mengundang pihak terkait, tapi terkadang pelapor atau pihak yang diundang tidak datang. Ini mempengaruhi efektivitas penyerapan anggaran rapat yang sudah disiapkan. Selain itu, kendala Refocusing Anggaran akibat defisit daerah juga sering membuat jadwal kegiatan dewan harus disesuaikan ulang.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara - Curhat Kendala):

Narasumber: Jujur saja dek, ada kejadian kemarin, dua orang mengajukan aduan, kami tunggu-tunggu tidak muncul. Dihubungi nomor HP-nya tidak aktif. Padahal kami sudah siap memfasilitasi.

Pewawancara: Kemarin nomornya sudah ditinggalin sama kakak di bawah kan, Pak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Iya, itu maksudnya. Mereka minta difasilitasi, sudah kami siapkan, tapi malah susah dihubungi. (Tertawa kecil). Itu kendala di lapangan.

3. Bagaimana dampak kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Bapak/Ibu?

Narasumber: Dampak efisiensi bagi kami adalah penyesuaian standar fasilitas. Misalnya, biaya perjalanan dinas atau jamuan rapat mungkin dikurangi volumenya, namun tidak boleh mengurangi substansi pelayanan terhadap anggota dewan. Fungsi fasilitasi sidang, reses, dan legislasi harus tetap berjalan meskipun anggarannya diketatkan. Kami menyiasatinya dengan memprioritaskan agenda-agenda yang mendesak bagi masyarakat.

a. Mengapa hampir 99% anggaran digunakan untuk operasional fasilitasi dewan?

Narasumber: Angka 99% itu wajar karena tugas Setwan adalah Memfasilitasi. Kami tidak membangun jembatan atau sekolah. Anggaran itu habis untuk:

- 1) Gaji dan Tunjangan (30 Miliar lebih).
- 2) Perjalanan Dinas (Reses, Kunjungan Kerja, Konsultasi).
- 3) Rapat-rapat (Paripurna, Banggar, Banmus).

Semua kegiatan itu masuk dalam kategori Belanja Operasi. Jadi struktur anggaran kami memang didesain untuk habis di operasional, bukan menjadi aset fisik.

b. Apakah output legislasi dan pengawasan sebanding dengan biaya operasional yang tinggi?

Narasumber: Sebanding atau tidaknya itu dilihat dari Kinerja Dewan, bukan jumlah uangnya. Biaya operasional tinggi itu digunakan agar anggota dewan bisa turun ke lapangan (Reses) menjemput aspirasi dan membuat Perda (Legislasi). Jika dewan aktif turun dan banyak Perda yang disahkan untuk kepentingan rakyat, maka biaya itu sebanding. Setwan tugasnya hanya menjamin support system-nya jalan.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Berarti Setwan hanya keluar uang untuk biaya jalan dan rapat saja ya Pak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Betul. Eksekusi proyek fisiknya (hasil reses) ada di dinas teknis. Makanya belanja operasi kami besar, tapi kami tidak punya belanja modal fisik untuk masyarakat.

c. Mengapa belanja modal aset pendukung kinerja DPRD terus merosot di bawah 1%?

Narasumber: Karena aset kami sudah cukup memadai. Gedung sudah ada, mobil dinas ada. Belanja modal kami hanya bersifat Peremajaan Kecil (penggantian laptop rusak, kursi rusak). Di tengah kondisi defisit daerah, kami tidak mungkin menganggarkan belanja modal besar-besaran (seperti bangun gedung baru) karena itu akan membebani APBD. Prioritasnya dialihkan ke kegiatan reses dewan.

d. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap analisis bahwa DPRD berada di “zona nyaman” fiskal?

Narasumber: Sebenarnya tidak juga "zona nyaman". Anggaran yang terlihat besar itu adalah Hak Keuangan anggota dewan yang sudah diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Setwan sebagai fasilitator wajib membayarkan hak tersebut (Gaji, Tunjangan, Reses). Jika tidak dibayarkan, justru kami menyalahi aturan. Jadi itu bukan zona nyaman, tapi pemenuhan kewajiban undang-undang.

e. Bapak/Ibu, berdasarkan data LRA tiga tahun terakhir, terlihat bahwa postur anggaran di SETWAN sangat terfokus pada Belanja Operasional untuk mendukung kegiatan rutin fasilitasi anggota Dewan. Bagaimana Bapak/Ibu memandang efektivitas dari alokasi tersebut dalam memastikan seluruh agenda legislatif dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu?

Narasumber: Sangat efektif. Tanpa dukungan anggaran operasional (makan minum rapat, lembur staf, perjalanan dinas), agenda legislatif bisa macet. Bayangkan kalau sedang bahas APBD malam-malam tapi tidak ada dukungan logistik atau staf pendamping, pasti terhambat. Jadi alokasi itu adalah bensinnya mesin legislasi.

f. Dalam perspektif manajemen keuangan, strategi apa yang diterapkan Sekretariat untuk tetap menjaga prinsip efisiensi pada belanja rutin, sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber: Strateginya adalah Efisien Berbasis Target. Kalau di pemerintahan, efisien itu bukan berarti "hemat uang sisa banyak". Kalau dikasih 100 tapi cuma terpakai 70 (sisa 30 jadi SiLPA), itu justru Kinerja Buruk. Artinya program tidak jalan.

Dari memperhatikan alokasi Belanja Modal (seperti perbaikan sarana fisik atau teknologi) berada di bawah 1% di tahun terakhir. Apakah terdapat pertimbangan teknis tertentu mengapa investasi pada aset fisik saat ini belum menjadi prioritas utama? Bagaimana Bapak/Ibu memastikan fasilitas pendukung kerja tetap andal di tengah keterbatasan anggaran modal tersebut?

Narasumber: Pertimbangannya adalah Skala Prioritas Daerah. Saat ini Inhil butuh banyak perbaikan infrastruktur publik (jalan/jembatan). Kurang etis rasanya kalau Setwan justru belanja modal besar-besaran untuk mempercantik kantor sendiri sementara rakyat butuh jalan. Jadi kami menahan diri untuk belanja modal, cukup pemeliharaan saja, agar dananya bisa dipakai OPD lain untuk publik.

Sebagai lembaga yang memfasilitasi kegiatan reses dan kunjungan lapangan anggota Dewan, bagaimana Sekretariat memastikan bahwa anggaran operasional tersebut berhasil mempermudah Dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait isu krusial seperti penanganan banjir rob dan perbaikan jalan di pelosok?

Narasumber: Anggaran operasional itu kami gunakan untuk membiayai Reses dan Kunjungan Lapangan. Ketika ada isu banjir rob, anggota dewan butuh biaya transportasi dan akomodasi untuk turun ke lokasi bencana. Di situlah peran anggaran Setwan. Kami pastikan SPPD dan fasilitasnya siap agar dewan bisa langsung melihat kondisi di lapangan dan membawanya ke rapat paripurna.

i. Mengingat banyaknya keluhan masyarakat akan kondisi infrastruktur menuju sekolah, apakah terdapat dukungan administratif atau kajian dari Sekretariat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membantu Dewan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan anggaran kepada pemerintah daerah agar lebih berpihak pada kebutuhan dasar tersebut?

Narasumber: Ada. Kami memiliki Staf Ahli dan Tim Pakar yang dibiayai oleh Setwan. Tugas mereka adalah memberikan kajian akademis dan data kepada anggota dewan. Jadi ketika dewan rapat dengan Dinas PU soal jalan rusak, mereka sudah pegang data yang disiapkan oleh tim pendukung di Setwan.

j. Beberapa masyarakat berharap adanya fasilitas aspirasi yang lebih modern dan nyaman. Apakah terdapat rencana jangka menengah dari SETWAN untuk mengalokasikan belanja modal guna mempercantik sarana publik di gedung rakyat, agar masyarakat merasa lebih dekat dengan wakil mereka?

Narasumber: Rencana pasti ada, seperti perbaikan ruang aspirasi atau ruang tunggu tamu agar masyarakat lebih nyaman saat mengadu. Tapi kembali lagi, realisasinya bergantung pada Kemampuan Keuangan Daerah. Untuk saat ini, kami maksimalkan fasilitas yang ada dulu. Kenyamanan masyarakat tetap diperhatikan lewat pelayanan petugas yang ramah, bukan hanya kemewahan gedung.

k. Merujuk pada prinsip *Value For Money* (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas), bagaimana Bapak/Ibu menilai korelasi antara besarnya biaya operasional birokrasi di SETWAN dengan kepuasan masyarakat terhadap hasil pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif?

Narasumber: Korelasinya dilihat dari Publikasi Kinerja. Kami mengalokasikan dana untuk Publikasi dan Kerjasama Media. Tujuannya agar masyarakat tahu apa yang dikerjakan dewan (Transparansi).

Jika masyarakat melihat di berita bahwa dewan aktif memperjuangkan perbaikan jalan atau bantuan pertanian, di situlah letak kepuasannya. Biaya publikasi itu adalah bentuk pertanggungjawaban kami bahwa uang rakyat dipakai untuk bekerja, bukan diam saja.

(Pertanyaan Spontan dalam Wawancara):

Pewawancara: Saya lihat ada anggaran publikasi media, itu efektif Pak?

Narasumber: Itu bentuk transparansi. Rakyat perlu tahu wakilnya kerja apa. Apakah rapat? Apakah reses? Jadi bukan sekadar iklan, tapi laporan kinerja ke publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai mitra strategis pimpinan daerah, bagaimana Sekretariat DPRD memposisikan diri dalam memberikan teladan efisiensi anggaran, agar keseimbangan (keserasian) antara biaya rutin birokrasi dan belanja langsung ke masyarakat di masa depan bisa semakin ideal bagi kemajuan Inhil?

Narasumber: Teladannya adalah dengan Tidak Mengada-ada Kegiatan. Kami menyusun anggaran benar-benar berbasis pada jadwal kegiatan dewan yang riil (Bamus). Kami tidak membuat proyek fisik yang tidak perlu. Dengan menjaga belanja modal tetap minim dan fokus pada fungsi utama, kami memberikan ruang fiskal bagi daerah untuk mengalokasikan dana lebih besar ke belanja publik langsung di dinas-dinas teknis.

Pernyataan Narasumber:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa informasi yang diberikan dalam wawancara ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tembilahan,

2026

(_____)

NIP: _____

Lampiran 12: Surat Pra Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6049/Un.04/F.VII/PP.00.9/09/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Izin Pra Riset**

19 September 2025

Yth. Sekretariat Kantor DPR Indragiri Hilir
Jl. Soebrantas, Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir,
Riau 29214

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Herzela Maydea Sahara
NIM. : 12270322340
Jurusan : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud melakukan **pra riset** di tempat Bapak/Ibu dengan judul: "**Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Pendapatan Dan Belanja Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (dprd) Kabupaten Indragiri**". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin **pra riset** dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan Proposal skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : 4OdNGEg0

Lampiran 13: Surat Riset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-8020/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2025 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Mohon Izin Riset	05 Desember 2025
---	------------------

Yth: Kepala BPKAD
(Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)
Jl. Akasia, Tembilahan Hilir
Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir
Riau 29214

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama	: Herzela Maydea Sahara
NIM.	: 12270322340
Jurusan	: Akuntansi
Semester	: VII (Tujuh)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: " Analisis Efektivitas dan Keserasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir". Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : L8Zg5OnT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 14: Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrandt No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: fcekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-438/Un.04/F.VII/PP.00.9/01/2026 8 Januari 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Mohon Izin Riset

Yth. Kepala Kantor
 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyampaikan bahwa mahasiswa :

Nama : Herzela Maydea Sahara
 NIM. : 12270322340
 Jurusan : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud melakukan Riset di tempat Bapak/Ibu dengan judul: **"Analisis Rasio Kesenjangan Belanja Modal dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir"**. Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset dan bantuan data dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. Desrir Miftah, S.E., M.M., Ak
NIP. 19740412 200604 2 002

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
 Token : gkCF0HFg

Lampiran 15: Surat Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**
Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/XII/2025/181

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Nomor : B-8020/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2025 Tanggal 5 Desember 2025 Perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: HERZELA MAYDEA SAHARA
NIM	: 12270322340
Program studi/Jenjang	: Akuntansi / S1
Alamat	: Jl. Asia RT.002 RW.003 Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka
Judul Penelitian	: ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KESERASIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi Penelitian	: 13 OPD PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 8 Desember 2025 s/d 8 Maret 2026.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 8 Desember 2025

**an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Kabid Ketahanan Ekosobud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE
Pembina
NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru.

Lampiran 16: Surat Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Akasia Nomor 01, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214
E-mail: bpkadinhil@gmail.com

Tembilahan, 11 Desember 2025

Nomor : 400.3/65/BKAD-SET
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Berdasarkan Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070 /BKBP-EKOSOSBUD/XII/2025/182 Tanggal 08 Desember 2025 Hal Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data Mahasiswa atas nama :

Nama : Herzela Maydea Sahara
NIM : 12270322340
Program/Jenjang : Akuntansi/S.1
Judul Riset : Analisis Efektivitas dan Keterserapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
TMT : 8 Desember 2025 s/d 8 Maret 2026

Sehubungan hal di atas, bahwa Mahasiswa tersebut dapat diterima untuk melaksanakan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir



Feri Irawan, S.E., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19751015 199703 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 17: Surat Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DINAS KESEHATAN

Jalan M. Boya No. 67 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau
email: dinkes.kabinhil@gmail.com dan uk.dinkesinhil@yahoo.com

Tembilahan, 18 Desember 2025

Nomor : 000.9.6.1/DINKES-PSDMK/35
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Izin Pengambilan Data

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim
di-
Pekanbaru

Menindaklanjuti surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 070/BKBP-EKOSOSBUD/XII/2025/182 Tanggal 8 Desember 2025 Perihal tersebut diatas.

Berkenan dengan hal tersebut, dengan ini kami dapat memberikan izin kepada Mahasiswa:

1. Nama : Herzela Maydea Sahara
2. NIM : 12270322340
3. Program Studi : Akuntansi/S1
4. Judul Penelitian: Analisis Efektivitas dan Kesenjangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan.

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Tanggal 8 Desember 2025 s/d 8 Maret 2026.
3. Pelaksanaan Izin Penelitian di Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan,



Hj. Irdawati, SKM.,M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800913 200501 2 014

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 18: Surat Riset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212

Laman : www.disdik.inhilkab.go.id Pos.el : disdik.inhil@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 800/Disdik-Set.Um/2025/

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/XII/2025/182 tanggal 08 Desember 2025 perihal Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (Survey), Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama	: HERZELA MAYDEA SAHARA
NIM	: 12270322340
Program Studi / Jenjang	: Akuntansi / S1
Fakultas	: Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Judul Penelitian	: ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KESERASIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi Penelitian	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 8 Desember 2025 s/d 8 Maret 2026.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 29 Desember 2025

Kepala Dinas Pendidikan,

Abdul Rasyid, S.E., M.Ak

Pembina Tk.I

NIP. 197711212006041003





RIWAYAT PENULIS



Herzela Maydea Sahara, anak pertama dari pasangan ayahanda Heriyansyah dan Ibunda Jahlelawati yang bertempat tinggal di Desa Sungail Luar, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Penulis dilahirkan di Tembilahan, pada tanggal 25 Mei 2004. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 003 Sungai Luar, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama di MtsN 02 INHIL dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MAN 01 INHIL. Melalui jalur Mandiri pada tahun 2022 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Akuntansi. Kemudian pada tahun 2025 penulis melaksanakan program kuliah kerja nyata (KKN) di Kelurahan Pekan Arba, Tembilahan. Selanjutnya penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi, penulis dinyatakan "EULUS" dengan predikat Sangat Memuaskan dengan nilai 3.56 setelah berhasil menyelesaikan skripsi dibawah bimbingan ibu Harkaneri, S.E.,MSA.AK, CA, dengan judul skripsi "Analisis Rasio Kerasian Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir".

1. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.